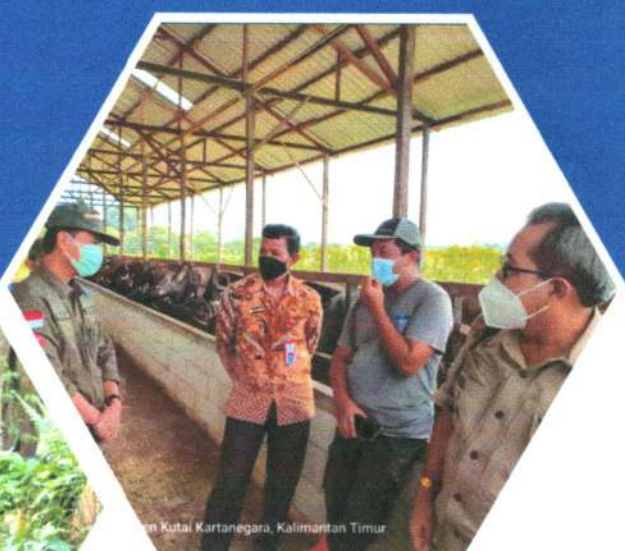
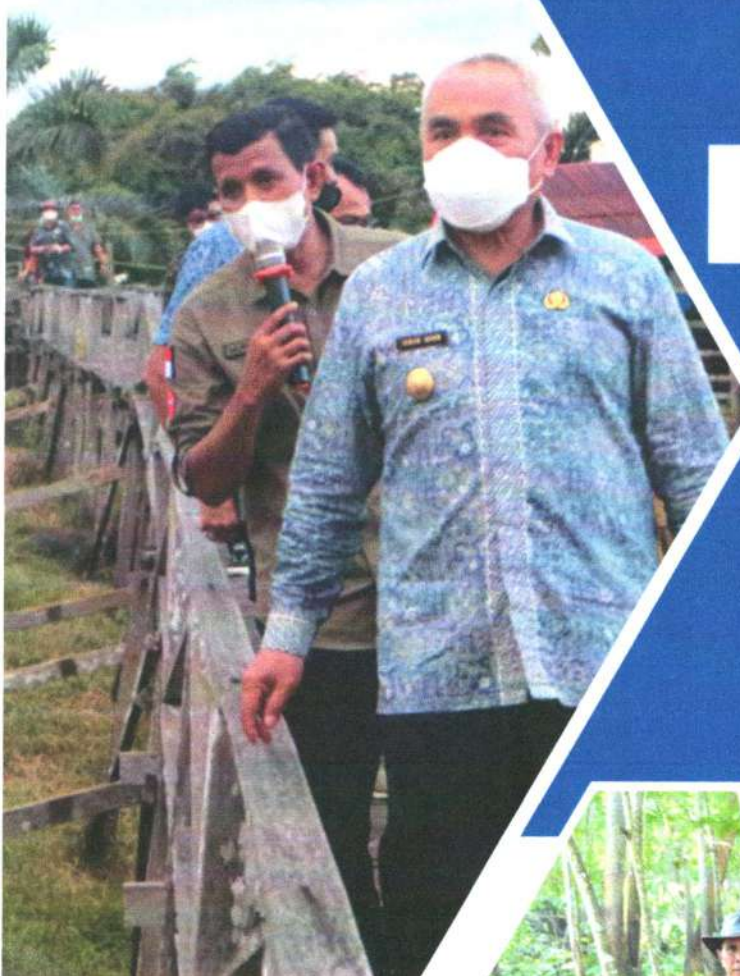




## RENCANA KERJA

# 2023

PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN



**& KESEHATAN HEWAN**  
**KALIMANTAN TIMUR**

**DINAS PETERNAKAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



TELEPON

0541 (743921 / 747745)



Jalan Bhayangkara Samarinda  
[www.peternakankaltim.go.id](http://www.peternakankaltim.go.id)

DISNAKESWANKALTIMPROV







# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 050/K. 519/2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan ayat (1) Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);



13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan Perubahannya (Lembaran Daerah Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, sebagaimana berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda;
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;
5. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda;
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
20. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
21. Dinas Pariwisata;
22. Dinas Perkebunan;
23. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
24. Dinas Kehutanan;
25. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
26. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
27. Sekretariat Daerah;



28. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Badan Pendapatan Daerah;
31. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
32. Badan Kepegawaian Daerah;
33. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
34. Badan Penelitian dan Pengembangan;
35. Badan Penghubung Provinsi;
36. Inspektorat;
37. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dalam pelaksanaan masing-masing Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan wajib melaporkan pengendalian pelaksanaan serta hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda.  
pada tanggal 5 Agustus 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

td

ISRAN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
5. Kepala Perangkat Daerah Terkait di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
PI. KEPALA BIRO HUKUM,

  
SUPARMi  
NIP. 19690512 198903 2 009



Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 serta berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
PIL. KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi

NIP. 19690512 198903 2 009



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya akhirnya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik.

Peran pemerintah bersifat stimulus atau pengungkit khususnya dalam rangka revitalisasi pertanian untuk mendorong tumbuhnya agribisnis peternakan, sehingga perkembangan peternakan tidak terlepas dari peran serta masyarakat peternakan sebagai pelaku usaha. Untuk itu diperlukan rencana kerja yang sinergi dan difasilitasi oleh Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2023 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi landasan atau pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi seluruh pelaksanaan kegiatan serta pihak terkait lainnya dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan peternakan di Kalimantan Timur, terutama dalam upaya kecukupan daging dan penyediaan komoditas peternakan lainnya, pemberdayaan ekonomi pedesaan serta memanfaatkan peluang pasar komoditas peternakan.

Samarinda, Juli 2022  
Kepala Dinas,  
  
**Munawwar, ST. M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671129 199803 1 003





## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Dinas Pernakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.....	7
2.2. Analisis kinerja pelayanan.....	27
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.....	44
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah.....	56
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	67
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	72
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	78
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	78
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.....	81
3.3. Program dan Kegiatan.....	82
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	92
BAB V. PENUTUP.....	109
Lampiran	



## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.....	7
Tabel 2.3 Dukungan Anggaran APBD Provinsi dan APBN Tahun 2008 s/d 2021.....	26
Tabel 2.4 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Produksi Daging Tahun 2021.....	32
Tabel 2.5 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Produksi Telur Tahun 2021.....	33
Tabel 2.5. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 (dua) Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan Tahun 2021 .....	34
Tabel 2.6. Pengadaan Ternak Tahun 2009-2021 .....	35
Tabel 2.7. Populasi Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (ekor).....	37
Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	43
Tabel 2.12 Struktur Konsumsi Daging Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017-2021.....	52
Tabel 2.13 Struktur Konsumsi Telur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 - 2021.....	53
Tabel 2.14 Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017-2021.....	55
Tabel 2.15 Review Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.....	57
Tabel 2.16 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 .....	68
Tabel 2.17 Daftar Usulan Langsung (Aspirasi) Kabupaten/Kota Tahun 2023....	70
Tabel 2.18 Daftar Usulan Reses (POKIR) Tahun 2023.....	71
Tabel 3.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.....	81
Tabel 3.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.....	82
Tabel 4.1 Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator dan Pendanaan Tahun 2023.....	93

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur dengan migas menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang memiliki peran dalam pencapaian PDRB Kaltim adalah sektor pertambangan dan penggalan, namun kondisi ini tidak lagi semenjak terjadinya penurunan harga komoditas pertambangan diantaranya batubara dan minyak bumi. Data PDRD Kaltim tahun 2020 sektor pertambangan dan penggalan hanya berkontribusi sebesar 41,43%, sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya 0,86% menjadi 8,77%. Dari angka tersebut perolehan PDRB bidang pertanian didominasi oleh sub sektor perkebunan kemudian perikanan, kehutanan, peternakan serta tanaman pangan dan hortikultura. Sub sektor peternakan berada pada kisaran 0,36% namun jika dilihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan kontribusi paling besar berasal dari daging ayam.

Indikator ekonomi lainnya seperti, laju inflasi mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga mencapai 0,78%, dimana salah satu harga komoditas yang mempengaruhi inflasi adalah perkembangan harga daging sapi dan harga daging ayam broiler. Sedangkan angka indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani setiap tahun bergerak fluktuatif namun cenderung naik yaitu sebesar 111,36 pada tahun 2020, akumulasi dari NTP Pertanian, Perkebunan, Kelautan Perikanan dan Peternakan. Kondisi ini menunjukkan indeks yang diterima petani dari hasil penjualan produk pertaniannya lebih tinggi dibandingkan laju indeks yang dibayar petani baik untuk konsumsi rumah tangga maupun biaya sarana produksi pertanian. NTP untuk peternakan adalah 101,65 dan NTP yang tertinggi di lingkup Pertanian berasal dari sektor perkebunan sebesar 124,57.

Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kalimantan Timur dengan penetapan target 2 (dua) juta ekor sapi menjadi landasan penetapan kebijakan strategis pembangunan peternakan selanjutnya, dengan upaya peningkatan populasi dengan sistem "Mini Ranch" sehingga tingkat kepemilikan ternak sapi pada setiap Rumah Tangga Peternak (RTP) meningkat, dan biaya produksi menurun



Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kalimantan Timur diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan asal ternak dan meningkatkan kesejahteraan peternak, dengan strategi:

1. Pengembangan Kawasan Peternakan;
2. Peningkatan Populasi dan Produktivitas Ternak;
3. Peningkatan populasi dan produktivitas Pakan Ternak;
4. Peningkatan daya saing produk peternakan dan jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan;
5. Peningkatan status kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan/ternak;
6. Peningkatan peran swasta dan penguatan usaha peternakan rakyat;
7. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Peternak;

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang peternakan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan tujuan, sasaran, Strategi dan arah kebijakan untuk dapat mencapai peningkatan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Penetapan program, kegiatan dan operasional pelayanan yang ada dirancang secara berjenjang, melalui mekanisme musyawarah pembangunan yang diformulasikan pada setiap tahunnya sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Peternakan. Peran pemerintah lebih banyak kepada peran-peran stimulasi, dinamisasi, regulasi dan fasilitasi bagi masyarakat dan pelaku usaha peternakan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat terus akan didorong pada setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan saat ini telah berkembang dengan pesat sebagai dampak dari keterbukaan informasi publik sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui media cetak, elektronik, website maupun bertatap muka.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
2. Tahap penyajian Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Adapun prioritas Pembangunan Daerah 2019 – 2023 adalah:

1. Peningkatan daya sumber daya manusia dan tenaga kerja
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah
3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi
4. Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar
5. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang
6. Peningkatan kinerja tata kelola pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik

Untuk mencapai sasaran program seperti tersebut di atas, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Renstra ini diwujudkan setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan, dimana pelaksanaannya, berapa dana yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran. Selain itu, Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mengakomodasi rencana kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait lain.



## **1.2. Landasan Hukum**

Beberapa perundangan-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai bahan acuan dan arahan bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan program/kegiatan bidang peternakan di Kalimantan Timur, sehingga tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi bidang peternakan di Kalimantan Timur, antara lain diindikasikan dalam hal :

1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan asal ternak (daging dan telur);
2. Meningkatkan efisiensi budidaya peternakan dan kelestarian lingkungan;
3. Meningkatkan jaminan keamanan pangan produk peternakan.

Tujuan yang diharapkan dari Renja Perangkat Daerah ini adalah:

1. Terjabarkannya Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Perangkat Daerah tahun 2019-2023
2. Tersedianya gambaran yang jelas tentang program dan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2023
3. Tersedianya acuan dan arahan dalam pencapaian sasaran Perangkat Daerah tahun 2023
4. Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada tahun 2023

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 secara garis besar adalah sebagai berikut :



## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusun Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal Perangkat Daerah, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangaunan selama 1 (satu) tahun ke depan oleh Perangkat Daerah.

BAB II  
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan capaian Dinas  
Pernakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Hasil pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov.Kaltim Tahun 2021 terdiri dari 6 (Enam) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan dan 95 (sembilan puluh lima) sub kegiatan. Adapun realisasi anggaran, rata-rata capaian kinerja serta predikat kinerja dari program dan kegiatan tersebut merupakan gabungan antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim, UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet serta UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah  
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2021

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2021		Predikat		
					Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV								
					(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	
K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				52.492.568.000	-	3.528.048.095	-	13.329.853.869	-	24.060.441.108	-	48.439.137.787	-	48.439.137.787	-	92,28		ST
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				43.727.646.945	-	3.155.752.828	-	11.509.506.464	-	19.759.105.630	-	40.253.485.272	-	40.253.485.272	-	92,05		ST
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	80	%	26.367.419.388	8,37	3.155.752.828	40	9.398.903.202	75	15.313.932.432	83	24.173.699.437	83	24.173.699.437	103,75	91,68	ST	ST
3.27.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	79,1	Nilai	927.550.000	0	-	76,17	319.001.909	76,17	510.839.658	76,17	1.048.246.832	76,17	1.048.246.832	96,3	113,01	ST	ST
3.27.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	4	Dokumen	530.000.000	2	-	2	307.551.909	3	403.217.409	4	623.658.284	4	623.658.284	100	117,87	ST	ST
3.27.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	17	Dokumen	397.550.000	7	-	10	11.450.000	14	107.622.249	17	424.588.548	17	424.588.548	100	106,8	ST	ST
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80	%	17.320.837.000	6	2.727.947.162	33	7.294.391.379	67	10.843.046.924	88,48	15.316.270.902	88,48	15.316.270.902	110,6	88,43	ST	T
3.27.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen dan Daftar Gaji dan Tunjangan	26	Dokumen	16.613.945.000	6	2.727.947.162	13	7.072.374.179	19	10.428.114.924	26	14.733.200.902	26	14.733.200.902	100	88,68	ST	T
3.27.001.1.02.003	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan ASN	12	Bulan	666.062.000	3	-	3	200.550.000	9	379.000.000	12	527.190.000	12	527.190.000	100	79,15	ST	T
		Jumlah Tim Penataan Arsip Dinas	1	Tim		-	-	-		0		1		1		100		ST	
		Jumlah Tim Pengamanan Aset	1	Tim		-	-	-		0		1		1		100		ST	
3.27.001.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1	Laporan	40.830.000	-	-	-	21.467.200	0	35.932.000	1	55.880.000	1	55.880.000	100	136,86	ST	ST
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80	%	239.093.500	2,75	-	11,8	20.624.000	54	157.125.000	67,11	262.620.068	67,11	262.620.068	83,89	109,84	T	ST
3.27.001.1.05.002	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Akibat Ketergapatannya	Jumlah pakan dinas beserta ketergapatannya	191	Stel	136.573.000	0	-	-	-	191	124.201.000	191	135.581.000	191	135.581.000	100	99,27	ST	ST
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	18	Orang	102.520.500	9	-	-	20.624.000	9	32.924.000	9	127.039.068	9	127.039.068	50	123,92	SR	ST
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	80	%	1.305.047.281	10,62	-	23	446.681.808	67	692.791.507	80	1.485.336.461	80	1.485.336.461	100	113,81	ST	ST
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik yang disediakan	12	Bulan	16.830.000	-	-	0,5	9.186.000	7	13.702.000	12	19.782.000	12	19.782.000	100	117,54	ST	ST
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	Unit	422.398.100	3	-	3	42.699.400	15	42.699.400	10	406.458.400	10	406.458.400	100	96,7	ST	ST
3.27.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	10	Buah	5.000.000	-	-	2	700.000	5	2.150.000	10	4.910.000	10	4.910.000	100	98,2	ST	ST
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10000	Eksemplar	120.010.348	-	-	-	26.652.200	3900	46.642.200	10000	104.582.700	10000	104.582.700	100	87,14	ST	T
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	12	Bulan	15.360.000	-	-	6	7.178.000	9	7.178.000	12	15.170.000	12	15.170.000	100	96,76	ST	ST
3.27.001.1.06.009	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah penyertenggaran rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	150	Kali	725.448.833	35	-	65	360.266.208	110	580.329.907	150	932.433.361	150	932.433.361	100	128,53	ST	ST
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	%	836.090.000	4	-	8	-	45	492.525.000	80	859.930.500	80	859.930.500	100	102,85	ST	ST
3.27.001.1.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan dinas	2	Unit	836.090.000	-	-	0	-	1	492.525.000	2	790.365.000	2	790.365.000	100	94,53	ST	ST
3.27.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan rode 2 operasional	0	Unit		-	-	-	-	0		0	31.060.000	0	31.060.000	0	0	SR	ST
3.27.001.1.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	0	Unit		-	-	-	-	0		0	38.505.500	0	38.505.500	0	0	SR	ST



Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2021		Predikat			
					Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV									
					(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	%	2.285.427.727	-	427.805.666	50	1.149.528.440	60	1.686.557.097	80	2.266.549.272	80	2.266.549.272	100	99,17	ST	ST	
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	2700	Surat	87.290.220	-	-	6	31.854.275	1893	46.565.315	2700	94.199.115	2700	94.199.115	100	107,91	ST	ST	
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	252.710.035	-	-	6	116.842.404	9	187.565.593	12	271.641.226	12	271.641.226	100	107,49	ST	ST	
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non PNS	12	Laporan	1.945.427.472	-	427.805.666	7	1.000.831.761	9	1.452.426.189	12	1.900.708.931	12	1.900.708.931	100	97,7	ST	ST	
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	%	3.453.373.880	-	-	26	168.675.666	67	931.137.246	80	2.934.745.402	80	2.934.745.402	100	84,98	ST	T	
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	63	Unit	34.212.000	-	-	44	97.500	60	12.885.030	60	19.640.903	60	19.640.903	95,24	57,41	ST	R	
3.27.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	1	Tahun	236.157.640	-	-	0,5	53.841.666	0,7	118.399.624	1	250.525.972	1	250.525.972	100	106,08	ST	ST	
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehab Gedung/Kantor dan Lainnya	1	Unit	3.089.244.240	-	-	-	103.039.000	0,75	776.792.592	1	2.544.333.402	1	2.544.333.402	100	82,36	ST	T	
3.27.001.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor	12	Bulan	93.760.000	-	-	6	11.697.500	9	23.060.000	12	120.245.125	12	120.245.125	100	128,25	ST	ST	
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi	20,5	%	7.268.235.448	-	-	6	442.007.104	10,22	1.332.832.031	19	6.053.455.952	19	6.053.455.952	92,68	83,29	ST	T	
3.27.002.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan	Calving Interval	17	Bulan	1.926.920.350	-	-	17,55	297.044.807	17,08	575.354.020	17,02	2.009.076.506	17,02	2.009.076.506	100,12	104,26	ST	ST	
3.27.002.1.04.001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	2	Kelompok	887.550.000	-	-	1	56.068.988	1	132.736.588	2	804.888.686	2	804.888.686	100	90,69	ST	T	
3.27.002.1.04.002	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Service per Conception	1,73	Indeks	808.589.800	-	-	2,15	87.592.635	2,49	284.367.248	1,73	862.940.636	1,73	862.940.636	100	106,72	ST	ST	
		Luas penambahan lahan HPT	5	Ha	-	-	-	0	-	5	-	5	-	5	-	100	-	ST	ST	
3.27.002.1.04.003	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah petugas/wasbibtak yang mendapatkan pelatihan/bimtek	5	Orang	230.780.550	-	-	5	153.383.184	5	158.250.184	5	341.247.184	5	341.247.184	100	147,87	ST	ST	
		Jumlah petugas/wasbibtak yang mendapatkan pelatihan/bimtek	25	Orang	-	-	-	25	-	25	-	25	-	25	-	100	-	ST	ST	
3.27.002.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	40	Sampel	251.515.748	-	-	20	1.070.000	20	46.370.800	40	396.699.083	40	396.699.083	100	157,72	ST	ST	
3.27.002.1.05.002	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah penangkar benih/bibit yang di bina	20	Peternak	125.011.500	-	-	0	900.000	10	4.090.000	20	106.706.195	20	106.706.195	100	85,36	ST	T	
		Luas lahan/kebun bibit HPT	500	Ha	-	-	-	10	-	26	-	500	-	500	-	100	-	ST	ST	
3.27.002.1.05.003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah ternak sapi yang didaftarkan untuk sertifikasi	150	Ekor	126.504.248	-	-	0	170.000	80	42.280.800	150	289.992.888	150	289.992.888	100	229,24	ST	ST	
		Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan ternak	50	Sampel	-	-	-	28	-	40	-	50	-	50	-	100	-	ST	ST	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2021		Predikat		
					Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV								
					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)							
(1)	(2)	(3)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
3.27.002.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	8	Sampel	298.211.850	-	-	4	66.224.400	8	95.515.800	8	364.671.450	8	364.671.450	100	122,29	ST	ST
3.27.002.1.06.001	Pemeriksaan Mutu, Klasifikasi dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah sampel obat hewan	10	Sampel	257.611.850	-	-	4	56.432.400	10	79.343.800	11	296.181.050	11	296.181.050	110	114,97	ST	ST
3.27.002.1.06.002	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah distributor obat hewan yang dilakukan pengawasan penyediaan dan peredaran obat hewan	4	Unit Usaha	40.600.000	-	-	0	9.792.000	1	16.172.000	4	68.490.400	4	68.490.400	100	168,7	ST	ST
3.27.002.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah kelompok penerima ternak	10	Kelompok	4.791.587.500	-	-	0	77.667.897	2	615.591.411	14	3.283.008.913	14	3.283.008.913	140	68,52	ST	S
3.27.002.1.07.001	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah ternak yang disediakan	200	Ekor	4.632.387.500	-	-	0	66.674.297	0	514.883.097	90	3.105.862.099	90	3.105.862.099	45	67,05	SR	S
3.27.002.1.07.002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit hijauan pakan ternak (HPT)	100000	Stek/Polis	159.200.000	-	-	0	10.993.600	60000	100.708.314	130000	177.146.814	130000	177.146.814	130	111,27	ST	ST
3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Miniranch yang teregister	24	Unit	7.178.349.700	-	-	0	735.928.471	6	1.803.561.260	24	6.861.450.996	24	6.861.450.996	100	95,59	ST	ST
3.27.003.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	24	unit	7.178.349.700	-	-	0	735.928.471	6	1.803.561.260	24	6.861.450.996	24	6.861.450.996	100	95,59	ST	ST
3.27.003.1.01.001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pedoman umum pengembangan kawasan peternakan	1	Dokumen	5.579.556.000	-	-	0	329.788.450	0	1.270.340.689	1	4.922.599.946	1	4.922.599.946	100	88,23	ST	T
		Jumlah prasarana kawasan miniranch sapi potong	24	Unit		-	0		6		24		24		100		ST		
3.27.003.1.01.002	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah peternak/peleku usaha yang dilatih	2	Kelompok /Unit Usaha	451.885.000	-	-	1	277.707.471	2	326.492.471	2	489.174.269	2	489.174.269	100	108,25	ST	ST
3.27.003.1.01.005	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Jumlah klinik hewan yang difasilitasi dan dipelihara	1	Unit	159.240.000	-	-	0	83.529.050	1	125.551.100	1	218.415.100	1	218.415.100	100	137,16	ST	ST
3.27.003.1.01.006	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah checkpoint yang dibangun dan dipelihara	1	Unit	966.668.700	-	-	0	31.158.000	1	64.971.000	1	1.164.920.853	1	1.164.920.853	100	120,51	ST	ST
3.27.003.1.01.009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Laporan koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung	1	Laporan	21.000.000	-	-	0	13.745.500	0	16.206.000	1	66.340.828	1	66.340.828	100	315,91	ST	ST
3.27.004	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	12	%	1.312.589.200	-	-	7	564.024.850	11,9	795.937.670	12	1.584.779.537	12	1.584.779.537	100	120,74	ST	ST
		Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	50	%		-	50		50		50		50		100		ST		
3.27.004.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI	10	Kabikota	414.869.700	-	-	2	148.968.900	4	261.849.220	9	471.205.370	9	471.205.370	90	113,58	T	ST
3.27.004.1.01.001	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah hewan yang divaksinasi	10000	ekor	226.425.100	-	-	2000	97.316.900	8511	150.678.900	12262	231.363.900	12262	231.363.900	122,62	102,18	ST	ST



Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2021		Predikat		
			Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV								
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		
3.27.004.1.01.002	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kompartemen tidak ada kasus penyakit jembrana	25	kompartemen	12.448.000	-	-	4	3.538.000	4	12.338.000	25	20.448.000	25	20.448.000	100	164,27	ST	ST
3.27.004.1.01.003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit jembrana	75	ekor	175.996.600	-	-	0	48.114.000	0	98.834.320	0	219.393.470	0	219.393.470	0	124,66	SR	S
		Jumlah kejadian penyakit Rabies	10	ekor		-		1		1		1		1		10		SR	
		Jumlah kejadian penyakit AI	1500	ekor		-		0		0		0		0		0		SR	
3.27.004.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Kabikota yang dilakukan pengawasan produk asal hewan	3	Kab/Kota	297.795.000	-	-	0	122.214.500	3	162.545.500	3	461.231.773	3	461.231.773	100	154,88	ST	ST
		Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	1	Checkpoint		-		0		0		1		1		100		ST	
3.27.004.1.02.001	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah analisa resiko produk asal hewan	1	Laporan	152.900.000	-	-	0	68.136.400	0	99.333.900	1	257.028.373	1	257.028.373	100	168,1	ST	ST
		Jumlah analisa resiko penyakit hewan	1	Laporan		-		0		0		1		1		100		ST	
3.27.004.1.02.002	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah kabikota yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan lalu lintas hewan	10	Kab/Kota	22.500.000	-	-	0	17.031.600	5	17.031.600	4	22.641.600	4	22.641.600	40	100,63	SR	ST
3.27.004.1.02.003	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah pertimbangan teknis pemasukan dan pengeluaran produk asal hewan	500	Ton	122.395.000	-	-	418	37.046.500	318	46.180.000	418	181.561.800	418	181.561.800	83,6	148,34	T	ST
		Jumlah hewan yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan	800	Ekor		-		327		513		800		800		100		ST	
3.27.004.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan	13	%	72.324.000	-	-	10	13.035.500	10,14	20.370.500	13	65.963.000	13	65.963.000	100	91,2	ST	ST
3.27.004.1.03.001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah kompartemen yang dilakukan sertifikasi	4	kompartemen	23.374.000	-	-	0	4.435.500	0	7.520.500	4	25.683.000	4	25.683.000	100	109,88	ST	ST
3.27.004.1.03.002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	30	Unit Usaha	48.950.000	-	-	18	8.600.000	18	12.850.000	30	40.280.000	30	40.280.000	100	82,29	ST	T
3.27.004.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	2	Unit Usaha	170.765.000	-	-	2	78.572.700	2	118.315.700	2	173.033.258	2	173.033.258	100	101,33	ST	ST
3.27.004.1.04.001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang dilakukan sertifikasi NKV	2	Unit Usaha	170.265.000	-	-	2	78.572.700	2	118.315.700	2	163.403.200	2	163.403.200	100	95,97	ST	ST
3.27.004.1.04.002	Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis	Jumlah auditor NKV yang memperoleh pelatihan/ bimtek	6	Orang	500.000	-	-	5	-	6	-	6	9.630.058	6	9.630.058	100	1926,01	ST	ST

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2021		Predikat			
					Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV									
					(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
3.27.004.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan	2	Unit Usaha	356.835.500	-	-	1	201.233.250	1	232.856.750	2	413.346.136	2	413.346.136	100	115,84	ST	ST	
3.27.004.1.05.001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikat NKV yang diterbitkan	2	Sertifikat	130.030.000	-	-	2	30.098.000	2	61.721.500	2	190.221.636	2	190.221.636	100	146,29	ST	ST	
3.27.004.1.05.002	Pengawasan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan dan pendampingan penerapan Kesrawan	10	Unit Usaha	226.805.500	-	-	0	171.135.250	5	171.135.250	10	223.124.500	10	223.124.500	100	98,38	ST	ST	
3.27.006	PROGRAM PERZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha	25	%	281.497.000	-	-	0	51.941.000	15	79.488.400	25	313.294.253	25	313.294.253	100	111,3	ST	ST	
3.27.006.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perzinan	25	Unit usaha	264.697.000	-	-	0	51.431.000	15	78.298.400	25	273.655.253	25	273.655.253	100	103,38	ST	ST	
3.27.006.1.01.002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha peternakan dan kesehatan hewan yang dilakukan penilaian dan pertimbangan teknis	2	Unit Usaha	181.920.500	-	-	0	28.144.500	1	51.132.500	2	179.919.614	2	179.919.614	100	98,9	ST	ST	
3.27.006.1.01.003	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha peternakan	1	kegiatan	82.776.500	-	-	0	23.286.500	0	27.165.900	1	93.735.639	1	93.735.639	100	113,24	ST	ST	
3.27.006.1.03	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan	1	Rakomendasi	16.800.000	-	-	0	510.000	0	1.190.000	1	39.639.000	1	39.639.000	100	235,95	ST	ST	
3.27.006.1.03.002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah distributor/pengecer obat hewan yang mendapatkan izin usaha obat hewan	1	Unit Usaha	16.800.000	-	-	1	510.000	1	1.190.000	1	39.639.000	1	39.639.000	100	235,95	ST	ST	
3.27.007	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan binaan kelompok ternak	43	%	1.319.556.209	-	-	40	316.791.837	41	433.353.837	43	1.266.805.097	43	1.266.805.097	100	96	ST	ST	
3.27.007.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyebaran informasi peternakan	12	kal	416.722.500	-	-	6	70.991.300	9	107.506.500	12	314.699.981	12	314.699.981	100	75,52	ST	S	
3.27.007.1.02.001	Diseminasi Informasi Teknis Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah dokumen data dan informasi peternakan	4	Dokumen	416.722.500	-	-	0	70.991.300	1	107.506.500	4	314.699.981	4	314.699.981	100	75,52	ST	S	
3.27.007.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi	20	Kelompok	902.833.709	-	-	20	245.710.537	20	325.847.337	20	952.105.116	20	952.105.116	100	105,46	ST	ST	
3.27.007.1.03.001	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani	Jumlah proposal permohonan bantuan yang diverifikasi	16	Kelompok	427.130.000	-	-	16	133.226.500	16	167.484.500	16	483.216.129	16	483.216.129	100	113,13	ST	ST	
3.27.007.1.03.002	Pendampingan Manajemen Koperasi Petani	Jumlah pameran/bazaar yang diikuti	5	Kali	475.703.709	-	-	2	112.484.037	3	158.362.837	4	468.888.987	4	468.888.987	80	98,57	T	ST	
		Jumlah peternak debitur sektor peternakan (KTS, KUR, KKPE dll)	55	Orang		-	-	8		35		55		55		100		ST		



Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2021		Predikat			
					Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV									
					(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
3.27.0.00.0.00.02.0002	UPTD Pembibitan dan Hewan Pakan Ternak			5.659.056.510	-	169.056.980	-	835.804.780	-	2.030.958.782	-	4.570.164.673	-	4.570.164.673	-	4.570.164.673	-	80,76	SR	T
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	80	%	3.180.663.500	-	169.056.980	-	757.951.640	65	1.719.630.021	70	2.982.098.267	70	2.982.098.267	87,5	93,76	T	ST	
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80	%	133.920.000	-	-	-	-	35	48.160.000	80	92.600.000	80	92.600.000	100	69,15	ST	S	
3.27.001.1.02.003	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen pengelola kegiatan ASN	12	bulan	133.920.000	-	-	-	-	9	48.160.000	12	92.600.000	12	92.600.000	100	69,15	ST	S	
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80	%	50.625.000	-	-	-	29.662.252	63	39.153.252	45	76.263.652	45	76.263.652	56,25	150,64	R	ST	
3.27.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan	163	stel	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR	
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	9	Orang	50.625.000	-	-	-	29.662.252	7	39.153.252	9	76.263.652	9	76.263.652	100	150,64	ST	ST	
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	80	%	443.239.268	-	-	-	137.589.567	56	260.845.317	80	552.043.643	80	552.043.643	100	124,55	ST	ST	
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik yang disediakan	12	Bulan	7.008.268	-	-	-	-	9	-	12	3.780.000	12	3.780.000	100	53,94	ST	R	
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	Unit	207.835.000	-	-	-	5.467.500	9	71.924.500	12	169.906.750	12	169.906.750	100	81,75	ST	T	
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	1	Tahun	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR	
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	12	Bulan	3.840.000	-	-	-	1.500.000	9	1.920.000	12	1.920.000	12	1.920.000	100	50	ST	SR	
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	76	Kali	224.556.000	-	-	-	130.622.067	40	187.000.817	65	376.436.893	65	376.436.893	85,53	167,64	T	ST	
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	%	677.510.000	-	-	-	-	50	121.000.000	80	604.000.000	80	604.000.000	100	89,15	ST	T	
3.27.001.1.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan UPTD PTHPT	1	Unit	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR	
3.27.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Operasional Lapangan Roda Tiga UPTD PTHP	1	Unit	677.510.000	-	-	-	-	1	121.000.000	1	604.000.000	1	604.000.000	100	89,15	ST	T	
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	%	1.534.984.732	-	169.056.980	-	569.903.421	59	1.007.189.051	80	1.368.644.421	80	1.368.644.421	100	89,16	ST	T	
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang diadministrasikan	250	Surat	18.267.788	-	-	-	3.071.000	176	7.121.000	200	12.057.000	200	12.057.000	80	66	T	S	
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	126.338.000	-	-	-	28.596.026	9	62.283.018	12	107.518.887	12	107.518.887	100	85,1	ST	T	
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Gaji Non PNS	12	Laporan	1.390.378.944	-	169.056.980	-	538.236.395	9	937.785.033	12	1.249.068.534	12	1.249.068.534	100	89,84	ST	T	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2021		Predikat		
					Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV								
					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)								
(1)	(2)	(3)	(4)		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	%	340.384.500	-	-	-	20.796.400	63	243.282.401	60	288.546.551	60	288.546.551	75	84,77	S	T
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	14	Unit	7.350.000	-	-	-	7	2.443.140	10	3.925.040	10	3.925.040	71,43	53,4	S	R	
3.27.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	1	Tahun	113.022.000	-	-	-	20.796.400	0,9	32.320.000	1	69.462.450	1	69.462.450	100	61,46	ST	R
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehab Gedung/Kantor dan Lainnya	2	Unit	220.012.500	-	-	-	1	208.519.261	2	215.159.061	2	215.159.061	100	97,79	ST	ST	
3.27.001.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor	12	Bulan	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR	
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi	20,5	%	1.526.813.010	-	-	6	77.853.140	10,22	289.081.261	19	1.117.630.798	19	1.117.630.798	92,68	73,2	ST	S
3.27.002.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Produksi HPT (Segar)	750	ton	712.020.010	-	-	575	28.572.500	750	91.377.276	1075	279.571.637	1075	279.571.637	143,33	39,26	ST	SR
		Populasi ternak sapi bibit	35	Ekor	-	-	-	0	-	4	-	56	-	56	-	160	-	ST	-
3.27.002.1.03.003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Ayam Nunukan yang menetas	100	Ekor	712.020.010	-	-	20	28.572.500	60	91.377.276	100	279.571.637	100	279.571.637	100	39,26	ST	SR
		Jumlah Kelahiran rusa bibit	10	Ekor	-	-	-	8	-	5	-	20	-	20	-	200	-	ST	-
3.27.002.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	40	Sampel	814.793.000	-	-	20	49.280.640	20	197.703.985	40	838.059.161	40	838.059.161	100	102,86	ST	ST
3.27.002.1.05.001	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak	Jumlah Kelahiran Sapi bibit	10	Ekor	814.793.000	-	-	0	49.280.640	4	197.703.985	8	838.059.161	8	838.059.161	80	102,86	T	ST
		Jumlah bibit HPT yang di produksi	5000	Stek/Polis	-	-	-	3000	-	5000	-	5500	-	5500	-	110	-	ST	-
3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Miniranch yang teregister	24	Unit	951.580.000	-	-	0	-	6	22.247.500	24	470.435.609	24	470.435.609	100	49,44	ST	SR
3.27.003.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	24	unit	951.580.000	-	-	0	-	6	22.247.500	24	470.435.609	24	470.435.609	100	49,44	ST	SR
3.27.003.1.01.010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Prasarana Pendukung UPTD, PTHPT yang dibangun/dipelihara	2	Unit	951.580.000	-	-	0	-	1	22.247.500	1	470.435.609	1	470.435.609	50	49,44	SR	SR
3.27.0.00.0.00.02.0003	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				3.105.864.545	-	203.238.287	-	984.542.625	-	2.270.376.696	-	3.615.487.842	-	3.615.487.842	-	116,41	SR	ST
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	80	%	1.515.920.020	-	203.238.287	-	642.539.744	78	1.083.562.115	80	1.681.819.673	80	1.681.819.673	100	110,94	ST	ST
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80	%	99.499.613	-	492.000	-	31.365.000	60,95	61.325.000	80	98.256.500	80	98.256.500	100	98,75	ST	ST
3.27.001.1.02.003	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan ASN	12	Bulan	99.499.613	-	492.000	-	31.365.000	9	61.325.000	12	98.256.500	12	98.256.500	100	98,75	ST	ST
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80	%	57.711.250	-	-	-	75	54.256.350	80	54.256.350	80	54.256.350	100	94,01	ST	ST	
3.27.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	45	Stel	28.586.250	-	-	-	45	28.586.250	45	28.586.250	45	28.586.250	100	100	ST	ST	
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3	Orang	29.125.000	-	-	-	3	25.670.100	3	25.670.100	3	25.670.100	100	88,14	ST	T	



Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2021		Predikat		
					Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV								
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)									
(1)	(2)	(3)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	80	%	339.326.887	-	8.624.750	-	118.074.567	53,78	241.649.991	80	468.621.966	80	468.621.966	100	138,1	ST	ST
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik yang disediakan	12	Bulan	4.286.187	-	-	-	754.000	9	1.749.000	12	5.041.200	12	5.041.200	100	117,62	ST	ST
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	Unit	58.651.000	-	6.500.000	-	52.546.000	9	58.156.990	12	58.156.990	12	58.156.990	100	99,16	ST	ST
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan	628	Eksemplar	23.740.500	-	946.750	-	6.626.850	450	14.040.050	628	27.255.450	628	27.255.450	100	114,81	ST	ST
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	12	Bulan	3.840.000	-	530.000	-	1.325.000	9	1.855.000	12	3.180.000	12	3.180.000	100	82,81	ST	T
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	39	kali	187.875.200	-	648.000	-	56.822.717	20	122.448.951	39	314.588.326	39	314.588.326	100	167,45	ST	ST
3.27.001.1.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya informasi laboratorium	1	Kegiatan	60.934.000	-	-	-	0,85	43.400.000	1	60.400.000	1	60.400.000	100	99,12	ST	ST	
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	%	56.574.608	-	-	-	46.805.000	80	55.990.000	80	55.990.000	80	55.990.000	100	98,97	ST	ST
3.27.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	1	Unit	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR	
3.27.001.1.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	6	Unit	46.805.000	-	-	-	46.805.000	6	46.805.000	6	46.805.000	6	46.805.000	100	100	ST	ST
3.27.001.1.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor	1	Unit	9.769.600	-	-	-	1	9.185.000	1	9.185.000	1	9.185.000	100	94,02	ST	ST	
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	%	842.095.270	-	189.409.430	-	421.287.771	64,94	624.653.080	80	880.673.400	80	880.673.400	100	104,59	ST	ST
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	270	Surat	14.960.246	-	3.089.850	-	4.307.500	195	9.087.000	250	17.455.950	250	17.455.950	92,59	116,68	ST	ST
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	115.724.184	-	27.411.890	-	54.320.891	9	80.406.510	12	152.374.040	12	152.374.040	100	131,67	ST	ST
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji PNS	12	Laporan	711.320.840	-	158.907.690	-	362.659.380	9	535.159.570	12	710.843.410	12	710.843.410	100	99,93	ST	ST
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	%	128.802.400	-	4.712.107	-	25.007.406	46,12	45.687.694	80	124.021.457	80	124.021.457	100	102,66	ST	ST
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5	Unit	6.380.900	-	-	-	5	1.248.040	5	3.355.678	5	3.355.678	100	52,59	ST	R	
3.27.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	1	Tahun	114.421.500	-	4.712.107	-	25.007.406	0,9	44.439.654	1	120.665.779	1	120.665.779	100	105,46	ST	ST
3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Miniranch yang terregistrasi	24	Unit	99.961.900	-	0	-	6	-	24	98.273.000	24	98.273.000	100	98,31	ST	ST	
3.27.003.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	24	unit	99.961.900	-	0	-	6	-	24	98.273.000	24	98.273.000	100	98,31	ST	ST	
3.27.003.1.01.010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Prasarana pendukung lab keswan yang di bangun/dipelihara	1	Unit	99.961.900	-	0	-	1	-	1	98.273.000	1	98.273.000	100	98,31	ST	ST	
		Jumlah Prasarana pendukung lab kesmanvret yang di bangun/dipelihara	1	Unit	-	-	0	-	0,75	-	1	-	1	-	100	-	ST	-	
3.27.004	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah bersisiko tertular	50	%	1.489.982.625	-	-	50	342.002.881	50	1.186.814.581	50	1.835.395.169	50	1.835.395.169	100	123,18	ST	ST
		Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	12	%	-	-	7	-	11,9	-	12	-	12	-	100	-	ST	-	
3.27.004.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan	13	%	1.489.982.625	-	-	10	342.002.881	10,14	1.186.814.581	13	1.835.395.169	13	1.835.395.169	100	123,18	ST	ST
3.27.004.1.03.003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Sertifikat Hasil Uji hewan	200	Sertifikat Hasil Uji	1.489.982.625	-	-	100	342.002.881	125	1.186.814.581	200	1.835.395.169	200	1.835.395.169	100	123,18	ST	ST
		Jumlah Analisis Produk Asal Hewan	80	analisis	-	-	40	-	75	-	80	-	80	-	100	-	ST	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)															90,88				
Predikat kinerja															T				

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tersebut, disampaikan hasil program/kegiatan yang telah dilakasnkan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 adalah sebagai berikut:

#### A. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

##### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 24.173.699.437,3 dari pagu anggaran Rp



26.367.419.388 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 91,68%. Indikator kinerja program tersebut adalah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan dengan realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 83% dari target 80%. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi terdiri dari tujuh kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**  
Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 1.048.246.832 dari pagu anggaran Rp 927.550.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 113,01%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah nilai akuntabilitas kinerja dengan realisasi kinerja 76,17 dari target 79,10.
- b. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**  
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 15.316.270.902 dari pagu anggaran Rp 17.320.837.000 dengan rata-rata capaian keuangan 88,43%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi keuangan dengan realisasi kinerja 88,48% dengan target 80%.
- c. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**  
Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 262.620.068,00 dari pagu anggaran Rp 239.093.500 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 109,83%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan realisasi kinerja sebesar 67,11% dari target 80%.
- d. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**  
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 1.485.336.461 dari pagu anggaran Rp 1.305.047.281 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 113,81%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah dengan realisasi kinerja 80% dari target 80%.
- e. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**  
Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 859.930.500,00 dari pagu anggaran Rp 836.090.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 102,85%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat



pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan realisasi kinerja 80% dari target 80%

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 2.266.549.272,00 dari pagu anggaran Rp 2.285.427.727 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 99,17%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi kinerja 80% dari target 80%

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 2.934.745.402 dari pagu anggaran Rp 3.453.373.880 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 84,98%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi kinerja sebesar 80% dari target 80%

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terealisasi Rp 6.053.455.952 dari pagu anggaran Rp 7.268.235.448 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 83,28%. Indikator kinerja capaian program tersebut adalah angka kelahiran sapi dengan realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 19% dari target 20,50%. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian terdiri dari 6 kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

Kegiatan peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 2.009.076.506 dari pagu anggaran Rp 1.926.920.350 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 104,26%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah calving interval dengan realisasi indikator kinerja sebesar 17,02 bulan dari target 17 bulan. Calving Interval (CI) adalah jarak antara kelahiran satu dengan kelahiran berikutnya pada ternak betina. Jarak kelahiran (CI) merupakan



salah satu ukuran produktifitas ternak sapi untuk menghasilkan pedet dalam waktu yang singkat.

- b. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi  
Kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan kewenangan provinsi sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 396.699.083,00 dari pagu anggaran Rp 251.515.748 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 157,72%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu dengan realisasi indikator kinerja sebesar 40 sampel dari target 40 sampel.

- c. Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor  
Kegiatan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 364.671.450,00 dari pagu anggaran Rp 298.211.850 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 122,28%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu dengan realisasi indikator kinerja sebesar 8 sampel dari target 8 sampel.

- d. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

Kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 3.283.008.913,00 dari pagu anggaran Rp 4.791.587.500 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 68,51%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah kelompok penerima ternak dengan realisasi indikator kinerja 14 kelompok dari target 10 kelompok.

### 3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 6.861.450.995,70 dari pagu anggaran Rp 7.178.349.700 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 95,58%. Indikator kinerja capaian program tersebut adalah jumlah miniranch yang teregister dengan realisasi indikator kinerja sebanyak 24 unit dari target 24 unit. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian terdiri dari satu kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:



a. Penataan Prasarana Pertanian

Kegiatan prasarana pertanian sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 6.861.450.996 dari pagu anggaran Rp 7.178.349.700 dengan rata-rata capaian keuangan 95,58%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah miniranch sapi potong dengan realisasi kinerja 24 unit dari target 24 unit.

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terealisasi Rp 1.584.779.537 dengan pagu anggaran Rp 1.312.589.200 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 120,73%. Indikator kinerja program tersebut terdiri dari:

- Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular dengan realisasi kinerja program sebesar 50% dari target 50%.
- Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV) dengan realisasi kinerja program sebesar 12% dari target 12%

Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner terdiri dari lima kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut

a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 471.205.370 dari pagu anggaran Rp 414.869.700 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 113,57%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI dengan realisasi indikator kinerja sebanyak 9 kab/kota dari target 10 kab/kota.

b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi

Kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 461.231.773 dari pagu anggaran Rp 297.795.000 dengan rata-rata

capaian keuangan sebesar 154,88%. Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari:

- Jumlah Kab/kota yang dilakukan pengawasan produk asal hewan dengan realisasi kinerja sebanyak 3 kab/kota dari target 3 kab/kota.
- Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan dengan realisasi kinerja sebanyak 1 check point dari target 1 check point

c. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan

Kegiatan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 65.963.000 dari pagu anggaran Rp 72.324.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 91,20%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan dengan realisasi sebesar 13% dari target 13%

d. Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 173.033.258 dari pagu anggaran Rp 170.765.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 101,32%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dengan realisasi kinerja sebanyak 2 unit usaha dari target 2 unit.

e. Kesejahteraan Hewan

Kegiatan kesejahteraan hewan sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 413.346.136 dari pagu anggaran Rp 356.835.500 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 115,83%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan dengan realisasi indikator kinerja sebanyak 2 unit dari target 2 unit.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program perizinan usaha pertanian sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 313.294.253 dari pagu anggaran Rp 281.497.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 111,29%. Indikator kinerja program tersebut adalah Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha dengan realisasi kinerja sebesar 25% dari target 25%. Program perizinan usaha pertanian terdiri dari 2 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:



- a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 273.655.253 dari pagu anggaran Rp 264.697.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 103,38%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan dengan realisasi kinerja sebanyak 25 unit usaha dari target 25 unit usaha

- b. Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan

Kegiatan penerbitan izin usaha pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 39.639.000 dari pagu anggaran Rp 16.800.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 235,94%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan dengan realisasi kinerja sebanyak 1 rekomendasi dari target 1 rekomendasi

#### 6. Program Penyuluhan Pertanian

Program penyuluhan pertanian sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 1.266.805.097 dari pagu anggaran Rp 1.319.556.209 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 96%. Indikator kinerja program tersebut adalah Cakupan binaan kelompok ternak dengan realisasi sebesar 43% dari target 43%. Program penyuluhan pertanian terdiri dari dua kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan pengembangan penerapan penyuluhan pertanian sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 314.699.981 dengan pagu anggaran Rp 416.722.500 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 75,51%. Indikator kegiatan tersebut adalah jumlah informasi penyebaran informasi peternakan dengan realisasi kinerja sebanyak 12 kali dari target 12 kali.

- b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 952.105.116 dari pagu anggaran Rp 902.833.709 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 105,45%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah kelompok



ternak yang teregistrasi dengan realisasi kinerja sebanyak 20 kelompok dari target 20 kelompok.

## **B. UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 2.982.098.267 dari pagu anggaran Rp 3.180.663.500 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 93,75%. Indikator kinerja program tersebut adalah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan dengan realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 70% dari target 80%. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi terdiri dari tujuh kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

#### **a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 92.600.000 dari pagu anggaran Rp 133.920.000 dengan rata-rata capaian keuangan 69,14%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi keuangan dengan realisasi kinerja 80% dengan target 80%.

#### **b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 76.263.652 dari pagu anggaran Rp 50.625.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 150,64%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan realisasi kinerja sebesar 45% dari target 80%.

#### **c. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp. 552.043.643 dari pagu anggaran Rp 443.239.268 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 124,54%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah dengan realisasi kinerja 80% dari target 80%.

#### **d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 604.000.000 dari pagu anggaran Rp 677.510.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 89,14%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan



pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan realisasi kinerja 80% dari target 80%

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 1.368.644.421 dari pagu anggaran Rp 1.534.984.732 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 89,16%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi kinerja 80% dari target 80%

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 288.546.550,9 dari pagu anggaran Rp 340.384.500 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 84,77%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi kinerja sebesar 60% dari target 80%

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terealisasi Rp 1.117.630.798 dari pagu anggaran Rp 1.526.813.010 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 73,2%. Indikator kinerja capaian program tersebut adalah angka kelahiran sapi dengan realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 19% dari target 20,50%. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian terdiri dari 2 kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi

Kegiatan pengelolaan sumber daya genetik (sdg) hewan tumbuhan dan mikro organisme kewenangan provinsi, kegiatan ini dilaksanakan pada UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak. Sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 279.571.637 dari pagu anggaran sebesar Rp 712.020.010 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 39,26%. Indikator kinerja kegiatan terdiri dari:

- Produksi hijauan pakan ternak (HPT) segar dengan realisasi indikator kinerja sebanyak 1075 ton dari target 750 ton

- Populasi ternak sapi bibit dengan realisasi indikator kinerja sebanyak 56 ekor dari target 50 ekor
- b. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
- Kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan kewenangan provinsi, kegiatan ini dilaksanakan pada UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dan sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 838.059.161,00 dari pagu anggaran Rp 814.793.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 102,85%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah sampel hpt, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu dengan realisasi indikator kinerja sebanyak 40 sampel dari target 40 sampel.
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 470.435.608,55 dari pagu anggaran Rp 951.580.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 49,43%. Indikator kinerja capaian program tersebut adalah jumlah miniranch yang teregister dengan realisasi indikator kinerja sebanyak 24 unit dari target 24 unit. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian terdiri dari satu kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a. Penataan Prasarana Pertanian untuk sub kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
- Kegiatan penataan prasarana pertanian untuk sub kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung uptd pertanian serta sarana pendukungnya pada UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dengan pagu anggaran Rp 951.580.000 sampai dengan triwulan IV realisasi keuangan sebesar Rp 470.435.608,55 dengan persentase keuangan 49,44%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah prasarana pendukung UPTD. PTHPT yang dibangun/dipelihara dengan target 2 unit dan sampai dengan triwulan IV terealisasi 1 unit



**C. UPTD. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 1.681.819.673 dari pagu anggaran Rp 1.515.920.020 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 110,94%. Indikator kinerja program tersebut adalah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan dengan realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 80% dari target 80%. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi terdiri dari tujuh kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 98.256.500 dari pagu anggaran Rp 99.499.613 dengan rata-rata capaian keuangan 98,75%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi keuangan dengan realisasi kinerja 80% dengan target 80%.

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 54.256.350 dari pagu anggaran Rp 57.711.250 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 94,01%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan realisasi kinerja sebesar 80% dari target 80%.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp. 468.621.966 dari pagu anggaran Rp 339.326.887 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 138,10%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah dengan realisasi kinerja 80% dari target 80%.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 55.990.000 dari pagu anggaran Rp 56.574.600 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 98,96%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan realisasi kinerja 80% dari target 80%



e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 880.673.400 dari pagu anggaran Rp 842.005.270 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 104,59%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi kinerja 80% dari target 80%.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 124.021.457 dari pagu anggaran Rp 120.802.400 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 102,66%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi kinerja sebesar 80% dari target 80%

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 98.273.000 dari pagu anggaran Rp 99.961.900 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 98,31%. Indikator kinerja capaian program tersebut adalah jumlah miniranch yang teregister dengan realisasi indikator kinerja sebanyak 24 unit dari target 24 unit. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian terdiri dari satu kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan penataan prasarana pertanian untuk sub kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya pada UPTD. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan pagu anggaran Rp 99.961.900 sampai dengan triwulan IV realisasi keuangan sebesar Rp 98.273.000 dengan persentase keuangan 98,31%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah prasarana pendukung UPTD. PTHPT yang dibangun/dipelihara dengan target 2 unit dan sampai dengan triwulan IV terealisasi 2 unit

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terealisasi Rp 1.835.395.169 dengan pagu anggaran Rp 1.489.982.625 dengan rata-rata



capaian keuangan sebesar 123,18%. Indikator kinerja program tersebut terdiri dari:

- Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular dengan realisasi kinerja program sebesar 50% dari target 50%.
- Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV) dengan realisasi kinerja program sebesar 12% dari target 12%

Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner didukung dengan kegiatan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan dengan indikator kinerja peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan. Sampai dengan triwulan IV realisasi indikator kinerja tersebut terealisasi sebesar 100%.

Dalam melaksanakan pembangunan peternakan di Provinsi Kalimantan Timur selain bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, juga bersumber dari dana APBN yang berasal dari kegiatan Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan pengalokasian berupa Tugas Pembantuan. Dukungan anggaran APBD dan APBN sejak tahun 2008 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Dukungan Anggaran APBD Provinsi dan APBN tahun 2008 s/d 2021

No.	Tahun Anggaran	APBN Ditjen PKH & PSP TP (Rp)	APBD (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	2008	11.816.193.688 Realisasi 97,23 %	14.652.220.346 Realisasi 91,02%	26.468.414.034
2.	2009	12.001.119.758 Realisasi 92,68 %	29.867.648.163 Realisasi 93,53 %	41.868.767.921
3.	2010	12.303.500.000 Realisasi 97,30 %	41.080.147.000 Realisasi 88,85 %	53.383.647.000
4.	2011	43.321.540.000 Realisasi 88,91 %	47.833.050.500 Realisasi 91,02 %	91.154.590.500
5.	2012	31.367.206.000 Realisasi 81,05 %	54.784.714.000 Realisasi 95,72 %	86.151.920.000
6.	2013	35.086.258.000 Realisasi 96,03%	72.318.668.123 Realisasi 94,53%	107.404.926.123

No.	Tahun Anggaran	APBN Ditjen PKH & PSP TP (Rp)	APBD (Rp)	Jumlah (Rp)
7.	2014	30.764.230.000 Realisasi 73,79%	67.517.958.263,50 Realisasi 94,80%	98.282.188.263,50
8.	2015	307.682.215.000 Realisasi 46,28%	80.919.778.040 Realisasi 74,52%	388.601.993.040
9.	2016	25.083.899.000 Realisasi 91,63%	59.605.749.228 Realisasi 94,59%	81.466.766.834
10.	2017	8.332.948.000 Realisasi 90,00%	20.299.891.000 Realisasi 90,68%	28.622.839.000
11.	2018	3.413.441.000 Realisasi 94,86%	22.157.153.540,07 Realisasi 96,39%	25.570.594.540,07
12.	2019	7.156.453.000 Realisasi 96,61%	46.903.080.000 Realisasi 91,99%	54.059.533.000
13.	2020	4.133.774.000 Realisasi 95,29%	46.634.207.724 Realisasi 90,21%	50.767.981.724
14.	2021	4.708.807.000 Realisasi 97,04%	59.575.683.770 Realisasi 81,38	64.284.490.770

Dana APBN merupakan akumulasi Anggaran yang berasal dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Pada Tahun anggaran 2021, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.575.683.770 termasuk belanja langsung dan tidak langsung. Realiasi keuangan selama tahun 2021 mencapai 81,38% atau sebesar Rp 48.483.518.337,12. Sedangkan realisasi fisik sebesar 95%. Realisasi keuangan tersebut merupakan perolehan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

### A. Analisis Gambaran Tupoksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Propinsi di bidang Peternakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah. Pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Kalimantan Timur adalah Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Timur yang diperkuat dengan Keputusan Gubernur Kalimantan



Timur No. 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Kalimantan Timur.

Namun setelah terbitnya Peraturan Pemerintah No, 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perangkat daerah tersebut dilakukan penataan kembali. Sehingga terbitlah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur. Tindak lanjut dari Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi. Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tersebut terdiri atas 1 (satu) Esselon II yaitu Kepala Dinas; 7 (tujuh) Esselon III yaitu 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang dan 2 (dua) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas; 21 (dua puluh satu) Esselon IV yaitu 5 (lima) orang Kepala Sub Bagian dan 16 (lima belas) Kepala Seksi serta kelompok jabatan fungsional.

Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur, membawahi 7(tujuh) unit Esselon III, meliputi:

1. Sekretaris, membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu:
  - a. Sub Bagian Perencanaan Program
  - b. Sub Bagian Umum
  - c. Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
  - a. Seksi Perbibitan Ternak
  - b. Seksi Budidaya Ternak dan Alat dan Mesin Peternakan
  - c. Seksi Penataan, Kelembagaan, dan Penyebaran Ternak
3. Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
  - a. Seksi Pengembangan Kawasan dan Pakan Ternak
  - b. Seksi Pelayanan Usaha dan Pembiayaan Peternakan
  - c. Seksi Data dan Informasi Peternakan
4. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
  - a. Seksi Perlindungan Hewan
  - b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
  - c. Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan

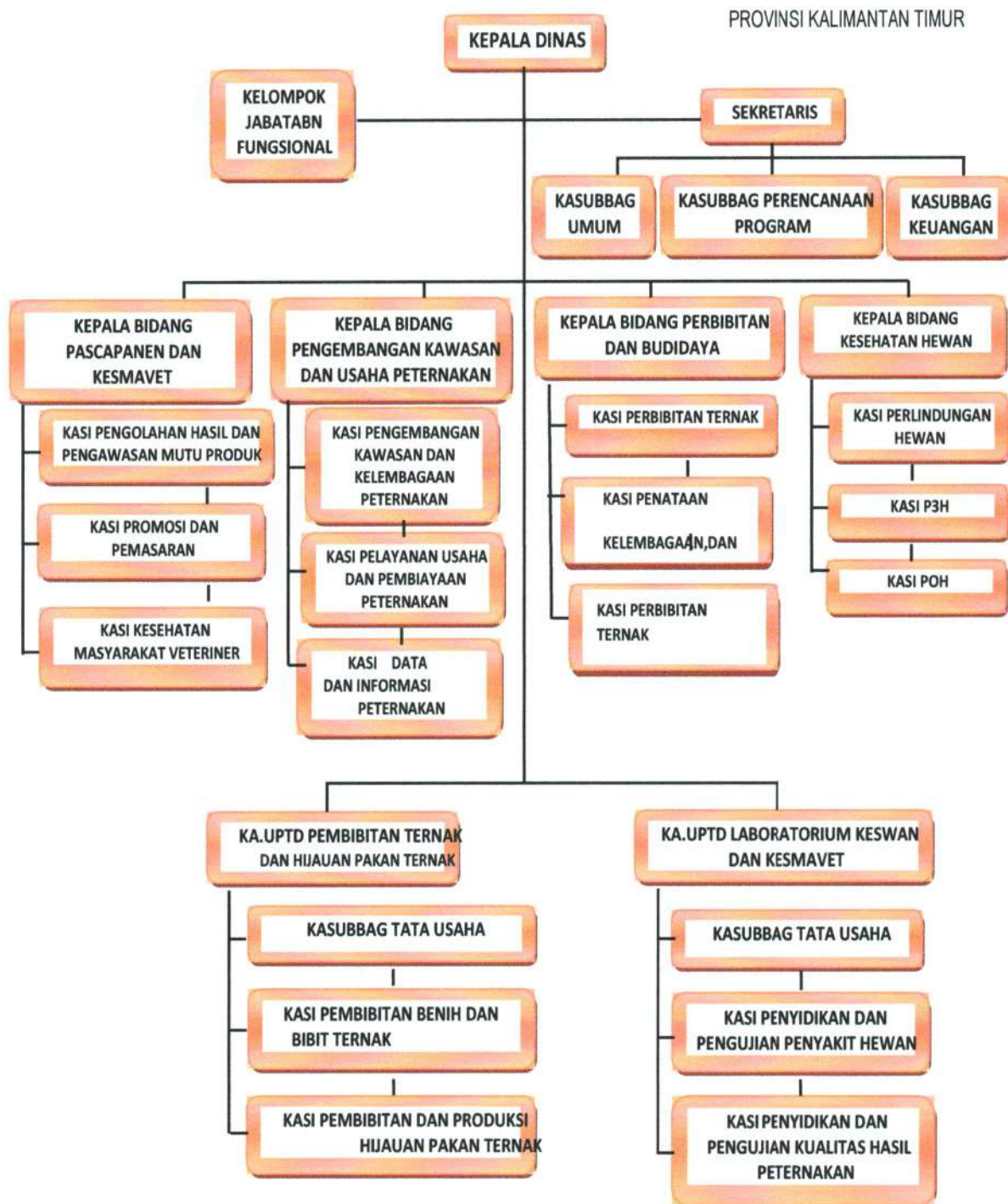
5. Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi 3 (tiga) seksi), yaitu:
  - a. Seksi Pengolahan Hasil dan Pengawasan Mutu Produk
  - b. Seksi Promosi dan Pemasaran
  - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
6. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, membawahi 3 (tiga) seksi), yaitu:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Seksi Benih dan Bibit Ternak
  - c. Seksi Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
7. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet, membawahi 3 (tiga) seksi), yaitu:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Seksi Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan
  - c. Seksi Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Peternakan
8. Kelompok Jabatan Fungsional



Struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada **Gambar Bagan berikut**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

LAMPIRAN XXII PERDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 09TAHUN 2016  
TANGGAL : 22 Nopember 2016  
TENTANG : STRUKTUR DINAS PETERNAKAN DAN



**B. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah**

**I. Analisis Atas Capaian Indikator Kinerja Pada Tujuan Tahun 2021**

Indikator tujuan yaitu “Kontribusi lapangan usaha subsector peternakan terhadap ekonomi daerah”

PDRB merupakan indikator utama untuk pembentukan output dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Subsector peternakan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sector pertanian, sehingga subsector peternakan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan ketahanan pangan, terutama dalam menjaga ketersediaan dan kecukupan protein hewani yang mayoritas terdapat pada komoditas peternakan, seperti daging, telur, dan susu yang tidak dapat digantikan dan ketersediaanya sebagian masih bergantung kepada impor.

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Tujuan Tahun 2021

**Capaian Tujuan: Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah**

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Kontribusi Lapangan Usaha Subsector peternakan terhadap ekonomi daerah	%	0,36	0,32	88,89

Pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja tujuan ini sangat baik, karena capaian kontribusi lapangan usaha subsector peternakan terhadap ekonomi daerah terealisasi 0,32% dari target 0,36% dengan capaian 88,89%

Berdasarkan data diatas kontribusi lapangan usaha sub sector peternakan terhadap ekonomi daerah mencapai 0,32% pada tahun 2021. Dibandingkan tahun 2020, subsector peternakan mengalami penurunan sebesar 11% dari 0,36% menjadi 0,35%. Namun secara nilai rupiah mengalami peningkatan dari 2.187,54 milyar menjadi 2.255,08 milyar. Peningkatan nilai rupiah ini tidak bersamaan dengan peningkatan kontribusi sub sector peternakan karena kontribusi kenaikan PDRB total sumbangan terbesar dari sektor Pertambangan



## II. Analisis Atas Capaian Indikator Kinerja Pada Sasaran Tahun 2021

### Indikator:

#### **1. Produksi Daging**

Sumber protein asal daging secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu daging sapi dan kerbau, daging kambing dan domba, serta daging unggas. Produksi daging unggas memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi/kerbau maupun kambing/domba. Seiring dengan semakin membaiknya pendapatan masyarakat, konsumsi produk peternakan cenderung turut meningkat. Peningkatan produksi daging ini tidak terlepas dari peningkatan populasi komoditas tersebut yang berasal dari lokal/dalam Kaltim.

Tabel 2.4 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Produksi Daging Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Produksi Daging	Ton	73.274,74	75.811,96	103,46

Permintaan daging yang semakin meningkat setiap tahunnya sebagai akibat dari peningkatan pendapat dan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada peningkatan gizi disamping itu juga tumbuh dan berkembangnya perusahaan asing (perushanaan pertambangan) di Kalimantan Timur. Pengukuran kinerja terhadap sasaran meningkatnya produksi pangan asal ternak terutama produksi daging sampai dengan semester II terealisasi persentase capaian produksi daging sebesar 103,46%. Sehingga untuk ketersediaan daging dapat dikatakan cukup untuk di konsumsi.

Produksi daging secara keseluruhan pada tahun 2021 mencapai 75.811,96 ton meningkat sebanyak 5,53% dari tahun 2020 yaitu 71.837,98 ton. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi daging sudah mengalami peningkatan yang menandakan kondisi perekonomian masyarakat sudah mulai membaik pasca pandemic Covid-19. Produksi daging Kalimantan Timur belum bisa mencukupi kebutuhan konsumsi daging masyarakat Kalimantan Timur yang mencapai 83.665,07 ton per tahun sehingga untuk mencukupi kebutuhan konsumsi daging masih mendatangkan daging maupun produk olahan daging dari luar Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kualitas dan kuantitas sapi induk masih rendah, jarak kelahiran sapi (calving interval) cukup panjang, dan tingkat kematian pedet cukup tinggi.

**2. Produksi Telur**

Pemenuhan protein asal ternak dapat dipenuhi dari produk selain daging, yaitu telur dan susu. Telur merupakan salah satu produk ternak yang memiliki nilai nutrisi yang baik, mudah diperoleh dan harganya relatif murah. Tingkat konsumsi berbagai jenis telur secara nyata dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, harga, ukuran rumah tangga dan tingkat pendidikan keluarga.

Produksi telur merupakan jumlah telur yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu dan usaha peternakan rakyat dalam waktu tertentu, sedangkan konsumsi telur merupakan jumlah telur yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tabel 2.5 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Produksi Telur  
Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Produksi Telur	Ton	14.148,65	13.181,14	93,16

Pemenuhan protein asal ternak dapat dipenuhi dari produk selain daging, yaitu telur diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk, perbaikan ekonomi masyarakat, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi protein hewani. Pengukuran kinerja terhadap sasaran meningkatnya produksi pangan asal ternak terutama produksi telur sampai dengan semester II terealisasi persentase capaian produksi telur sebesar 93,16%. Sehingga untuk ketersediaan telur dapat dikatakan cukup untuk di konsumsi.

Produksi telur secara keseluruhan pada tahun 2021 mencapai 13.181,14 ton/tahun sedangkan Konsumsi telur mencapai 24.140,73 ton/tahun. Produksi telur Kalimantan Timur belum bisa mencukupi kebutuhan konsumsi telur masyarakat Kalimantan Timur. Untuk memenuhi kekurangan akan permintaan telur maka dipenuhi dengan pemasukan telur dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor diantaranya peran swasta/ usaha peternakan rakyat dibidang ayam petelur masih rendah, biaya investasi usaha ayam petelur cukup tinggi, populasi ayam petelur masih sedikit, dan manajemen budidaya ayam petelur belum optimal.



**Capaian Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Peternak**

**Indikator:**

**1. Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan**

Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Sehingga merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, maka semakin kuat tingkat daya beli petani.

Tabel 2.5 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 (dua) Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	Nilai Konstanta	102	104,27	102,23

Pengukuran kinerja terhadap sasaran ini tahun 2021 sangat baik, karena terealisasi 104,27 dari target 102 dengan persentase capaian kinerja sebesar 102,23% artinya sepanjang tahun 2021 petani ternak masih mengalami keuntungan atau masih bisa belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Jika NTP di atas 100, maka peternak masih untung karena nilai penjualannya lebih tinggi ketimbang biaya rumah tangga. Sementara jika NTP-nya pas 100, maka peternak tidak untung dan tidak rugi. Jika NTP dibawah 100 peternak mengalami kerugian karena penghasilan dari penjualan produksi peternakan masih lebih rendah dibanding biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan pokok rumah tangga.

**III. PENGADAAN TERNAK**

Pengadaan Ternak bibit setiap tahun cenderung meningkat baik bersumber dari Anggaran APBD maupun dari Anggaran APBN. Pengadaan ternak sejak tahun 2009 sampai dengan 2021 dari anggaran APBD Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Pengadaan Ternak Tahun 2009-2021

Tahun	Jenis Ternak	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Presentase (%)
2009	Sapi Bali	920	920	100
	Kerbau	30	30	100
	Kambing	235	235	100
2010	Sapi Bali	1.116	1.116	100
	Kerbau	30	30	100
2011	Sapi Bali	1.219	1.219	100
	Sapi BC	100	100	100
	Babi	175	175	100
	Kerbau	50	62	124
	Itik	3.300	3.300	100
2012	Sapi Bali	1.900	1.820	96
	Sapi BC	100	150	150
	Babi	175	175	100
	Kerbau	30	30	100
	Itik	3.300	3.300	100
	Kerbau	100	100	100
2013	Sapi Bibit	1.800	1478	82,11
	Sapi Bakalan	400	250	62,5
	Sapi Potong	1080	1080	100
	Sapi BC	175	175	100
2014	Sapi Bibit	1.580	1.580	100
	Sapi Bakalan	776	776	100
	Sapi Potong	195	195	100
2015	Sapi Bibit	483	483	100
	Sapi Bakalan	472	472	100
	Sapi Potong	200	200	100
	Babi	125	125	125
	Sapi BC	950	95	10
2016	Sapi Bibit	480	480	100
	Sapi Bakalan	50	50	100
	Sapi Potong	220	220	100
	Sapi PO	365	365	100
	Kambing	450	450	100
2017	Sapi Bali	25	25	100
	Itik	400	400	100
2018	Sapi Bali	115	115	100



Tahun	Jenis Ternak	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Presentase (%)
2019	Sapi Jantan	15	15	100
	Pejantan	80	80	100
	Pemacek Sapi Bali			
	Pemacek Brahman Cross	20	20	100
	Sapi Bali Jantan dan Betina	108	108	100
2020	Sapi Bali	368	368	100
2021	Sapi Bali	265	90	33,96
	Kambing	148	148	100

## PERMASALAHAN

### A. Permasalahan

Permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah *“Percepatan Pertumbuhan Populasi Ternak Belum Sebanding Dengan Peningkatan Konsumsi”*, sehingga permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan ke depan adalah sebagai berikut:

a) Populasi dan Produktivitas ternak masih rendah;

Peningkatan populasi di Kalimantan Timur pada dasarnya masih relatif rendah perkembangannya, terutama pada ternak sapi pada tahun 2016 populasi berjumlah 118.712 ekor pada tahun 2020 populasi berjumlah 123.069 ekor, berdasarkan data tersebut peningkatan yang terjadi pada populasi ternak sapi hanya sebesar 0,91% tiap tahunnya, dapat dilihat pada Tabel 2.7. Hal tersebut terjadi disebabkan berbagai macam faktor seperti ketersediaan bibit ternak lokal yang masih sangat kurang, manajemen perkawinan belum optimal, kemampuan petugas belum optimal, Good Farming Practice tidak diterapkan dengan baik, perbaikan mutu genetik ternak masih kurang optimal, pengawasan terhadap peredaran obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan belum optimal.

Tabel. 2.7 Populasi Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (ekor)

No	Jenis Ternak	2017	2018	2019	2020	2021*	r (%)
1	Sapi	119.123	117.504	119.485	119.974	120.446	<b>0,28</b>
2	Sapi Perah	107	110	91	87	94	<b>-3,22</b>
3	Kerbau	7.055	6.157	6.194	6.552	6.552	<b>-1,94</b>
4	Kambing	61.526	66.378	67.892	69.929	73.426	<b>4,52</b>
5	Domba	281	439	590	635	565	<b>19,10</b>
6	Babi	85.749	78.968	82.546	83.652	82.980	<b>-0,82</b>
7	Kuda	91	97	102	95	97	<b>1,61</b>
8	Ayam Buras	5.418.086	4.569.169	4.372.415	4.435.205	4.654.618	<b>-3,73</b>
9	Ayam Petelur	822.533	1.702.178	853.693	1.218.994	1.102.995	<b>7,61</b>
10	Ayam Pedaging	66.268.201	62.310.692	67.886.566	59.402.832	63.971.068	<b>-0,88</b>
11	Itik	219.149	248.978	254.683	254.749	247.956	<b>3,14</b>
12	Kelinci	15.005	14.189	8.859	10.830	11.044	<b>-7,38</b>
13	Puyuh	46.693	66.593	65.808	79.222	77.753	<b>13,60</b>
14	Merpati	4.163	4.027	4.776	5.015	4.573	<b>2,38</b>
15	Itik Manila	35.834	42.851	42.890	52.823	46.480	<b>6,64</b>

Keterangan: \* = Angka Sementara

Sumber data : Buku Statistik Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Untuk dapat memenuhi kebutuhan sapi potong diperlukan populasi dasar sebesar 431.028 ekor, dengan asumsi jumlah pemotongan per tahun 53.213 ekor, jika 90% dapat diambil dari populasi maka setiap tahun dapat dipotong 47.892 ekor. Sedangkan populasi saat ini 120.446 ekor sehingga masih perlu penambahan 310.582 ekor.

Produktivitas sapi di Kalimantan Timur dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut:

1. Bobot lahir rata-rata 20 kg untuk ternak sapi bali, bobot lahir rata-rata untuk sapi persilangan sebesar 30 kg
2. Bobot potong sapi rata-rata 251 kg
3. Calving interval rata-rata 22 bulan

Indikator tersebut masih perlu ditingkatkan untuk bobot lahir hingga mencapai 40 kg, untuk bobot potong sapi rata-rata 400 kg dan calving interval rata-rata 13 - 14 bulan.



b) Produksi dan produktivitas Hijauan Pakan Ternak masih rendah

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan baik pembibitan, pengembangbiakan maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan penggunaan bahan pakan lokal maupun biomassa ikutan dari hasil tanaman yang ada disekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia baik berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi. Produksi hijauan pakan ternak mencapai 33.877 ton dengan luas kebun HPT 1.355 Ha, dengan produksi hijauan mencapai 25 ton tahun. Produktivitas hijauan ini akan meningkat jika dilakukan pemeliharaan yang baik dan bibit yang berkualitas. Produktivitas rumput gajah dapat mencapai 200-300 ton/ha/tahun.

c) Daya saing produk peternakan masih rendah

Potensi basis komoditas dan produk peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar lokal. Daya saing produk peternakan, merupakan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan baik lokal maupun nasional. Provinsi Kalimantan Timur untuk usaha Hilirisasi dan industrialisasi produk peternakan masih rendah dan manajemen pemasaran produk peternakan masih kurang.

d) Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) belum maksimal

Kesehatan hewan merupakan komponen yang penting pada usaha peternakan dalam menghasilkan produk disamping juga mempengaruhi pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui pengendalian, pencegahan dan pengobatan yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan. Disamping itu kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat emerging dan reemerging diseases melalui arus perdagangan ternak antar pulau dan antar wilayah.

Penyakit hewan menular strategis (phms) di kaltim kejadiannya masih cukup tinggi seperti bvd, ibr, pullorum, anaplasmosis, tripanosomiasis,



babesiolosis sedangkan penyakit hewan menular strategis yang sangat berpengaruh terhadap keuntungan peternak adalah ai, jembrana, bruceolosis. Penyakit hewan menular yang bersifat zoonosis yang masih banyak terjadi di kaltim seperti rabies, salmonellosis, fasiolosis dan ai. Keterbatasan biaya, tenaga medis/ paramedic dan peralatan menjadi hambatan dalam penanggulangan penyakit hewan menular tersebut.

Lalu lintas hewan ke kalimantan timur melalui darat, laut dan udara dengan frekuensi yang sangat tinggi menyebabkan masuknya penyakit hewan dari luar sehingga kaltim menjadi daerah terancam kasus penyakit hewan menular. Jalur keluar masuknya hewan melalui laut dan udara, pengawasannya menjadi tanggung jawab karantina pertanian, sedangkan dinas peternakan dan kesehatan hewan prov. Kaltim hanya berwenang mengeluarkan surat pertimbangan teknis kesehatan hewan, namun masih banyak klien yang belum tertib administrasi untuk mendapatkan surat ijin pemasukan/pengeluaran hewan. Oleh karena itu perlu peningkatan koordinasi dengan Karantina Pertanian Balikpapan, Samarinda dan Karantina Daerah asal ternak.

Lalu lintas Hewan dan Produk ternak melalui darat menjadi tanggung jawab DPKH namun sarana prasarana untuk pengawasan peredaran hewan dan produk ternak masih sangat kurang, yaitu check point hanya ada 1 (satu) unit di Kec. Muara Komam sebagai unit pelaksana pengawasan untuk lalu lintas hewan dari Kalimantan Selatan sedangkan wilayah perbatasan dengan Kalimantan utara, Kalimantan tengah, belum tersedia check point.

Ancaman terhadap kejadian kasus penyakit hewan juga disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap peredaran obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan belum optimal. Masih banyak terjadi kasus penolakan sampel obat hewan yang akan diperiksa disebabkan oleh komposisi dan klasifikasi obat hewan tidak sesuai yang didaftarkan, serta nomor registrasi sudah kadaluarsa.

Pelayanan kesehatan hewan masih kurang optimal hal ini disebabkan karena sumber daya, fasilitas, sarana dan prasarana sangat terbatas. Sumber daya meliputi tenaga medic dan paramedik, fasilitas seperti peralatan dan obat-obatan serta sarana dan prasarana klinik hewan milik pemerintah maupun swasta belum ada di setiap kecamatan.

Disamping pencegahan dan pemberantasan terhadap penyakit hewan menular, juga harus dilakukan penerapan dan replikasi program



ISIKHNAS secara rutin dan berkala untuk menganalisis status kesehatan hewan.

UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan yang ada di 10 (sepuluh) wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Kemampuan diagnostik laboratorium dapat dilihat dari berbagai metode pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan di laboratorium, dengan tingkat ketelitian masing-masing pengujian dan sesuai dengan permintaan customer. Dalam menjalankan fungsinya, UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet melayani kegiatan laboratorium yaitu: Penyidikan dan pengujian penyakit hewan (P2PH) meliputi Pengujian Serologi, Pengujian Virologi, Pengujian Parasitologi, Pengujianpatologi Anatomi.

Pelayanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet memiliki keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada di UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet, maka perlu penambahan tenaga penguji dan peningkatan SDM melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan laboratorium dan kemajuan teknologi yang ada. Prasarana dan sarana yang ada di UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet sebagai laboratorium type B telah memadai, namun adanya alat yang rusak maka diperlukan adanya perbaikan, perawatan dan pembelian alat yang baru. Seiring perkembangan teknologi diperlukan adanya upaya peningkatan kecanggihan peralatan yang ada guna efesiensi waktu, tenaga dan biaya untuk mempermudah pelayanan kepada konsumen sehingga konsumen puas terhadap pelayanan laboratorium dan hasil uji yang kredible, kepuasan konsumen adalah salah satu misi keberhasilan pelayanan dari UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet.

Adanya peningkatan status penyakit hewan, merupakan cerminan keberhasilan upaya pengendalian dan pencegahan penyakit dalam mendukung kedaulatan kesehatan hewan dan daya saing produk peternakan.

e) Pengembangan Kawasan Peternakan belum optimal

Pengembangan Kawasan peternakan bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya lahan, ternak, peternak, teknologi, sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan produktivitas peternakan, pendapatan dan kesejahteraan peternak, serta menciptakan wilayah



komoditas. Pengembangan Kawasan peternakan di Provinsi Kalimantan Timur belum optimal padahal potensi sumber daya alam di Kalimantan Timur cukup mendukung diantaranya tersedianya lahan eks tambang, adanya perkebunan sawit yang dapat diintegrasikan dengan sapi, dan adanya kebijakan menggunakan perhutanan social untuk masyarakat.

f) Jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan belum optimal

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara Kesehatan hewan dan produk Hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Oleh karena itu penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan, penjaminan produk hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan, penerapan kesejehteraan hewan serta pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Produk hewan yang aman yang berkualitas merupakan faktor kunci untuk meningkatkannilai tambah dan daya saing produk, sehingga produk hewan nasional dapat bersaing di pasar local maupun nasional. UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet melayani kegiatan laboratorium yaitu: penyidikan dan pengujian kualitas hasil peternakan (P2KHP) meliputi uji Salmonella, uji E.coli, uji Staphylococcus, uji Colliform, uji Total Plate Count (TPC). Hasil uji penyakit hewan untuk penyakit zoonosis seperti brucelosis, pullorum dan avian influenza terdapat hasil positif, perlu adanya penyidikan dan penanganan lebih lanjut dari instansi terkait pada wilayah atau daerah yang terinfeksi penyakit-penyakit tersebut di Provinsi Kalimantan Timur.

Masih ditemukannya cemaran mikroba dengan jumlah mikroba diatas nilai ambang batas untuk uji kualitas hasil peternakan pada pengujian TPC, Salmonella, E. Coli, Colliform dan TPC dan masih ditemukannya pemalsuan daging sapi dengan daging babi. Perlu adanya upaya sosialisasi dan pembinaan tentang penanganan PAH pada produsen oleh instansi terkait di wilayah Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

g) Peran swasta dan usaha peternakan rakyat belum optimal

Perusahaan swasta di Kalimantan Timur masih sedikit dan didominasi oleh perusahaan ayam pedaging. Perusahaan swasta yang menggeluti usaha ayam pedaging dalam jumlah besar baru 7 perusahaan, selebihnya



yaitu perusahaan skala menengah dan kemitraan. Sedangkan untuk perusahaan penggemukan sapi dalam skala besar baru terdapat 1 di Kab. PPU. Peran swasta yang masih rendah ini dikarenakan tingginya biaya investasi peternakan di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk peternakan rakyat kesulitan mendapat modal untuk usaha dibidang peternakan. Perlu adanya sosialisasi/edukasi dan pembinaan terhadap peternakan rakyat terkait akses permodalan seperti KUR, AUTS, KTS, selain itu perlu peningkatan akses informasi tentang perizinan usaha peternakan agar investor mau berusaha di Kalimantan Timur.

h) Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Peternak masih rendah

Ada kecenderungan bahwa peternak tidak mempunyai kapasitas pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk dapat memahami permasalahan mereka, memikirkan permasalahannya, atau memilih pemecahan masalah yang paling tepat untuk mencapai tujuan mereka. Kemungkinan yang terjadi selanjutnya adalah pengetahuan mereka berdasarkan kepada informasi yang keliru karena kurangnya pengalaman, pendidikan, atau faktor nilai budaya yang ada. Terbatasnya pengetahuan, sikap dan keterampilan petani, akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan untuk berternak yang lebih baik. Sehingga kualitas, kuantitas produksi peternakan tidak optimal. Hal tersebut ditandai dengan populasi dan produktifitas komoditas peternakan yang belum mencukupi ketersediaan dan keamanan pangan. Oleh karena itu perlunya dilakukan pembinaan terhadap peternak maupun petugas lapangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peternak maupun petugas agar dapat meningkatkan usaha dibidang peternakan. Selain itu memberikan informasi dan teknologi dalam budidaya peternakan secara continue.

Tabel 2.11  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator Sasaran Kinerja	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan			104	104,5	102	102	102	102,54	104,27	102	102	
2	Produksi Daging (Ton)			82.811,60	85.479,70	73.274,74	74.740,23	76.235,08	80.917,96	75.811,96	74.740,23	76.235,08	
	Produksi Telur (Ton)			11.786,10	12.058,60	14.148,65	14.290,14	14.433,04	11.386,31	13.181,14	14.290,14	14.433,04	



### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

#### **A. Keterkaitan Koordinasi dan Sinergi Program Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**

Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 sudah menjadi acuan, namun RENSTRA 2018-2023 belum menjadi acuan karena pemilihan kepala daerah Kabupaten/Kota lebih dahulu dilaksanakan, sehingga keterkaitan dengan renstra Kabupaten/Kota masih dengan Renstra dengan periode sebelumnya seperti:

1. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2016–2021: “Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian”.
2. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tujuan dan sasaran renstra, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2016–2021: Meningkatkan Produktivitas, tata kelola dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas dan meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
3. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur dengan Visi Tahun 2016 – 2021: “Terwujudnya Pembangunan Agribisnis Pertanian Menuju Kutai Timur Mandiri”.
4. Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Visi Tahun 2019 – 2023: “Mewujudkan Swasembada dan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan Menuju Masyarakat

Penajam Paser Utara Yang Sejahtera, Berkualitas dan Berdaya Saing”.

5. Dinas Pertanian Kota Samarinda dengan Visi Tahun 2016–2021: "Terwujudnya Pertanian Maju, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan"
  6. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan dengan Visi Tahun 2016 – 2021: “Terwujudnya Ketersediaan Pangan dan Kesejahteraan Petani dan Nelayan Melalui Pemanfaatan Sumber Petanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang Seinergis dan Berkelanjutan”.
  7. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat dengan Visi Tahun 2016–2021: “Terwujudnya Optimalisasi Potensi Pertanian dan Perikanan Meningkatkan Kesejahteraan Petani”.
  8. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2016–2021: 1) Meningkatkan pemenuh kebutuhan pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal, 2) Menigkatkan kinerja perikanan tangkap dan bududaya serta nilai tambah industri perikanan, 3) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan.
  9. Dinas Pertanian Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 adalah “Terwujudnya Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Yang Tangguh Berwawasan Agribisnis”.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Pembangunan Pertanian yang terarah, berkesinambungan didasarkan pada keunggulan kompetitif wilayah dan kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi kerakyatan”.



B. Keterkaitan Koordinasi dan Sinergi Program Perangkat Daerah Provinsi dan Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat

Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan jangka panjang dirumuskan sebagai berikut:” Terwujudnya peternakan indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern”. Untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan
2. Meningkatkan ketersediaan pakan yang berkualitas secara berkelanjutan
3. Mewujudkan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan keamanan dan mutu produk hewan serta kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan usaha peternakan, pengolahan dan pemasaran produk peternakan berdaya saing
6. Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menuju birokrasi professional dan modern

Pernyataan visi dan misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI memberikan arahan bagi seluruh daerah (Provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Menyelenggarakan dan menggerakkan pengembangan perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, serta kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen dalam mencapai penyediaan dan keamanan pangan hewani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak
2. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan

C. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan mendesak dalam pengembangan peternakan dan Kesehatan Hewan di Kalimantan Timur, adalah sebagai berikut:

1. Populasi dan produktivitas ternak rendah
2. Produksi dan produktivitas hijauan pakan ternak masih rendah.
3. Daya saing produk peternakan masih rendah
4. Kawasan peternakan belum optimal
5. Kaltim belum bebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
6. Jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan belum optimal
7. Peran swasta dan usaha peternakan rakyat belum optimal
8. Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Peternak masih rendah

Hambatan yang dihadapi dalam pengembangan peternakan dan kesehatan hewan di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Populasi dan produktivitas ternak masih rendah
2. Pemasaran hasil bibit dan benih belum optimal
3. Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular (PHM) belum maksimal



4. Pelayanan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner belum optimal
5. Produk lokal daging sapi dan telur masih rendah

D. Tantangan dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah  
Memperhatikan kondisi pembangunan peternakan baik secara nasional maupun wilayah Provinsi Kalimantan Timur saat ini dan hasil yang ingin dicapai hingga tahun 2023, maka banyak tantangan yang dihadapi dan akan berpengaruh pada kinerja pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kurun waktu 2019 – 2023.

1. Tantangan Internal

Tantangan internal merupakan faktor potensial yang ada di dalam intern Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang belum secara optimal diberdayakan dalam pembangunan peternakan.

a. Sumber Daya Manusia

Dalam kurun waktu 2011-2019 tidak ada pengangkatan PNS baik teknis maupun Non Teknis sehingga tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan oleh PPBASN. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur merupakan dinas teknis yang mempunyai tanggung jawab bidang teknis peternakan dan kesehatan hewan maka memerlukan tenaga teknis yang lebih banyak dibandingkan dengan tenaga non teknis. Untuk itu, perlu pemberdayaan tenaga non teknis dengan melalui bimbingan teknis, pelatihan/magang teknis peternakan dan kesehatan hewan, sehingga memiliki dasar pemahaman tentang pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

b. Prasarana dan Sarana

Secara umum, prasarana dan sarana perkantoran sudah memadai namun untuk prasarana dan sarana pelayanan di lokasi khususnya padat ternak masih sangat minim seperti check point, pasar hewan, depo obat hewan dan alat mesin peternakan. Perkembangan informasi elektronik sangat pesat sehingga kecepatan, ketepatan dan keterbukaan semakin dituntut oleh masyarakat. Publikasi saat ini harus mengikuti perkembangan dan informasi yang transparan dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama dengan media elektronik serta prasarana dan sarana elektronik seperti website, baliho, leaflet, spanduk perlu ditingkatkan agar penyampaian informasi mengenai peternakan dan kesehatan hewan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Peran serta masyarakat akan semakin meningkat dengan adanya media publikasi tersebut di dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan

c. Koordinasi dengan instansi/lembaga terkait

Keterkaitan/keterpaduan dan sinergisitas antar instansi/lembaga terkait baik di Pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota perlu ditingkatkan agar keterpaduan program dan kegiatan peternakan berjalan efektif dan efisien. Sebagai contoh dalam pengembangan kawasan peternakan yang berbasis komoditas ternak dapat terintegrasi dengan sektor lainnya seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, industri pengolahan hasil dan lahan eks tambang



d. Konsistensi penganggaran

Rencana kerja yang telah disusun sudah memuat rencana kebutuhan pendanaan dalam satu tahun namun dalam implementasinya tidak secara konsisten dengan penganggaran tersebut sehingga target kinerja tidak tercapai, hal ini sangat tergantung dengan kondisi keuangan daerah.

2. Tantangan Eksternal

- a. Sumber pembiayaan selain belanja APBD dan APBN seperti Kredit Program (KKPE, KUPS), CSR, Kredit Ternak Sejahtera (KTS) dan penjaminan usaha peternakan sapi melalui AUTS belum secara optimal dapat diakses oleh peternak. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memecahkan permasalahan permodalan khususnya agunan yang harus dimiliki oleh peternak maka telah dibentuk lembaga penjaminan. Namun belum semua peternak memahami adanya lembaga penjaminan sehingga ke depan perlu sosialisasi mengenai pola penjaminan, disamping itu sifat kehati-hatian pihak perbankan masih menjadi Persyaratan utama sehingga agunan tetap harus dipenuhi.
- b. Keterlibatan peran swasta terutama perusahaan sawit dan perusahaan tambang terhadap pengembangan usaha peternakan masih rendah, sehingga pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang komitmen perusahaan terhadap pengembangan peternakan sapi potong belum optimal.
- c. Pemotongan betina produktif khususnya sapi/kerbau lokal masih cukup tinggi. Hal ini merupakan suatu kerugian bagi peternak karena yang seharusnya dapat memberikan

keuntungan dengan bertambahnya populasi namun harus dipotong. Oleh karena itu pengawasan dan penindakan tentang larangan pemotongan betina produktif perlu ditingkatkan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.

- d. Semakin meningkatnya lalu lintas ternak maupun produk peternakan akan semakin besar ancaman penyakit hewan strategis yang berdampak tinggi pada ekonomi. Kewaspadaan terhadap penyakit harus ditingkatkan karena Kaltim bebas Brucellosis, anthrax, Penyakit mulut dan kuku
- e. Pemanfaatan sumber daya pakan ternak yang tersedia belum optimal, maka perlu peningkatan dan pemahaman pengelolaan pakan secara baik dan benar dengan didukung teknologi tepat guna yang bisa meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha peternakan rakyat

#### E. Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan bahan pangan asal ternak yang ASUH maka peluang usaha di bidang peternakan juga semakin meningkat.

##### 1. Meningkatnya Konsumsi Daging dan Telur

Konsumsi daging berkembang dengan pesat yang disebabkan oleh pertambahan penduduk, peningkatan pendapatan, kesadaran gizi serta pola hidup sehat. Struktur konsumsi daging jika dilihat atas jenis daging yang dikonsumsi maka dapat dilihat pada tabel berikut





Tabel 2.12 Struktur Konsumsi Daging Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 – 2021 (dalam ton)

No.	Kab / Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	S a p i	9.393,51	10.961,24	12.444,65	10.694,27	9.926,90
2	K e r b a u	295,16	1.360,47	1.667,58	2.391,48	3.346,89
3	Kuda	1,46	0,18	0,63	1,81	1,36
4	Kambing	637,88	745,89	693,59	826,10	877,53
5	Domba	12,10	8,32	11,07	36,25	15,32
6	Babi	883,23	1.400,94	1.803,70	1.830,40	2.302,49
7	Ayam Buras	5.690,21	4.798,66	4.592,02	4.657,96	4.720,67
8	Ayam Petelur	352,42	452,21	365,77	522,29	629,19
9	Ayam Pedaging	61.706,02	63.028,77	69.243,31	60.372,41	65.702,56
10	I t i k	263,21	392,71	499,28	644,86	115,38
11	Kelinci	6,68	6,32	3,95	4,82	4,21
12	Puyuh	4,39	6,76	6,19	7,48	8,92
13	Merpati	1,09	1,05	1,25	1,31	1,40
14	Itik Manila	22,53	26,87	26,89	33,12	40,24
<b>Jumlah</b>		<b>79.324,00</b>	<b>83.190,37</b>	<b>91.362,30</b>	<b>82.024,57</b>	<b>87.693,07</b>

Sumber: Statistik Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022

Berdasarkan data konsumsi maka konsumsi daging hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2020 konsumsi daging mencapai 82.024,57 ton dan konsumsi daging tahun 2021 menjadi 87.693,07 ton. Struktur konsumsi daging terbesar pada 5 tahun terakhir mencapai 69.243,31 ton adalah ayam pedaging. Prestasi yang telah diraih bahwa seluruh kebutuhan konsumsi ayam pedaging broiler telah dipenuhi dari produksi lokal Kaltim. Saat ini perkembangan ternak ayam ras broiler



sudah sepenuhnya ditangani swasta, pemerintah hanya sebagai regulator saja.

Konsumsi daging sapi mulai tahun 2017-2019 mengalami peningkatan disetiap tahunnya dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2018 konsumsi daging sapi di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 10.961,24 ton dibandingkan dengan tahun 2017 konsumsi daging sapi di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 9.393,51 ton. Apabila dibanding dengan tahun 2017 terdapat peningkatan sebesar 16,68% dan kembali meningkat di tahun 2019 menjadi 12.444,65 ton atau peningkatan sebesar 11,9%. Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan konsumsi daging sapi menjadi 10.694,27 dan 9.926,90 ton hal ini dikarenakan pandemic covid-19 yang menyebabkan turunya permintaan akan daging sapi.

Tabel 2.13 Struktur Konsumsi Telur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017– 2021 (dalam ton)

No.	Jenis Telur	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ayam Buras	1.735,14	1.463,28	1.400,27	1.420,37	1.542,32
2	Ayam Petelur	19.028,65	20.565,12	18.719,52	20.684,60	23.242,92
3	I t i k	1.072,28	1.216,53	1.244,41	1.253,33	1.276,56
4	Puyuh	31,78	40,75	40,27	50,98	57,74
5	Itik Manila	175,58	209,37	209,56	258,10	313,58
Jumlah		22.043,43	23.495,05	21.614,04	23.667,39	26.433,11

Sumber: Statistik Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022

Struktur konsumsi telur pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 jumlah konsumsi telur mencapai 22.043,43 ton. Pada tahun 2018 konsumsi telur naik signifikan atau mencapai 23.495,05 ton. Pada tahun 2019 konsumsi telur mengalami penurunan menjadi 21.614,04 ton. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 sampai

2018 mengalami kenaikan adapun kenaikannya adalah 2017 ke 2018 sebesar 6,58% dan turun pada tahun 2019 dan mengalami kenaikan Kembali pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 23.667,39 ton dan 26.4333,11 ton

2. Daya Tampung Ternak Masih Tinggi

Melalui Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) akan melakukan kajian untuk pengembangan sapi pada lahan bekas tambang sehingga Kaltim diharapkan menjadi salah satu lumbung sapi nasional. Populasi sapi potong yang dikembangkan pada lahan perkebunan sawit sampai sekarang diperkirakan sebanyak 31.955 ekor yang tersebar pada 8 Kabupaten/Kota sedangkan yang dipelihara/dikembangkan pada lahan bekas tambang sampai saat ini sekitar 6.839 ekor yang tersebar pada 7 Kabupaten/kota. Sehingga dari populasi sapi potong di lahan perkebunan sawit dan lahan ex tambang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi mini ranch.

3. Data Perkembangan populasi ternak berdasarkan jenis

Data populasi ternak mulai tahun 2017-2021 tercatat naik dengan rasio 0,28% untuk Sapi, 4,52% untuk kambing, 19,10 untuk domba, 1,61 % untuk Kuda, 7,61% untuk ayam, puyuh 13,60%, itik sebesar 3,14% dan itik manila 6,64%, disamping kenaikan beberapa jenis ternak juga mengalami penurunan seperti Babi -0,82%, sapi perah -3,22%, kerbau -1,94%, ayam buras -3,73%, kelinci -7,38% dan puyuh 13,60% perkembangan populasi ternak bisa dilihat pada tabel dibawa ini.



Tabel 2.14 Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017-2021

No	Jenis Ternak	2017	2018	2019	2020	2021*	r (%)
1	Sapi	119.123	117.504	119.485	119.974	120.446	<b>0,28</b>
2	Sapi Perah	107	110	91	87	94	<b>-3,22</b>
3	Kerbau	7.055	6.157	6.194	6.552	6.552	<b>-1,94</b>
4	Kambing	61.526	66.378	67.892	69.929	73.426	<b>4,52</b>
5	Domba	281	439	590	635	565	<b>19,10</b>
6	Babi	85.749	78.968	82.546	83.652	82.980	<b>-0,82</b>
7	Kuda	91	97	102	95	97	<b>1,61</b>
8	Ayam Buras	5.418.086	4.569.169	4.372.415	4.435.205	4.654.618	<b>-3,73</b>
9	Ayam Petelur	822.533	1.702.178	853.693	1.218.994	1.102.995	<b>7,61</b>
10	Ayam Pedaging	66.268.201	62.310.692	67.886.566	59.402.832	63.971.068	<b>-0,88</b>
11	Itik	219.149	248.978	254.683	254.749	247.956	<b>3,14</b>
12	Kelinci	15.005	14.189	8.859	10.830	11.044	<b>-7,38</b>
13	Puyuh	46.693	66.593	65.808	79.222	77.753	<b>13,60</b>
14	Merpati	4.163	4.027	4.776	5.015	4.573	<b>2,38</b>
15	Itik Manila	35.834	42.851	42.890	52.823	46.480	<b>6,64</b>

Keterangan: \* = Angka Sementara  
Sumber: Statistik Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021

4. Berkembangnya teknologi peternakan tepat guna
- Perkembangan teknologi peternakan tepat guna di Provinsi Kalimantan Timur sangat baik. Teknologi peternakan tepat guna di Kalimantan Timur adalah Biogas. Pada tahun 2016-2020 jumlah instalasi biogas yang dibangun dan dimanfaatkan masyarakat yaitu 128;0;0;25;20 unit.

F. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Prioritas pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang tertuang dalam pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam fokus

pembangunan dengan strategi peningkatan produksi pangan asal ternak, dan arah kebijakan yang terdiri dari Peningkatan Produksi Ternak Berkualitas dan Pengembangan Kawasan Peternakan. Berikut Penjabaran Program Prioritas Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam sasaran dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2023:

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)
Prioritas Pembangunan 2								
Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan								
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB	%	0,37	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Miniranch yang teregister	30 Unit	5.101.388.000
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	22%	18.312.386.146

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah

Program-program prioritas Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Perizinan Usaha Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian Program yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan OPD dan telah terakomodasi dalam Rancangan Akhir RKPD tahun 2023.



Tabel 2.15 Review Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023  
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF
02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					62.000.000.000	02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					69.247.388.646
02.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					50.078.609.880	02.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					60.684.514.408
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	%	82		30.278.609.880	3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	%	82		26.728.525.290
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	79,30		1.950.000.000	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	79,30		1.676.326.000
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	smd, ppu, ktr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	1.000.000.000	3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	smd	888.000.000
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	smd, ppu, ktr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	950.000.000	3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	smd	790.326.000
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80		20.412.979.880	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80		17.428.333.344
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	83	smd dan ppu	19.628.609.880	3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	83	smd dan ppu	16.558.363.344
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	smd	715.970.000	3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	smd	628.000.000
3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1		68.400.000	3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	smd	241.970.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	80		488.581.000	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	80		412.038.000
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	5	smd	269.801.000	3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	smd	184.720.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	18	smd dan luarProv	218.780.000	3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	smd dan luarProv	227.318.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%	80		2.073.017.854	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%	80		1.899.033.500
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	smd	19.799.634	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	smd	23.465.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	smd	514.599.000	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	50	smd	448.770.000
3.27.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	smd	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	35	smd	141.759.200	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	smd	136.210.500
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3840	smd	15.360.000	3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3840	smd	17.280.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	170	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, per, brn, mahu dan luarProv	1.376.500.020	3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, per, brn, mahu dan luarProv	1.273.308.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		1.555.948.000	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		930.394.000
3.27.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	smd	1.368.800.000	-	-	-	-	-	-	-
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	smd	127.048.000	3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	smd	930.394.000
3.27.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	7	smd	60.100.000	-	-	-	-	-	-	-
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		2.301.595.726	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		3.230.131.172
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	smd	103.458.219	3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	smd	115.625.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	smd	252.710.035	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	smd	355.040.300
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	smd	1.945.427.472	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	smd	2.759.465.872



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		1.486.487.420	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		1.152.288.274 #
3.27.01.1.09.02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	63	smd	34.212.000	3.27.01.1.09.02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	63	smd	41.500.000
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	88	smd	274.145.000	3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	177	smd	418.433.000
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	smd	1.101.947.920	3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	smd	692.336.274
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	smd	86.182.500							
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	%	22		8.750.000.000	3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	%	22		22.788.183.396
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	unit usaha	76		1.650.000.000	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	unit usaha	76		1.335.998.600
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Asinitan dan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Asinitan dan Sarana Pertanian	Laporan	2	smd, ppu, kim, kkr, kbr, bgt, bpn, psr, bru, mahu dan luarProv	700.000.000	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Asinitan dan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Asinitan dan Sarana Pertanian	Laporan	2	bru, kkr, kbr, kim, bpn, bgt, smd, ppu	545.000.000
3.27.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	1	smd, ppu, kim, kkr, kbr, bgt, bpn, psr, bru, mahu dan luarProv	950.000.000	3.27.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	1	bru, kkr, kbr, kim, psr, bpn, bgt, smd, ppu	790.998.600
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Calving Interval	Bulan	16,5		2.500.000.000	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Calving Interval	Bulan	16,5		2.045.616.500
3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	smd, ppu, kim, kkr, kbr, bgt, bpn, psr, bru, mahu dan luarProv	1.200.000.000	3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	bru, kkr, kbr, psr, dan ppu	1.105.000.000
3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	2	smd, ppu, kim, kkr, kbr, bgt, bpn, psr, bru, mahu dan luarProv	950.000.000	3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	2	bru, kkr, kbr, kim, psr, bpn, bgt, smd, ppu	629.570.000
3.27.02.1.04.03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Orang	20	smd, ppu, kim, kkr, kbr, bgt, bpn, psr, bru, mahu dan luarProv	350.000.000	3.27.02.1.04.03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Orang	20	bpn dan smd	311.046.500



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023													
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN													
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	sampel	40		800.000.000	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	sampel	40		419.650.000
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	1	smd, pou, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	400.000.000	3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	1	bru, kkr, ktm, psr, bpn, bg, smd, pou, mahulu	179.480.000
3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan yang Beredar	Ton	100.000	smd, pou, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	400.000.000	3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	Ton	100.000	smd, pou, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, dan mahulu	240.170.000
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	Sampel	13		600.000.000	3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	Sampel	13		685.532.150
3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	2	smd, pou, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	450.000.000	3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	2	smd, pou, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, dan mahulu	405.909.150
3.27.02.1.06.02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	Kasus	165	smd, pou, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	150.000.000	3.27.02.1.06.02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	Kasus	165	smd, pou, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, dan mahulu	278.623.000
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah kelompok penerima ternak	Kelompok	10		3.200.000.000	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah kelompok penerima ternak	Kelompok	10		18.312.386.146
3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	200	smd, pou, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	3.200.000.000	3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	1359	smd, pou, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, dan mahulu	18.312.386.146
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Miniranch yang teregister	Unit	30		5.200.000.000	3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Miniranch yang teregister	Unit	30		5.101.338.000
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	Unit	30		5.200.000.000	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	Unit	30		5.101.338.000
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	smd, pou, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	5.200.000.000	3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	smd, pou, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, dan mahulu	5.101.338.000



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023													
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	%	70		3.250.000.000	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	%	70		3.770.804.950
		Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	%	14					Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	%	14		
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI	Kab/Kota	10		900.000.000	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI	Kab/Kota	10		1.176.987.500
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	400.000.000	3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, dan mahulu	730.096.000
3.27.04.1.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	300.000.000	3.27.04.1.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, dan mahulu	244.804.000
3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	200.000.000	3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, dan mahulu	202.067.500
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemusukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	Checkpoint	3		1.350.000.000	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemusukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	Checkpoint	3		1.572.837.450
3.27.04.1.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	150.000.000	3.27.04.1.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, dan mahulu	198.100.000
3.27.04.1.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemusukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemusukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	200.000.000	3.27.04.1.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemusukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemusukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, dan mahulu	684.653.450
3.27.04.1.02.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	1.000.000.000	3.27.04.1.02.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, dan mahulu	689.884.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023													HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF				
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Unit usaha	2		600.000.000	3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Unit usaha	2		371.000.000				
3.27.04.1.04.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Sertifikat	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	600.000.000	3.27.04.1.04.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Sertifikat	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, dan bru	371.000.000				
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan	Unit usaha	11		400.000.000	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan	Unit usaha	11		650.000.000				
3.27.04.1.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Kasus	750	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	400.000.000	3.27.04.1.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Kasus	750	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, dan bru	650.000.000				
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha	%	75		1.200.000.000	3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha	%	75		1.131.862.772				
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan	Unit usaha	35		800.000.000	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan	Unit usaha	35		873.999.900				
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	800.000.000	3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, dan bru	873.999.900				
3.27.06.1.03	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan	Rekomendasi	2		400.000.000	3.27.06.1.03	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan	Rekomendasi	2		257.862.872				
3.27.06.1.03.01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	300.000.000	3.27.06.1.03.01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Laporan	2	bru, kkr, kbr, ktm, dan psr	139.720.000				
3.27.06.1.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer obat hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	100.000.000	3.27.06.1.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer obat hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, dan bru	118.142.872				



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023							RANCANGAN RENCANA KERJA 2023						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Binaan Kelompok Ternak	%	45		1.400.000.000	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Binaan Kelompok Ternak	%	45		1.153.000.000
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyebaran informasi peternakan	Kali	12		800.000.000	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyebaran informasi peternakan	Kali	12		600.000.000
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	4	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, brn, mahu dan luarProv	800.000.000	3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	4	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, brn, dan mahu	600.000.000
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi	Kelompok	25		600.000.000	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi	Kelompok	25		553.000.000
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Korporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, brn, mahu dan luarProv	600.000.000	3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Korporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, brn, dan mahu	553.000.000
02.00	UPTD. PEMBIBITAN TERNAK DAN HJAUAN PAKAN TERNAK						02.00	UPTD. PEMBIBITAN TERNAK DAN HJAUAN PAKAN TERNAK					
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap urusan bidang peternakan	%	82		3.520.000.000	3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap urusan bidang peternakan	%	82		3.539.000.000
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80		125.760.000	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80		115.080.000
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	ppu	125.760.000	3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	ppu	115.080.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	%	80		259.850.000	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	%	80		75.500.000
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	5	ppu	77.000.000	3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	ppu	22.500.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	23	ppu	182.850.000	3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	ppu	53.000.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	%	80		816.436.488	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	%	80		389.302.200
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	ppu	12.861.488	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	ppu	19.810.200
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	ppu	508.735.000	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11	ppu	10.682.000
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30	ppu	3.000.000	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30	ppu	10.738.000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	156	ppu	3.840.000	3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	156	ppu	5.760.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, brn, mahu dan luarProv	288.000.000	3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, brn, mahu dan luarProv	342.312.000



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023													
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		67.900.000	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		856.688.000
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	ppu	67.900.000	3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	ppu	856.688.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		1.534.984.732	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		1.877.050.510
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	ppu	18.267.768	3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	ppu	28.530.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	ppu	126.338.000	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	ppu	97.949.070
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	ppu	1.390.378.944	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	ppu	1.550.571.440
3.27.01.1.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		715.068.780	3.27.01.1.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		275.951.280
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	16	ppu	12.000.000	3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	19	ppu	12.590.000
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	ppu	139.798.780	3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	56	ppu	206.017.400
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	ppu	563.270.000	3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	ppu	57.343.880
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	%	22		1.700.000.000	3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	%	22		1.666.000.000
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Populasi ternak sapi bibit	Ekor	80		1.700.000.000	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Populasi ternak sapi bibit	Ekor	80		1.566.000.000
3.27.02.1.03.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Produksi HPT (Segar)	Ton / Tahun	825		700.000.000	3.27.02.1.03.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Produksi HPT (Segar)	Ton	825		
3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	12	smd, ppu, luarProv	1.000.000.000	3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	12	smd, ppu, luarProv	921.000.000



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF
02.00	UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					6.701.390.120	02.00	UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					3.457.884.248
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap urusan bidang peternakan	%	82		5.101.390.120	3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap urusan bidang peternakan	%	82		1.987.884.248
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80		110.000.000	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80		119.640.000
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	smd	110.000.000	3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	smd	119.640.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	80		86.000.000	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	80		11.430.000
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	smd	20.000.000				-	-		
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	Orang	10	smd	66.000.000	3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	Orang	1	smd	11.430.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	%	80		472.000.000	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	%	80		355.989.000
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	smd	7.000.000	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	smd	3.715.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	smd	40.000.000	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	smd	67.654.000
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30	smd	25.000.000	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	smd	18.038.000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	24	smd	5.000.000	3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	24	smd	3.840.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	51	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	325.000.000	3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	207.792.000
3.27.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	smd	70.000.000	3.27.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	smd	54.950.000



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023													
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		3.341.390.120	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		482.192.000
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	smd	400.000.000	3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	smd	392.504.000
3.27.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	smd	2.941.390.120	3.27.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor UPTD, LKK	Dokumen	1	smd	99.688.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		955.000.000	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		899.833.748
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	smd	25.000.000	3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	smd	26.540.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	smd	180.000.000	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	smd	162.023.548
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	smd	750.000.000	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	smd	711.070.200
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		137.000.000	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		108.999.500
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	smd	7.000.000	3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	smd	7.000.000
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	62	smd	130.000.000	3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	36	smd	101.999.500
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	%	70		1.800.000.000	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	%	70		1.470.000.000
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan	%	14			3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	%	14		
3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit	4	smd, ppu, km, kkr, kbr, bg, bpn, psr, brn, mahulu dan luarProv	800.000.000	3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit	4	smd, ppu, km, kkr, kbr, bg, bpn, psr, brn, mahulu dan luarProv	737.000.000
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sertifikat hasil uji	262	Sertifikat			3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	105	smd, ppu, km, kkr, kbr, bg, bpn, psr, brn, mahulu dan luarProv	733.000.000



## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat khususnya peternak disampaikan ke Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan se-Kabupaten/Kota, yang langsung ditujukan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim melalui Rapat Konsultasi dan Koordinasi Teknis Daerah (Rakontekda) dan Musrenbang kabupaten/kota. Usulan-usulan tersebut diseleksi sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim. Selanjutnya usulan tersebut disampaikan pada Musrenbang Provinsi. Setelah mendapat pagu dana indikatif Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim tetap berkoordinasi dengan Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan se-Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan usulan tersebut.

TABEL 2.16  
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	Pengembangan Kawasan Peternakan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengembangan Mini Ranch	8 Unit	
2	Pengembangan Kawasan Peternakan	Kabupaten Berau	Pengembangan Mini Ranch	2 Unit	
3	Pengembangan Kawasan Peternakan	Kabupaten Penajam Paser Utara	Pengembangan Mini Ranch	1 Unit	
4	Penyediaan Benih/Bibit Ternak sapi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengadaan Sapi	45 Ekor	
5	Penyediaan Benih/Bibit Ternak sapi	Kabupaten Berau	Pengadaan Sapi	28 Ekor	
6	Penyediaan Benih/Bibit Ternak sapi	Kabupaten Kutai Timur	Pengadaan Sapi	28 Ekor	
7	Penyediaan Hijauan Pakan Ternak	Kabupaten Kutai Barat	Pengadaan Bibit Hijauan Pakan Ternak	2 Ha	
8	Permohonan Bantuan Ternak Sapi (Kelompok Tani "Karya Mandiri").	Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Rekomendasi Berasal Dari Kantor Lurah, Kantor Camat, BPP. Kec. Tenggarong, Belum Ada Rekom PPL Setempat, Belum Ada Rekom Dinas Pertanian dan Peternakan Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota Namun Belum Memiliki Nomor Register
9	Permohonan Bantuan Ternak Sapi (Kelompok Tani "Pulau Sakkan").	Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Rekomendasi Berasal Dari Kepala Desa, Kantor Camat, UPT. Penyuluh Pertanian dan Peternakan Kec. Kenohan, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. Kenohan, Belum Ada Rekom Dinas Pertanian dan Peternakan Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
10	Permohonan Bantuan Ternak Sapi Bali dan Pembuatan Kandang Serta Penanaman HPT (Kelompok Tani "Kerukunan Keluarga Besar Makassar (KKBM)").	Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Rekomendasi Berasal Dari Kepala Desa, Kantor Camat, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. Marangkayu, Belum Ada Rekom Dinas Pertanian dan Peternakan Kab/Kota, Terdaftar SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota Namun Belum Memiliki Nomor Register
11	Permohonan Bantuan Ternak Bebek dan Pakan (Kelompok Tani "Suka Maju")	Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Rekomendasi Berasal Dari Kantor Desa, Belum Ada Rekom PPL Setempat, Belum Ada Rekom Dinas Pertanian dan Peternakan Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota Namun Belum Memiliki Nomor Register



NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
12	Permohonan Bantuan Sapi Bali (Kelompok Tani "Sumber Rejeki II").	Kabupaten Kutai Timur	-	-	Rekomendasi Berasal Dari Kepala Desa, Ketua Rt, Kantor Camat, UPT. Puskesmas Kongbeng, UPT. P4 Kec. Kongbeng, Rekom PPL Setempat, Belum Ada Rekom Dinas Pertanian dan Peternakan Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
13	Permohonan Bantuan Sapi Bali (Kelompok Tani "Karya Mukti").	Kabupaten Kutai Timur	-	-	Rekomendasi Berasal Dari Kepala Desa, Kantor Camat, UPT. P4 Kec. Kongbeng, Rekom PPL Setempat, Akta Notaris, Belum Ada Rekom Dinas Pertanian dan Peternakan Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
14	Permohonan Bantuan Ternak Sapi (Kegiatan Desa Korporasi Sapi). Kelompok Tani "Mataram	Kabupaten Kutai Timur	-	-	Rekomendasi Berasal Dari Kepala Desa, Kantor Camat, UPT. P4 Kec. Muara Wahau, Akta Notaris, Belum Ada Rekom Dinas Pertanian dan Peternakan Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
15	Permohonan Bantuan Ternak Sapi (Kegiatan Desa Korporasi Sapi). Kelompok Tani "Karya Baru"	Kabupaten Kutai Timur	-	-	Rekomendasi Berasal Dari Kepala Desa, Kantor Camat, UPT. P4 Kec. Muara Wahau, Akta Notaris, Belum Ada Rekom Dinas Pertanian dan Peternakan Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
16	Permohonan Bantuan Ternak Sapi (Kegiatan Desa Korporasi Sapi). Kelompok Tani "Karya Bhakti Sejahtera"	Kabupaten Kutai Timur	-	-	Rekomendasi Berasal Dari Kepala Desa, Kantor Camat, UPT. P4 Kec. Muara Wahau, Rekom PPL Setempat, Akta Notaris, Belum Ada Rekom Dinas Pertanian dan Peternakan Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
17	Permohonan Bantuan Ternak Sapi (Kegiatan Desa Korporasi Sapi). Kelompok Tani "Suka Maju"	Kabupaten Kutai Timur	-	-	Rekomendasi Berasal Dari Ketua Rt, Kepala Desa, Kantor Camat, UPT. P4 Kec. Muara Wahau, Rekom PPL Setempat, Akta Notaris, Belum Ada Rekom Dinas Pertanian dan Peternakan Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota

TABEL 2.17  
DAFTAR USULAN LANGSUNG (ASPIRASI) KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

NO	KODE USULAN	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Nama Kelompok	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal
1	62535f0158bb3	11-04-2022	BAPPEDA Kab. Kutai Barat	Bappeda Kab/Kota	Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi	Bantuan Bibit Sapi dan Sarana Prasarana Peternakan	Radak Sangokng	Muara Tae, Kab. Kutai Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	Provinsi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	62535f91b87e4	11-04-2022	BAPPEDA Kab. Kutai Barat	Bappeda Kab/Kota	Pertanian	Pengadaan Sapi	Bantuan Ternak Sapi Bali	Puti Jaya	Kampung Engkuni Pasek, Kab. Kutai Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	Provinsi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	6253bb65e09c2	11-04-2022	BAPPEDA Kab. Kutai Barat	Bappeda Kab/Kota	Pertanian	Pengadaan Sapi	Bantuan Ternak Sapi	Bina Warga	Jerang Melayu, Kab. Kutai Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	Provinsi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4	6253c7b76cb3b	11-04-2022	BAPPEDA Kab. Kutai Kartanegara	Bappeda Kab/Kota	Pertanian	Pengadaan Sapi	Dalam Rangka Mendukung swasembada daging (protein hewani), berbasis Pengembangan Berbasis Kawasan peternakan melalui integrasi sapi dan sawit, teknologi sumber daya genetik dan breeding (perbibitan) guna mendukung IKN.	KT. Pelita	Tenggarong Seberang (Desa Bukit Pariaman, desa kertabuana), Loa Janan (Desa Batuah, desa tani bakti), tenggarong desa loa tebu, samboja kelurahan wonotirto, kota bangun desa SP2, Loa kulu desa jonggon,, Kab. Kutai Kartanegara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	Provinsi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5	6253c7e42145b	11-04-2022	BAPPEDA Kab. Kutai Kartanegara	Bappeda Kab/Kota	Pertanian	Pembangunan Miniranch	Dalam Rangka Mendukung swasembada daging (protein hewani), berbasis Pengembangan Berbasis Kawasan peternakan melalui integrasi sapi dan sawit, teknologi sumber daya genetik dan breeding (perbibitan) guna mendukung IKN.		Tenggarong Seberang (Desa Bukit Pariaman, desa kertabuana), Loa Janan (Desa Batuah, desa tani bakti), tenggarong desa loa tebu, samboja kelurahan wonotirto, kota bangun desa SP2, Loa kulu desa jonggon,, Kab. Kutai Kartanegara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	Provinsi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	62553f24032d8	12-04-2022	BAPPEDA Kab. Berau	Bappeda Kab/Kota	Pertanian	Pengadaan Sapi	pengadaan sapi yg gagal di tahun 2021 (BANKEU)	Usaha bersama	Kamp. Melati Jaya, Labanan Jaya dan Limunjan, Kab. Berau	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	Provinsi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan



TABEL 2.18  
DAFTAR USULAN RESES (POKIR) TAHUN 2023

No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal
1	RS6241fadfa53fb 29-03-2022	Herliana Yanti	PDI-P	Pertanian	Pengadaan Sapi	Kelompok tani KARYA TAKA sangat membutuhkan bantuan ternak sapi guna meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat	Desa Modang, Kab. Paser	Kuaro	Modang	25 ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	RS6242041377db9 29-03-2022	Herliana Yanti	PDI-P	Pertanian	Pengadaan Sapi	Kelompok Tani BERKAH TIRTA MUTIARA Sangat membutuhkan bantuan sapi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani kami adapun domisili kelompok tani kami di Desa Muara adang II Kec.Longkali	Jl.Poros Trans Rt.003, Kab. Paser	Long Kali	Muara Adang II	25 ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	RS62446c45257a3 30-03-2022	Salehuddin , S.Sos, S.Fil	Golkar	Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi	Bibit Sapi belum tersedia untuk Bantuan Kelompok Ternak Sapi Pepadaan Etam Maju Desa Sebelimbing	Jalan Mulawarman RT 01, Kab. Kutai Kartanegara	Kota Bangun	Sebelimbing	30 ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4	RS624478578c75b 30-03-2022	Herliana Yanti	PDI-P	Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi	Kelompok tani KARYA MAJU I yang berdomisili di desa makmur jaya saat ini sangat membutuhkan bantuan bibit ternak sapi guna menambah dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani KARYA MAJU I	Jl.Sriwijaya Rt.12, Kab. Paser	Long Kali	Makmur Jaya	25 ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5	RS624e7170b977a 07-04-2022	Marthinus, S.T, M.Si	PDI-P	Pertanian	Pengadaan Sapi	Pemohonan Pengadaan Ternak Sapi Bali Kelompok Tani Bumi Hijua	Kampung Long Iram Kota, Kab. Kutai Barat	Long Iram	Long Iram Kota	25 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	RS624ee3fc8fb9c 07-04-2022	Salehuddin , S.Sos, S.Fil	Golkar	Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi	Bantuan Bibit Ternak Kambing Kelompok Ternak Mitra Usaha Sejahtera	Jalan Bpp Handil II RT 11, Kab. Kutai Kartanegara	Samboja	Margomulyo	50 ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal
7	RS624f9e8c0f927 08-04-2022	Sukmawati	PAN	Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi	Kelompok Tani Ternak Suka Senang Membutuhkan Bantuan Ternak Sapi	Dusun Sumber Makmur RT.03, Kab. Paser	Long Ikis	Krayan Jaya	31 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
8	RS624fa1b4e850f 08-04-2022	Sukmawati	PAN	Pertanian	Pengadaan Sapi	Kelompok Tani Ternak Karya Bersama Membutuhkan Bantuan Ternak Sapi	Dusun Sumber Makmur RT.03, Kab. Paser	Long Ikis	Krayan Jaya	31 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
9	RS624faf33bf621 08-04-2022	Sukmawati	PAN	Pertanian	Pengadaan Sapi	Kelompok Ternak Taruna Muda Desa Klempang Sari Membutuhkan Bantuan Ternak Sapi	Jalan Garuda RT.01, Kab. Paser	Kuaro	Klempang Sari	35 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
10	RS624fc8fbd2fc6 08-04-2022	Sukmawati	PAN	Pertanian	Pengadaan Sapi	Kelompok Tani Anugrah Desa Rangan Kecamatan Kuaro Membutuhkan Bantuan pengadaan Ternak Sapi	Jalan Jambu RT.07, Kab. Paser	Kuaro	Rangan	17 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
11	RS624fcbd09176d 08-04-2022	Sukmawati	PAN	Pertanian	Pengadaan Sapi	Kelompok Tani Daya V Desa Jemparing Membutuhkan Bantuan Ternak Sapi	Desa Jemparing RT.02, Kab. Paser	Seluruh Kecamatan	Jemparing	15 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
12	RS624fcd41b306b 08-04-2022	Sukmawati	PAN	Pertanian	Pengadaan Sapi	Kelompok Tani Meto Bolum Desa Jemparing Membutuhkan Bantuan Ternak Sapi Bali	Desa Jemparing RT.03, Kab. Paser	Long Ikis	Jemparing	16 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan



No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal
13	08-04-2022	Sukmawati	PAN	Pertanian	Pengadaan Sapi	<b>Kelompok Tani Mekar Jaya</b> Membutuhkan bantuan ternak sapi bali untuk meningkatkan usaha peternakan dan kesejahteraan anggota kelompok peternak sapi	Desa Modang RT.06, Kab. Paser	Kuaro	Modang	24 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
14	10-04-2022	Ismail, S.T	Dekoratif-Nasdem	Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi	Permohonan Bantuan Bibit Ternak Sapi <b>Kelompok Tani Bukit Cemangi</b>	Jalan Sendawar RT.05 Kampung Kajang, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Kab. Kutai Timur	Sangatta Selatan	Singa Geweh	10 ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
15	10-04-2022	Ismail, S.T	Dekoratif-Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan Sapi <b>Kelompok Tani Dan Ternak Warga Etam</b>	Jalan Bontang - Sangatta RT.08 NO.06 Desa Kandolo, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Kab. Kutai Timur	Teluk Pandan	Kandolo	30 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
16	10-04-2022	Ismail, S.T	Dekoratif-Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan Ternak Sapi <b>Kelompok Tani Pamase</b>	Lonjok Gunung RT.007 Desa Long Buntuq, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur, Kab. Kutai Timur	Busang	Long Buntuq	10 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
17	10-04-2022	Ismail, S.T	Dekoratif-Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan Pengadaan Ternak Sapi <b>Kelompok Tani Subur Jaya</b>	RT.003 Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Kab. Kutai Timur	Teluk Pandan	Martadinata	20 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
18	10-04-2022	Ismail, S.T	Dekoratif-Nasdem	Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi	Permohonan Bantuan Bibit Ternak Sapi <b>Kelompok Tani Ternak Rantau Jaya</b>	Kampung Melati Jaya, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kab. Berau	Gunung Tabur	Melati Jaya	10 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal
19	RS6253adb7b3518 11-04-2022	Baharu n Demmu, S.Pi, M.Si	PAN	Pertanian	Pengadaan Sapi	<b>KELOMPOK TANI TERNAK MEKAR</b> JAYA mengajukan permohonan pengadaan ternak sapi bali untuk meningkatkan taraf hidup para peternak sapi.	Jl. Poros Samarinda - Bontang Rt. 03, Kab. Kutai Kartanegara	Marang Kayu	Prangat Selatan	18 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
20	RS6253aeb964963 11-04-2022	Ananda Emira Moelis, S.Sn	PDI-P	Pertanian	Pengadaan Sapi	PERMOHONAN BANTUAN TERNAK SAPI <b>KELOMPOK TANI SINAR MAJU</b>	DUSUN PRALEND BLOK D DESA PADANG PENGGRAPAT, Kab. Paser	Tanah Grogot	Padang Pengrapat	20 EKOR	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
21	RS6253ca1a5dad3 11-04-2022	M. Nasiruddin , S.H	PAN	Pertanian	Pengadaan Sapi	<b>Kelompok Tani Rimba Ayu</b> Sangatta Selatan, Permohonan Bantuan Sapi agar meningkatkan kesejahteraan petani	Desa sangatta selatan, Kab. Kutai Timur	Sangatta Selatan	Sangatta Selatan	30 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
22	RS6253cd4056c21 11-04-2022	H. Agus Aras	Dekorati Nasdem	Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi	permohonan bantuan bibit sapi <b>Kelompok Tani Ngudi Kamulyan</b>	Jl. Serda Suwito RT. 08 Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat, Kab. Kutai Timur	Long Mesangat	Tanah Abang	23 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
23	RS6253cf8b48b27 11-04-2022	H. Agus Aras	Dekorati Nasdem	Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi	permohonan bantuan bibit sapi <b>Kelompok Tani Serba Guna</b>	jalan poros km. 02 desa batu timbau batu ampar, Kab. Kutai Timur	Batu Ampar	Batu Timbau	23 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
24	RS6253d1d439c4e 11-04-2022	H. Agus Aras	Dekorati Nasdem	Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi	permohonan bantuan ternak sapi <b>Kelompok Tani Sumber Rezeki</b>	jl. melati rt. 05 desa sika makmur kec. long mesangat, Kab. Kutai Timur	Long Mesangat	Sika Makmur	30 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan



No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal
25	RS6253d5c458ed0 11-04-2022	H. Agus Aras	Dekoratif Nasdem	Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi	sulitnya pendapatan bibit sapi, dikarenakan populasi ternak sapi di desa long pejong masih sangat kurang dan tingkat kesejahteraan petani masih rendah sehingga menyulitkan petani membeli bibit secara swadaya <b>Kelompok Tani Sa-Tawal I</b>	Jl. haleluya rt. 02 desa long pejong kec. busang, Kab. Kutai Timur	Busang	Long Pejeng	23 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
26	RS6253d85922d8e 11-04-2022	H. Agus Aras	Dekoratif Nasdem	Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi	sulitnya mendapatkan bibit sapi, dikarenakan populasi ternak sapi di desa sika makmur masih sangat kurang dan tingkat kesejahteraan petani masih rendah sehingga sulit untuk membeli bibit secara swadaya <b>Kelompok Tani Tunas Baru</b>	Jl. kenanga rt. 06 desa sika makmur kec. long mesangat, Kab. Kutai Timur	Long Mesangat	Sika Makmur	25 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
27	RS625454c91e86c 11-04-2022	Ismail, S.T	Dekoratif Nasdem	Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi	Permohonan Bantuan Bibit Unggul Sapi Bali <b>KELOMPOK TANI GELUMBANG BERSAMA</b>	Jln. Jaya Muda RT.005 Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Kab. Kutai Timur	Muara Bengkal	Benua Baru	23 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
28	RS6255122dc0115 12-04-2022	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	PAN	Pertanian	Pengadaan Sapi	<b>KELOMPOK PEMUDA TANI SINAR JAYA</b> mengajukan permohonan ternak sapi untuk memenuhi kebutuhan akan daging sapi	Jl. RA. Kartini RT. 011, Kab. Kutai Kartanegara	Muara Badak	Gas Alam Badak I	25 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
29	RS6255ac1cbbe5f 12-04-2022	Ismail, S.T	Dekoratif Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan Sapi <b>KELOMPOK TANI SIDOMUNCUL</b>	Jl. Poros Bengalon M. Wahau KM.115 RT.05, Kab. Kutai Timur	Bengalon	Tepian Langsat	10 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
30	RS6256285c64f35 13-04-2022	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Gerindra	Pertanian	Pengadaan Sapi	belum maksimal nya pasokkan daging sapi <b>Kelompok Tani Agro Lestari</b>	jalan rukun sari RT 03, Kab. Kutai Kartanegara	Samboja	Beringin Agung	26 ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal
31	RS6256592752b87 13-04-2022	Baharuddi n Demmu, S.Pi, M.Si	PAN	Pertanian	Pengadaan Sapi	<b>KELOMPOK TERNAK SAPI POTONG TERNAK JAYA</b> mengajukan permohonan ternak sapi untuk meningkatkan ketersediaan daging sapi oleh masyarakat.	Jln. Salo Manis RT. 17, Kab. Kutai Kartanegara	Marang Kayu	Sebuntal	50 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
32	RS6256d9cd11137 13-04-2022	Muhamma d Samsun, S.E. M,Si	PDI-P	Pertanian	Pengadaan Sapi	Banyaknya Lahan Non Produktif Yang Tidak Berdampak Pada Ekonomi Peternak Sapi Pada <b>Kelompok Tani Bakula Mandiri</b> Kelurahan Kampung Lama Samboja	Jl Balikpapan Handil II RT.04, Kab. Kutai Kartanegara	Samboja	Kampung Lama	50 EKOR	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
33	RS6256d9ea90cd1 13-04-2022	Ismail , S.T	Dekorat- Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan TERNAK SAPI BRAHMAN CROSS <b>KELOMPOK TANI SUMBER REZEKI</b>	Jl. Balikpapan RT 07, Kab. Kutai Timur	Muara Wahau	Karya Bhakti	50 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
34	RS6256dabe17593 13-04-2022	Ismail , S.T	Dekorat- Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan Sapi Brahman Cross <b>KELOMPOK TANI BUNGA CEMPEDAK</b>	Jalan Cempedak RT 017 / 004, Kab. Kutai Timur	Kombeng	Sukamaju	50 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
35	RS6256db89b02fb 13-04-2022	Ismail , S.T	Dekorat- Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan BAantuan Sapi BrahmanCross <b>KELOMPOK TANI SUMBER REJEKI II</b>	Jalan Belimbing RT 005 / 003, Kab. Kutai Timur	Kombeng	Sukamaju	50 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
36	RS6256dc41b9a7e 13-04-2022	Ismail , S.T	Dekorat- Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan Sapi Brahman Cross <b>KELOMPOK TANI SEKAR MAS</b>	Jalan Barito, Kab. Kutai Timur	Kombeng	Sidomulyo	50 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
37	RS6256ddad07dee 13/04/2022	Ismail , S.T	Dekorat- Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan Ternak Sapi <b>KELOMPOK TANI KARYA BARU</b>	Desa Muara Wahau, Kab. Kutai Timur	Muara Wahau	Muara Wahau	50 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
38	RS6256de5660e9d 13-04-2022	Ismail , S.T	Dekorat- Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan TERNAK SAPI BRAHMAN CROSS <b>KELOMPOK TANI MATARAM</b>	Jl. Puyuh RT.10, Kab. Kutai Timur	Muara Wahau	Wahau Baru	50 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
39	RS6256dee541945 13-04-2022	Ismail , S.T	Dekorat- Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan Sapi Brahman Cross <b>KELOMPOK TANI TANI MUKTI</b>	Jalan Citandui, Kab. Kutai Timur	Kombeng	Sidomulyo	50 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan



No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal
40 RS6256df7f3c43a	13-04-2022	Ismail, S.T	Dekoratif Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan Ternak Sapi KELOMPOK TANI SUMBER TANI MULYA	Jl. Poros Sangatta - Ma. Bengkal KM 67, Kab. Kutai Timur	Bengalon	Tepian Baru	50 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
41 RS6256e03239ff3	13-04-2022	Ismail, S.T	Dekoratif Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan Pengadaan Ternak Sapi KELOMPOK TANI SUMBER REJEKI	Desa Kebon Agung, Kab. Kutai Timur	Rantau Pulung	Kebon Agung	60 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
42 RS6256e0f714b09	13-04-2022	Ismail, S.T	Dekoratif Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan Ternak Unggul Sapi Limousin/Simental, Brahman Cross KELOMPOK TANI ETAM JUA MANDIRI	Jl. Pertamina KM.04 RT.01, Kab. Kutai Timur	Sangatta Selatan	Sangatta Selatan	10 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
43 RS6256e2256589e	13-04-2022	Ismail, S.T	Dekoratif Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan TERNAK SAPI BRAHMAN CROSS KELOMPOK TANI HARAPAN JAYA	Jl. Cenderawasih RT.12, Kab. Kutai Timur	Muara Wahau	Wahau Baru	50 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
44 RS6256e2cc0fa3e	13-04-2022	Ismail, S.T	Dekoratif Nasdem	Pertanian	Pengadaan Sapi	Permohonan Bantuan TERNAK SAPI BRAHMAN CROSS KELOMPOK TANI SASAK TULEN	Jl. Kakap RT.02, Kab. Kutai Timur	Muara Wahau	Wanasari	50 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
45 RS6253cb4a2c560	11-04-2022	M. Nasiruddin, S.H	PAN	Pertanian	Pengadaan Sapi	Kelompok tani barokah, permohonan bantuan sapi untuk meningkatkan kesejahteraan petani	Kelurahan singah geweh, Kab. Kutai Timur	Sangatta Selatan	Singa Geweh	30 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Mencermati Rencana Kerja Pemerintah 2023, dengan tema **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, maka untuk mendukung pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 tersebut maka Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan operasional yang meliputi program prioritas nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan yang dituangkan dalam empat program yaitu:

- Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- Program Nilai Tambah Daya Saing Industri
- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- Program Dukungan Manajemen

Berdasarkan Empat program tersebut diatas yang terkait dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yaitu:

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas  
Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas bertujuan untuk memenuhi produksi daging secara nasional. Target produksi daging sapi/kerbau pada tahun 2023 sebesar 465,15 ribu ton yang merupakan penyediaan protein hewani.
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri  
Program nilai tambah dan daya saing industri bertujuan untuk meningkatkan produk ekspor seperti hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk non pangan, obat hewan, serta



bibit dan benih. Target produksi ekspor tahun 2023 sebesar 376, 052 Ton

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan bagian dari pembangunan pertanian oleh karena itu kebijakan pembangunan pertanian dapat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Tema Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah ***“Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat”*** Mengacu pada kebijakan Pembangunan Pertanian Nasional serta Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur maka dapat disampaikan pokok-pokok pikiran Renja 2023 sebagai berikut:

1. Tema pembangunan peternakan 2023 adalah “Sinergitas Perangkat Daerah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Asal Ternak dan Kesejahteraan Masyarakat Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”.
2. Kebijakan operasional dengan berpedoman pada program pembangunan yang telah ditetapkan meliputi:
  - a) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan didukung enam kegiatan yaitu pengawasan peredaran sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (sdg) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan provinsi, peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi, pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan kewenangan provinsi, pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor dan

penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain.

- b) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dengan kegiatan penataan prasarana pertanian didukung sub kegiatan perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian
- c) Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan didukung kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi, penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan, sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan
- d) Program perizinan usaha pertanian dengan didukung dua kegiatan yaitu penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota dan penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan
- e) Program penyuluhan pertanian dengan didukung dua kegiatan yaitu pengembangan penerapan penyuluhan pertanian dan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan
- f) Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi dengan didukung tujuh kegiatan yaitu perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang



urusan pemerintah daerah, dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam pelaksanaan misi. Dalam periode 2019–2023 Rencana Kinerja Tahun 2023 yang akan datang akan diarahkan pada pencapaian tujuan sebagai berikut:

- Meningkatkan Kontribusi Subsektor Peternakan terhadap Ekonomi Daerah

Indikatornya meliputi:

**Kontribusi lapangan usaha subsektor peternakan terhadap PDRB (%)**

Tabel 3.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
A.	Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha subsektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,37

B. Sasaran Renja

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam

kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka peningkatan produksi pangan asal hewan khususnya daging maka sasaran tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya produksi pangan asal ternak

**Indikatornya meliputi :**

- ***Produksi Daging (Ton)***
- ***Produksi Telur (Ton)***

- (2) Meningkatnya kesejahteraan peternak

**Indikatornya meliputi :**

- ***Nilai Tukar Peternak (NTP)***

Tabel 3.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
A.	Meningkatnya pendapatan peternak	Nilai Tukar Peternak (NTP)	104
B.	Meningkatnya produksi pangan asal ternak	<u>Produksi (Ton):</u> - Daging - Telur	76.235,08 14.433,04

**3.3 Pogram dan kegiatan**

**A. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan**

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pencapaian visi dan misi Kepala



Daerah dituangkan ke dalam Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 Visi:

Pasangan Dr. Ir. H. Israan Noor, M.Si dan H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode 2019-2023 memiliki tekad, komitmen dan keberanian untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang berdaulat, dengan merumuskan **Visi yaitu:**

**“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”**

Penjabaran dari visi dimaksud bahwa Pemerintahan Kalimantan Timur harus memiliki kemandirian, kemandirian dan daya saing untuk mengatur dan mengelola sumber daya daerahnya secara otonom untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan rakyat. BERDAULAT memiliki arti berbahagia, bertuah menurut kamus besar Bahasa Indonesia. BERDAULAT dapat memiliki arti berhak, otonom, swapraja, berkuasa menurut thesaurus on-line. Selain makna/arti yang positif atas kata BERDAULAT, menyatakan kondisi/keadaan akhir pembangunan yang digambarkan oleh gabungan sifat tujuan pembangunan yang meliputi **Berdikari, SejahtERa, DAMai, unggUL, dan kuAT.**

**MISI :**

Untuk mewujudkan visi “Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat” maka dirumuskan misi sebagai berikut:

**Misi Pertama:**

Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia.

**Misi Kedua:**

Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

**Misi Ketiga:**

Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan

**Misi Keempat:**

Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

**Misi Kelima:**

Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan public

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini ditunjukkan melalui:

Misi 2 yaitu: Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Pada misi ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur berperan dalam Terwujudnya Pengembangan Mini Ranch untuk kesejahteraan peternak yang berdaulat.

**B. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

Program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembangunan peternakan selama 5 tahun ke depan yang disesuaikan dengan urusan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur diimplementasikan ke dalam 6 (enam) kelompok program, yaitu program yang menunjang penyelenggaraan pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan



dan program utama yang mendukung penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian

Adapun program pembangunan Peternakan dan Kesehatan yang mendukung sasaran I Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Meningkatnya pendapatan peternak adalah program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Sedangkan program yang mendukung sasaran II Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Meningkatnya produksi pangan asal ternak adalah program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, program perizinan usaha pertanian, dan program penyuluhan pertanian.

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023. Kegiatan-kegiatan penunjang dan pembangunan peternakan pada tahun 2023 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
    - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
  - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pengadaan Mebel
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:



- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

a. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian meliputi sub kegiatan:

- Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pertanian
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi meliputi sub kegiatan:

- Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
- Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme

c. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi, meliputi sub kegiatan:

- Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
- Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
- Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

- d. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi, meliputi sub kegiatan:
    - Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
    - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
  - e. Kegiatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor meliputi sub kegiatan:
    - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
    - Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan
  - f. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, meliputi sub kegiatan:
    - Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- a. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
    - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, meliputi sub kegiatan:
    - Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
    - Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
    - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular



- b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi, meliputi sub kegiatan:
  - Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
  - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
  - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi
- c. Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan, meliputi sub kegiatan:
  - Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
  - Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner
- d. Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, meliputi sub kegiatan:
  - Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan
- e. Kegiatan Kesejahteraan Hewan, meliputi sub kegiatan:
  - Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
  - a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:
    - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
  - b. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan, meliputi sub kegiatan:
    - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
    - Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer obat hewan
6. Program Penyuluhan Pertanian
  - a. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, meliputi kegiatan:
    - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian

b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, meliputi sub kegiatan:

- Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani

Kegiatan yang tercakup dalam program di atas merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan administrasi dan pembangunan, yang harus dijabarkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dengan memperhatikan isu-isu strategis dari perubahan lingkungan strategis, masalah, tantangan dan peluang yang dapat mempengaruhi pembangunan dan arah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan serta pengembangannya.

Adapun total anggaran yang diusulkan melalui Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 69.247.398.646,- (Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Enam Rupiah).



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pelaksanaan kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam Rancangan Akhir RKPD tahun 2023, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2023, serta kesepakatan Pemerintah dan DPRD dalam seluruh pembahasan APBD 2023. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih tearah.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun rumusan rencana kerja dan pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan perangkat daerah tahun 2023 pada tabel 4.1

TABEL 4.1  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
RENCANA KERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR DAN PENDANAAN  
TAHUN 2023

Rancangan Rencana Kerja 2023													Perkiraan Maju Tahun 2024			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA			
02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					69.247.398.646	02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					61.861.496.000			
02.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					60.684.514.408	02.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					49.224.290.000			
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	%	82		26.728.525.290	3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	%	82		29.003.166.000			
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	79,30		1.676.326.000	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	79,30		1.790.800.000			
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	smd	886.000.000	3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	smd	1.100.000.000			
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	smd	790.326.000	3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	smd	690.800.000			
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80		17.428.333.344	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80		19.124.950.000			
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	83	smd dan ppu	16.558.363.344	3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	83	smd dan ppu	18.214.073.000			
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	smd	628.000.000	3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	smd	682.572.000			
3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	smd	241.970.000	3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	smd	228.305.000			
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	80		412.038.000	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	80		461.366.000			
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	4	smd	184.720.000	3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	4	smd	207.592.000			
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	smd dan luarProv	227.318.000	3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	18	smd dan luarProv	253.774.000			



Rancangan Rencana Kerja 2023						Pertkaraan Maju Tahun 2024							
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%	80		1.899.033.500	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%	80		2.004.545.000
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	smd	23.465.000	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	smd	25.812.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	50	smd	448.770.000	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	smd	554.177.000
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	smd	136.210.500	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	35	smd	149.832.000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3840	smd	17.280.000	3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3840	smd	19.008.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bgt, bpn, psr, brn, mahulu dan luarProv	1.273.308.000	3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	170	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bgt, bpn, psr, brn, mahulu dan luarProv	1.255.716.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		930.394.000	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		1.023.434.000
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	smd	930.394.000	3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan roda-2 operasional	Unit	4	smd	1.023.434.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		3.230.131.172	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		3.561.304.000
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	smd	115.625.000	3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	smd	120.334.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	smd	355.040.300	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Unit	12	smd	386.722.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	smd	2.759.465.872	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	smd	3.054.248.000

Rancangan Rencana Kerja 2023							Perkiraan Maju Tahun 2024						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		1.152.269.274	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		1.036.767.000
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	63	smd	41.500.000	3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	63	smd	45.650.000
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	177	smd	418.433.000	3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	88	smd	396.077.000
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	smd	692.336.274	3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	smd	595.040.000
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	%	22		22.799.183.396	3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	%	22		8.309.224.000
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	unit usaha	76		1.335.998.600	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	unit usaha	76		1.470.100.000
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	2	Bru, kkr, kbr, ktm, bpn, blg, smd, ppu	545.000.000	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, blg, bpn, psr, bru, mahuu dan luarProv	600.000.000
3.27.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	1	bru, kkr, kbr, ktm, psr, bpn, blg, smd, ppu	790.998.600	3.27.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, blg, bpn, psr, bru, mahuu dan luarProv	870.100.000
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Calving Interval	Bulan	16,5		2.045.616.500	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Calving Interval	Bulan	16,5		2.413.024.000
3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	bru, kkr, kbr, psr, dan ppu	1.105.000.000	3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, blg, bpn, psr, bru, mahuu dan luarProv	1.215.500.000



Rancangan Rencana Kerja 2023						Pertkaraan Maju Tahun 2024							
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	2	bru, kkr, kbr, ktm, psr, bpn, bg, smd, ppu	629.570.000	3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Mutu Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	880.024.000
3.27.02.1.04.03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Orang	20	bpn dan smd	311.046.500	3.27.02.1.04.03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Orang	20	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	337.500.000
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	sampel	40		419.850.000	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	sampel	40		463.100.000
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	1	bru, kkr, kbr, ktm, psr, bpn, bg, smd, ppu, mahulu	179.480.000	3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	197.450.000
3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	Ton	100000	smd ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, dan mahulu	240.170.000	3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	Ton	100000	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	265.650.000
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	Sampel	13		685.532.150	3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	Sampel	13		605.000.000
3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	2	smd ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, dan mahulu	406.909.150	3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	495.000.000
3.27.02.1.06.02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	Kasus	165	smd ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, dan mahulu	278.623.000	3.27.02.1.06.02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	Kasus	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	110.000.000
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah kelompok penerima ternak	Kelompok	10		18.312.386.146	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah kelompok penerima ternak	Kelompok	10		3.358.000.000
3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	1359	smd ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, dan mahulu	18.312.386.146	3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	200	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	3.358.000.000



Rancangan Rencana Kerja 2023						Pertkiran Maju Tahun 2024							
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Miniranch yang teregister	Unit	30		5.101.338.000	3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Miniranch yang teregister	Unit	30		5.610.000.000
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	Unit	30		5.101.338.000	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	Unit	30		5.610.000.000
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, brn, dan mahulu	5.101.338.000	3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, brn, mahulu dan luarProv	5.610.000.000
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	%	70		3.770.604.950	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	%	70		3.687.200.000
		Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	%	14					Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	%	14		
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI	Kab/Kota	10		1.176.967.500	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI	Kab/Kota	10		990.100.000
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, brn, dan mahulu	730.096.000	3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, brn, mahulu dan luarProv	685.600.000
3.27.04.1.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, brn, dan mahulu	244.804.000	3.27.04.1.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, brn, mahulu dan luarProv	226.900.000
3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, brn, dan mahulu	202.067.500	3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, brn, mahulu dan luarProv	77.600.000
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	Checkpoint	3		1.572.637.450	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	Checkpoint	3		1.367.300.000
3.27.04.1.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, brn, dan mahulu	198.100.000	3.27.04.1.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, brn, mahulu dan luarProv	165.000.000
3.27.04.1.02.02	Pengawasan atas Penerapan Penyeratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Penyeratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, brn, dan mahulu	684.653.450	3.27.04.1.02.02	Pengawasan atas Penerapan Penyeratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Penyeratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, brn, mahulu dan luarProv	220.000.000



Rancangan Rencana Kerja 2023							Perkiraan Maju Tahun 2024						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.04.1.02.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, dan mahulu	689.884.000	3.27.04.1.02.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	982.300.000
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Unit usaha	2		371.000.000	3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Unit usaha	2		633.200.000
3.27.04.1.04.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Sertifikat	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, dan bru	371.000.000	3.27.04.1.04.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Sertifikat	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	633.200.000
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan	Unit usaha	11		650.000.000	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan	Unit usaha	11		696.600.000
3.27.04.1.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Kasus	750	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, dan bru	650.000.000	3.27.04.1.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Kasus	10	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	696.600.000
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha	%	75		1.131.862.772	3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha	%	75		1.346.400.000
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan	Unit usaha	35		873.999.900	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan	Unit usaha	35		961.400.000
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, dan bru	873.999.900	3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	961.400.000
3.27.06.1.03	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan	Rekomendasi	2		257.862.872	3.27.06.1.03	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan	Rekomendasi	2		385.000.000
3.27.06.1.03.01	Fasilitasi Penuhunan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Laporan	2	bru, kkr, kbr, ktm, dan psr	139.720.000	3.27.06.1.03.01	Fasilitasi Penuhunan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	110.000.000
3.27.06.1.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer obat hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, dan bru	118.142.872	3.27.06.1.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer obat hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	275.000.000

Rancangan Rencana Kerja 2023							Perkiraan Maju Tahun 2024							
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Binaan Kelompok Ternak	%	45		1.153.000.000	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Binaan Kelompok Ternak	%	45		1.268.300.000	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyebaran Informasi peternakan	Kali	12		600.000.000	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyebaran Informasi peternakan	Kali	12		660.000.000	
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	4	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, dan mahulu	600.000.000	3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	4	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	660.000.000	
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi	Kelompok	25		553.000.000	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi	Kelompok	25		608.300.000	
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Korporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, dan mahulu	553.000.000	3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Korporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, bg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	608.300.000	
02.00	UPTD. PEMBIBITAN TERNAK DAN HAJUAN PAKAN TERNAK						02.00	UPTD. PEMBIBITAN TERNAK DAN HAJUAN PAKAN TERNAK						5.619.786.000
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap urusan bidang peternakan	%	82		3.538.999.990	3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap urusan bidang peternakan	%	82		3.897.786.000	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80		125.640.000	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80		127.000.000	
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	ppu	125.640.000	3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	ppu	127.000.000	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	80		64.500.000	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	80		84.000.000	
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	ppu	24.750.000	3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	5	ppu	25.000.000	
3.27.01.1.05.08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	ppu	39.750.000	3.27.01.1.05.08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	23	ppu	59.000.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	%	80		539.170.200	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	%	80		430.000.000	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	ppu	22.073.200	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	ppu	22.000.000	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	ppu	158.311.000	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	ppu	12.000.000	



Rancangan Rencana Kerja 2023										Perkiraan Maju Tahun 2024			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	ppu	10.714.000	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30	ppu	12.000.000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	ppu	5.760.000	3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	156	ppu	7.000.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	ppu, bpn, smd, psr	342.312.000	3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, brn, mahu dan luarProv	377.000.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		856.688.000	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		44.000.000
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	ppu	856.688.000	3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	ppu	44.000.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		1.677.050.510	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		1.844.786.000
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	ppu	28.530.000	3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	ppu	31.383.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	ppu	97.949.070	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	ppu	107.744.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	ppu	1.550.571.440	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	ppu	1.705.659.000
3.27.01.1.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		275.951.280	3.27.01.1.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		1.368.000.000
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19	ppu	12.590.000	3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	ppu	14.000.000
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	56	ppu	206.017.400	3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	ppu	154.000.000
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	ppu	57.343.880	3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	ppu	1.200.000.000

Rancangan Rencana Kerja 2023						Perkiraan Maju Tahun 2024								
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA	
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	%	22		1.566.000.000	3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	%	22		1.722.000.000	
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Populasi ternak sapi bibit	Ekor	80		1.566.000.000	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Populasi ternak sapi bibit	Ekor	80		1.722.000.000	
3.27.02.1.03.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	12	smd, ppu, luarProv	645.000.000	3.27.02.1.03.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	12	smd, ppu, luarProv	708.000.000	
3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	12	smd, ppu, luarProv	921.000.000	3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	12	smd, ppu, luarProv	1.014.000.000	
02.00	UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						02.00	UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						7.017.420.000
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap urusan bidang peternakan	%	82		1.987.884.248	3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap urusan bidang peternakan	%	82		5.400.420.000	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80		119.640.000	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80		147.000.000	
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	smd	119.640.000	3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	smd	147.000.000	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	80		11.430.000	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	80		33.220.000	
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	smd	11.430.000	3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	smd	11.220.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	%	80		355.989.000	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	%	80		384.600.000	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	smd	3.715.000	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	smd	4.100.000	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	smd	67.654.000	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	smd	71.000.000	



Rancangan Rencana Kerja 2023													Perkiraan Maju Tahun 2024				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA				
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	smd	18.038.000	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30	smd	17.400.000				
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	24	smd	3.840.000	3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	24	smd	4.300.000				
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, big, bpn, psr, bru, mahu dan luarProv	207.792.000	3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	51	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, big, bpn, psr, bru, mahu dan luarProv	224.000.000				
3.27.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	smd	54.950.000	3.27.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	smd	63.800.000				
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		492.192.000	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		3.731.800.000				
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	smd	392.504.000	3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	smd	431.800.000				
3.27.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor UPTD LKK	Dokumen	1	smd	99.688.000	3.27.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	smd	3.300.000.000				
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		899.633.748	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		985.100.000				
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	smd	26.540.000	3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	smd	25.400.000				
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	smd	162.023.548	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	smd	177.600.000				
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	smd	711.070.200	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	smd	782.100.000				

Rancangan Rencana Kerja 2023							Perkiraan Maju Tahun 2024						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		108.999.500	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		118.700.000
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	smd	7.000.000	3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	smd	7.700.000
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	36	smd	101.999.500	3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	62	smd	111.000.000
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	%	70		1.470.000.000	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	%	70		1.617.000.000
		Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	%	14					Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	%	14		
3.27.04.1.03.	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan	%	15		1.470.000.000	3.27.04.1.03.	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan	%	15		1.617.000.000
3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit	4	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, blg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	737.000.000	3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit	4	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, blg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	810.700.000
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	105	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, blg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	733.000.000	3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	105	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, blg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	806.300.000



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program, kegiatan, serta sub kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Rancangan Rencana Kerja juga berfungsi untuk memperhatikan kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023.

Dengan adanya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, sebagai upaya mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Rancangan Rencana Kerja. Kemudian RENJA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dapat dipedomani dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah di Provinsi Kalimantan Timur

Samarinda, 7 Juli 2022

Kepala Dinas,



**Munawwar, ST. M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19671129 199803 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**Jl. Bhayangkara. No. 54 Telp. (0541) 743921-741642, Fax. 736228**  
**Samarinda 75121**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR : 77 Tahun 2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN RENCANA KERJA**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu disusun Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
  - b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju;
  - c. bahwa sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tentang Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023;

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
- KEDUA : Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagaimana Diktum Kesatu merupakan landasan bagi unit kerja dilingkungan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
- KEEMPAT : Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 7 Juli 2022

Kepala,



**Munawwar, ST. M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19671129 199803 1 003



LAMPIRAN 2.  
Agenda Kerja Penyusunan RKPD, Renja SKPD dan APBD Kabupaten/Kota

NO	Tahapan Perencanaan dan penganggaran Tahunan Daerah	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV								
A	Penyusunan RKPD dan Renja SKPD (s/d Rancangan Akhir)																																																				
	Penentuan tim penyusun RKPD/Renja SKPD Kab./kota																																																				
	Penyusunan rancangan awal RKPD dan rancangan Renja SKPD Kab./kota																																																				
	Musrenbang desa/kelurahan																																																				
	Langkuan penyusunan rancangan Renja SKPD																																																				
	Musrenbang Kecamatan																																																				
	Pembahasan rancangan Renja SKPD pada Forum SKPD kabupaten/kota																																																				
	Penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota																																																				
	Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota																																																				
	Perumusan Rancangan Akhir RKPD kab/kota																																																				
B	Pendataan perda RKPD dan Renja SKPD																																																				
	Pendataan perda RKPD kabupaten/kota																																																				
	Pendataan Renja SKPD kabupaten/kota																																																				
C	Penyusunan KUA dan PPAS																																																				
	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS																																																				
	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada KDH																																																				
	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD																																																				
	Pembahasan KUA dan PPAS																																																				
D	Nota Kesepakatan KUA dan PPAS																																																				
	Penyusunan RAPBD																																																				
	Penyampaian SE tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD																																																				
	Pendataan SE tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD																																																				
	Penyusunan RKA-SKPD																																																				

Kepala Dinas,  
DINAS PERENCANAAN  
KEP. BANGKALAN  
Munawwar, ST. M. Si  
Pembina Utama Muda  
MIP. 19671129 199803 1 003





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jl. Bhayangkara. No. 54 Telp. (0541) 743921-741642, Fax. 736228

**Samarinda 75121**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Nomor: 07 Tahun 2022**

**T e n t a n g**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) 2023**  
**PEMBANGUNAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang** : a) bahwa Kegiatan Penyusunan Kebijakan Program dan Monitoring Evaluasi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- b) agar Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Peternakan Tahun 2023 dapat tersusun, maka perlu ditetapkan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja;
- c) bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dianggap memenuhi syarat dan dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tim penyusunan tersebut;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- Memperhatikan** : DPA-SKPD Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur No. : 3-27.0-00.0-00.02.01 tanggal Januari 2022;



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Membentuk Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini;
- Kedua :** Tugas Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 adalah mengkompilasi dan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Peternakan Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalimantan Timur, Rencana Strategis Pembangunan Kalimantan Timur, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis Pembangunan Peternakan Nasional, Rencana Strategis Pembangunan Peternakan Kalimantan Timur, Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur serta perkembangan teknis yang perlu segera ditindaklanjuti;
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Lembaran Kerja Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 pada Kegiatan Penyusunan Kebijakan Program dan Monitoring Evaluasi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023;
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 10 Januari 2022

**Kepala Dinas,**



**Munawwar, ST. M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19671129 199803 1 003

**BERITA ACARA**  
**KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS**  
**PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA**  
**KERJA (RENJA) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : 060 / **629** /Perenc/03/2022

Pada Kamis tanggal Sepuluh Bulan Maret Tahun 2022 telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan timur Bapak **H.Munawwar, S.T,M.Si** tentang Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
- b. Paparan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Bapak **Dr. Ir. H.M.Aswin, MM** tentang Strategi dan Arah Kebijakan Pemprov. Kaltim dalam Penguatan Ketahanan Ekonomi Melalui Pembangunan Sub Sektor Peternakan
- c. Paparan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Bapak **Ir Ujang Rachmad, M.Si** tentang Kolaborasi Sub Sektor Perkebunan dengan Peternakan untuk Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kaltim
- d. Paparan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hutan Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Bapak **Desmon Hariman Sormin S.Hut** tentang Potensi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Dalam Sektor Peternakan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022
- e. Paparan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Teknik Mineral dan Batubara Ibu **Yenni Tri Dharmawanti, ST** tentang Pemanfaatan Lahan Pascatambang



- f. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 10 Maret 2022

J a m : 08.30 s.d 16.00 WITA

Tempat : Hotel Novotel

Jln. Brigjen Ery Suparjan No 2 Kelandasan  
Ulu Balikpapan Telp. (0542) 820820

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 :

#### MENYEPAKATI

- KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I, II, III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur ini; dan
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, tanggal 10 Maret 2022

Pimpinan Sidang

Kepala Dinas Peternakan dan  
Kesehatan Hewan Prov Kaltim



**H. Munawwar, S.T. M.Si**











Pembina Tingkat I


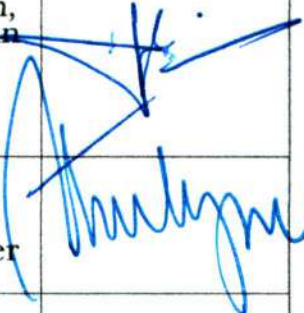



NIP 19671129 199803 1 003



Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah  
Provinsi/Kabupaten/Kota Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja)  
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun  
2023

No	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ LEMBAGA	TANDA TANGAN
1.	H. Munawwar, S.T, M.Si	Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Kaltim	Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Kaltim	
2.	drh. Nurliana BR. Tarigan	Kepala Seksi Produksi Bibit dan Benih ternak UPTD PTHPT	UPTD PTHPT DPKH Prov. Kaltim	
3.	Dr.drh. Rosmelati Situmeang, M.Kes	Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet DPKH Prov. Kaltim	UPTD Lab Keswan dan Kesmavet DPKH Prov. Kaltim	
4.	Ir. Hj. Hidayanti Darma, M.P	Kabid Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim	
5.	Ir. Ujang Rachmad, M.Si	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	
6.	Desmon Hariman Sormin S.Hut.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hutan Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	
7.	Yenni Tri Dharmawanti,ST	Kepala Seksi Pembinaan Teknik Mineral dan Batu Bara	Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim	
8.	Dr. Ir. Ibrahim, MP	Anggota TGUP3 Prov. Kaltim	TGUP3 (Tim Gubernur Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan) Prov. Kaltim	
9.	Ir. Hj. Sulastri, MP	Anggota Badan Pengelola Pangan Untuk PENGHijauan	Badan Pengelola Pangan Untuk PENGHijauan	
10.	Suhardi, S.Pt, M.P, P.hD	Ketua Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian	Universitas Mulawarman	
11.	Ir. Endang Liansyah, M.P	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	

No	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ LEMBAGA	TANDA TANGAN
12.	Petrus, S.Hut, M.Si	Kepala Dinas Pertanian Kutai Barat	Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat	
13.	Ir. Heria Prisni	Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan	
14.	Mulyono, S.Pt, M.P	Kepala Dinas Pertanian Penajam Paser Utara	Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara	
15.	Siti Fatimah, S.Pt, MP	Kepala Bidang Pternakan Dinas Perkebunan dan Pternakan Paser	Dinas Perkebunan dan Pternakan Kabupaten Paser	
16.	Sulis Setyawati, S.Pt	Kepala Bidang Pternakan Dinas Pertanian dan Pternakan Kabupaten Berau	Dinas Pertanian dan Pternakan Kabupaten Berau	



## LAMPIRAN I

## BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL

## FORUM PERANGKAT DAERAH PROVINSI

NOMOR : 060/ 629 /Perenc/03/2022

TANGGAL : 10 Maret 2022

DAFTAR  
HADIR

## PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH

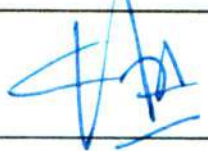

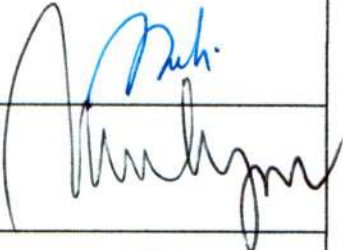













Provinsi : Kalimantan Timur

Tanggal : 10 Maret 2022

















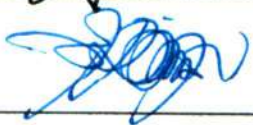
Tempat : Hotel Novotel Balikpapan

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	TANDA TANGAN
1	Munawwar	Kadis	DPKH.	
2	Aswin	Ka. Bappeda	Bappeda	
3	KANTI	Ps Ksbbintibios	Polda KT	
4	Nur Aul	Kasab UML	DPKH	
5	Ramonana	Pengelola SAG	DPKH	
6	Deah	Kem	DPKH	
7	Silvia A	Kesum	DPKH	
8	Khairul mu'ain	Sepg	UPID PFHPT.	
9	Yenni Tri D	Kasi	Dinas ESKM Kaltim	
10	Marji.	paur. for	polri	
11	Suhardi	Uuml	Uuml.	
12	Rosmelari	Ka-UPM lab	DPKH	
13	Sukanto Dwi C	Kasabg TV	DPKH	
14	ANDI HIDAYAT	STAF DISBUNAK	DISBUNAK PASER	
15	SONGKO	ASBGGDTA	UPPER-1.001	
16	Siti FATIMAH	Kabid Peternakan	Disbunak Paser	



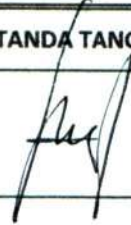



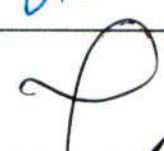







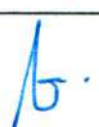




NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	TANDA TANGAN
17	Ashar	Kasi PPHPT	UPTD PPHPT	
18	SRI MISTYAH	staf	DESDM	
19	Martiana Tangan	Kasi PBOI	UPTD . PPHPT	
20	Mulyono	Kadistm	Distan PPU	
21	Muhammad Arif	Perencana AKI	DISTAN PPU	
22	Niken P	staf	OPKH	
23	Petrus	Kadist	Distan	
24	Eko WH	Ditamahe BPM		
25	Lison cheng	Direktur	PT. OZYSOFT PT. Xelo Games	
26	Sulis Setyawati	Kabid Peternakan	Distan nak	
27	SH Rahayu	PMHP	Distan nak	
28	Zakaria	UPTD. Cab. Kase.		
29	Anggra Triana Sand	staf PPHPT	DPKH	
30	Lailani Silmi K	Staf PPHPT Biro Ekonomi	Biro ekonomi	
31	Jumiyanti	medik veteriner Ahli muda	Dinas Kelakana Pangan & Pertanian	
32	Vovv. I	Keuangan	DPKH	
33	Ratih Dujah S	Pabit	DPKH	



NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	TANDA TANGAN
34	Muhammad Akden Dahlan	Pengas Teoris Pemerintahan	UPTD - PTHPT	
35	Iknal n	Sultan Dilean	BKPSDM Nalings	
36	drh. Andhika Fajar	ASOHI Kalim	ASOHI	
37	Anet K	Kari PTH	UPTD Lab FK	
38	Jurnal	Staf PEOT	Unit pelayanan & pelayanan pasien	
39	EDI Sukerman	Disdiknas Paser		
40	Starnian Syah	Disdiknas Paser	— " —	
41	Handy- W	UPTD BRPT	— —	
42	Rosita Sia	Dpkh/staf.	Dpkh prov	
43	Selvia Nur Indah	DPUH/staf	— " —	
44	Wiboso	Wachtanak	Bistand beran	
45	Dahlia Amac	seksi bibit	DPKH	
46	Risra . F.	staf preup	preup	
47	IBRACHIN	Toub/Asst	Toub	
48	I. S. Mase Jayo Adhi	Pendamping	DPKH	
49	ARIKI ICF	Staf	DPKH	
50	Saharminah	~	~	

























NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	TANDA TANGAN
51	Hamdan	Kasi PHPMP	DPKH Prov Kalt	DA
52	Desy Rahayu	Washitah	- - -	DA
53	Siti S. Sa'adah	PPKMU	DPKH	38
54	Yulis Tanty	Kesmanet	DPKH	MA
55	Sarifwan	PICUY	- - -	MA
56	Tatu Neni			MA
57	Syaiful Raki	Staf PUP	- "	SA
58	Agit Boerha	Kor. Binal	DKPP.	SA
59	Endy L	DKPP		SA
60	Kartika M	UPTD RPH Samarinda	DKPP	Fi
61	S. Kh. Saadatu	DKPP		MA
62	Dorm Hs	Distek	Co. Pan	MA
63	Kuntara W	Dist. Tagab Tani	Inst. Tani	MA
64	Kurniawan	Stat Dist. Kubar	Dist. Kubar	MA
65	Siti Aminah	Kas. PP. & PK	Dist. Kubar	MA
66	Hairil amaro	Pappeda	Draser	MA
67	Rina W	DPKH	DPKH	MA



NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	TANDA TANGAN
68	Supri Supri	Kasab	Dishn Kuber	
69	Tarmizi	Staff TV	UPD. Lab Kesmas & Kesmas	
70	Rahmat Kurniawan	Kesmasret	PPKMU	
71	Lulu M - Zaenuddin	Paravit	— " —	
72	M. Roshel	PKUP	DPKTH.	
73	Hj. Hidayat	Kbt	Bappid	
74	Masruhi	Kabid. Persepsi	Distapangtan	
75	Wahyuni	BKUP	Sek	
76	Iryani N	PKUP	—	
77	Yonas	Kasab	Ekasmas	
78	Nurmiwana	stnt	Bappid	
79	Magher	—	Humas.	
80	Gfi P	—	—	
81	A. Anin	—	—	
82	Gyokun	—	—	
83	Wardi	—	—	
84	Yana	—	—	

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	TANDA TANGAN
85	FERNANDA FARIN	Neswan	DPKH	W
86	Abdul Basid	Kesuang an	DPKH	Abd
87	MUNDI MARTALU	PPKMV	DPKH	Mundi
88	Djoko Baturo	Kesabau	DPKH	Djoko
89	Rini	Staf	DPKH	Rini
90	Muhammad	PPKMV	DPKH	Muhammad
91	Sp. Juhari	Ummu	DPKH	Sp. Juhari
92	Mulyono	Kesabau	DPKH	Mulyono
93	PACOB P	DPKH-Kesabau	DPKH	PACOB P
94	Yossy Auker	DPKH	DPKH	Yossy Auker
95	Meliana	Perencanaan	DPKH	Meliana
96	M. Granit. A. w	Perencanaan	DPKH	M. Granit. A. w
97	H. Fadli. S.	Seledis	DPKH	H. Fadli. S.
98	Deasi Fitriani, S. Pt	Wastulan	DPKH	Deasi Fitriani, S. Pt
99	Rofik.	Kasubkop Perencanaan	DPKH	Rofik.
100	Yogi Gunara.	Perencanaan	DPKH	Yogi Gunara.
101	Ichwan R.			Ichwan R.



No	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
102	Andi Hebri	Staf P2PM	Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim	
103	dr. Ronny Setiawati	Kasi P2PM	Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim	
104	indah eliana	kasi deregulasi		
105	Mohamad Bisri	Ketua		
106	Fatmawati	Staff Humas	Biro Administrasi Pimpinan	
107	Ema Rosita	Kabag Kesra Pelayanan dasar	Biro Kesejahteraan Hewan	
108	FITRIANY A.	SUB KOORDINATOR		
109	PURWANTO	STAF SEKRETATIA GAPKI CABANG KALTIM	GAPKI Cab. Kaltim	
110	Pradipta Hendra Saputra	Ketua		
111	Pradipta Hendra Saputra	Pokja Teknis		
112	Enda Mora	Farm Coordinator		
113	drh. Intan Aptri Ranti	Medik Veteriner Muda/Sub Koordinator Keswan		
114	Setyo Budi Basuki	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
115	drh. Cut Meutia	Sub Koordinator Medik Veteriner Muda		
116	Drh. Endang Sri Pertiwi, MSi	Dokter Hewan Karantina Ahli Muda	Karantina Balikpapan	
117	drh Totok Tidarto	Ka.UPTD RPH		
118	Dimas Saputra	Staff		
119	Dimas Bhakti Nan Ichsani	Tenaga Pendukung Teknis Peternakan		
120	M. Hairal Abidin	Staff Divisi Ritel & Konsumer		
121	Dwi Retno Rahayu, S.Pt	Kasubbag TU	UPTD PTHPT	
122	Miftahul Rifan	Kepala Cabang		
123	Sugeng Rahayu	Litbang		
124	Muh. Arief Akbar	Business Manager	PT Jasindo Balikpapan	
125	NANANG ARDHIANSYAJ	Kepala UPT RPH Berau	UPT RPH Berau	
126	Asrul Marhudi, SE	Auditor	Inspektorat	



Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU PENDANAAN	
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2023	TAHUN 2024
02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					55.964.511.000	61.892.496.275
02.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					44.560.511.000	49.224.290.000
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	%	82	83	26.366.511.000	29.003.166.000
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	79,30	79,50	1.628.000.000	1.790.800.000
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	1.000.000.000	1.100.000.000
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	10	628.000.000	690.800.000
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80	80	17.386.317.709	19.124.950.000
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	83	83	16.558.247.709	18.214.073.000
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	620.520.000	682.572.000
3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	207.550.000	228.305.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	80	80	419.424.000	461.366.000
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	5	188.720.000	207.592.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	18	18	230.704.000	253.774.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%	80	80	1.822.312.500	2.004.545.000
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	23.465.000	25.812.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	503.797.000	554.177.000
3.27.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	-	-
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	35	35	136.210.500	149.832.000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3840	3840	17.280.000	19.008.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	170	170	1.141.560.000	1.255.716.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	80	80	930.394.000	1.023.434.000
3.27.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1	-	-
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	4	930.394.000	1.023.434.000
3.27.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	7	7	-	-
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80	80	3.237.548.108	3.561.304.000
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	109.394.000	120.334.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	351.565.500	386.722.000



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU PENDANAAN	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	2.776.588.608	3.054.248.000
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80	80	942.514.683	1.036.767.000
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	63	63	41.500.000	45.650.000
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	88	88	360.070.000	396.077.000
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	540.944.683	595.040.000
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10	-	-
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	%	22	22	7.553.000.000	8.309.224.000
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	unit usaha	76	76	1.336.000.000	1.470.100.000
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	2	2	545.000.000	600.000.000
3.27.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	1	1	791.000.000	870.100.000
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Calving Interval	Bulan	16,5	16,5	2.193.639.800	2.413.024.000
3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	1.105.000.000	1.215.500.000
3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	2	2	781.840.000	860.024.000
3.27.02.1.04.03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Orang	20	20	306.799.800	337.500.000
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	sampel	40	40	421.000.000	463.100.000
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	1	1	179.500.000	197.450.000
3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	Ton	100.000	100.000	241.500.000	265.650.000
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	Sampel	13	13	550.000.000	605.000.000
3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	2	2	450.000.000	495.000.000
3.27.02.1.06.02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	Kasus	165	165	100.000.000	110.000.000
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah kelompok penerima ternak	Kelompok	10	10	3.052.360.200	3.358.000.000
3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	200	200	3.052.360.200	3.358.000.000
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Miniranch yang teregister	Unit	30	30	5.100.000.000	5.610.000.000
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	Unit	30	30	5.100.000.000	5.610.000.000
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	1	5.100.000.000	5.610.000.000



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU PENDANAAN	
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	%	70	70	3.164.000.000	3.687.200.000
		Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	%	14	14		
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI	Kab/Kota	10	10	900.000.000	990.100.000
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	2	2	623.256.000	685.600.000
3.27.04.1.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	2	2	206.217.000	226.900.000
3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	2	2	70.527.000	77.600.000
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	Checkpoint	3	3	1.243.000.000	1.367.300.000
3.27.04.1.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan	1	1	150.000.000	165.000.000
3.27.04.1.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	2	2	200.000.000	220.000.000
3.27.04.1.02.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Laporan	2	2	893.000.000	982.300.000
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Unit usaha	2	2	387.810.000	633.200.000
3.27.04.1.04.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Sertifikat	2	2	387.810.000	633.200.000
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan	Unit usaha	11	11	633.190.000	696.600.000
3.27.04.1.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Kasus	750	750	633.190.000	696.600.000
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha	%	75	75	1.224.000.000	1.346.400.000
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan	Unit usaha	35	35	874.000.000	961.400.000
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	1	1	874.000.000	961.400.000
3.27.06.1.03	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan	Rekomendasi	2	2	350.000.000	385.000.000
3.27.06.1.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Laporan	2	2	100.000.000	110.000.000
3.27.06.1.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer obat hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi	Laporan	2	2	250.000.000	275.000.000
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Binaan Kelompok Ternak	%	45	45	1.153.000.000	1.268.300.000
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyebaran informasi peternakan	Kali	12	12	600.000.000	660.000.000
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	4	4	600.000.000	660.000.000



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU PENDANAAN	
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi	Kelompok	25	25	553.000.000	608.300.000
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	1	1	553.000.000	608.300.000
02.00	UPTD. PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK					5.105.000.000	5.650.786.275
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap urusan bidang peternakan	%	82	83	3.539.000.000	3.928.786.275
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80	80	115.080.000	127.000.000
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	115.080.000	127.000.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	80	80	75.500.000	84.000.000
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	5	22.500.000	25.000.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	23	53.000.000	59.000.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	%	80	80	389.302.200	430.000.000
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	19.810.200	22.000.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11	12	10.682.000	12.000.000
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30	30	10.738.000	12.000.000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	156	156	5.760.000	7.000.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	40	342.312.000	377.000.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	80	80	40.000.000	75.000.000
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	-	-
3.27.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	-	-
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	40.000.000	75.000.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80	80	1.677.078.432	1.844.786.275
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	28.530.000	31.383.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	97.949.200	107.744.120
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.550.599.232	1.705.659.155
3.27.01.1.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80	80	1.242.039.368	1.368.000.000
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	16	12.590.000	14.000.000
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50	181.592.300	154.000.000
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	7	1.047.857.068	1.200.000.000



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU PENDANAAN	
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	%	22	22	1.566.000.000	1.722.000.000
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Populasi ternak sapi bibit	Ekor	80	80	1.566.000.000	1.722.000.000
		Produksi HPT (Segar)	Ton / Tahun	825	825		
3.27.02.1.03.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	12	12	645.000.000	708.000.000
3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	12	12	921.000.000	1.014.000.000
02.00	UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					6.299.000.000	7.017.420.000
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap urusan bidang peternakan	%	82	83	4.829.000.000	5.400.420.000
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80	80	132.840.000	147.000.000
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	132.840.000	147.000.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	80	80	10.200.000	33.220.000
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2	-	22.000.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	10	10.200.000	11.220.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	%	80	80	349.405.000	384.600.000
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	3.715.000	4.100.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	64.500.000	71.000.000
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30	30	15.750.000	17.400.000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	24	3.840.000	4.300.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	51	51	203.600.000	224.000.000
3.27.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	58.000.000	63.800.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	80	80	3.333.894.120	3.731.800.000
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	392.504.000	431.800.000
3.27.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Unit	0	1	-	-
3.27.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	2.941.390.120	3.300.000.000
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor UPTD. LKK	Dokumen	1	1		
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80	80	895.518.880	985.100.000
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	6	23.022.680	25.400.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	161.400.000	177.600.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	711.096.200	782.100.000





LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL  
FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS  
PERANGKAT DAERAH DINAS  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 060 / 629 / Perenc / 03 / 2022  
TANGGAL : 10 Maret 2022

DAFTAR KEGIATAN LINTAS PERANGKAT DAERAH DAN LINTAS WILAYAH PERANGKAT DAERAH  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2023

KODE	KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	LOKASI	ALASAN
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	%	22		
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	unit usaha	76		
3.27.02.1.01.01	<p>Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pertanian</p> <p>Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan Pangan dan Non Pangan</p> <p>Pendampingan Kelompok/UPH Peternakan Pangan dan Non Pangan</p> <p>Pengadaan Alat Peternakan</p>	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	<p>Masih banyaknya Kelompok/Unit Pengolahan Hasil Peternakan serta Petugas Dinas yang belum mengetahui teknologi pengolahan hasil peternakan serta dalam pembinaan dan pendampingan pengolahan hasil peternakan</p> <p>Masih banyaknya Kelompok/Unit Pengolahan Hasil Peternakan yang belum menerapkan teknologi pengolahan hasil peternakan sehingga produknya belum mempunyai nilai tambah dan berdaya saing</p> <p>Masih banyaknya Kelompok/UPH Peternakan yang menggunakan alat sederhana sehingga kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan masih rendah</p>
3.27.02.1.01.01	<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</p> <p>Kegiatan Kaltim Fair dan Bulan Bhakti Peternakan dan Keswan</p> <p>Pelayanan Informasi Pasar</p> <p>Identifikasi Potensi Pelaku Usaha Ekspor</p> <p>Pemanfaatan Kapal Ternak</p>	Dokumen	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	<p>Kegiatan Promosi/Pameran Kaltim Fair/Expo/Bulan bhakti Peternakan dan Kesehatan Hewan belum optimal dilaksanakan karena masih adanya pemberlakuan kebijakan pemerintah terkait pembatasan kegiatan masyarakat/PPKM</p> <p>Masih terjadi keterlambatan pengiriman data/laporan petugas PIP kab/kota karena masalah jaringan atau adanya pergantian petugas sehingga perlu dilakukan sosialisasi/pembinaan kembali</p> <p>Kendala saat ini adalah masalah identifikasi/pendataan karena tidak semua pelaku usaha mau didata/diminta keterangan dan kebanyakan pemilik usaha tidak berada ditempat</p> <p>Penyebaran muatan ternak tidak merata, muatan ternak meningkat tajam pada saat menjelang hari raya Idul qurban dan setelah itu menurun sampai akhir tahun</p>
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Ekor	80		
		Ton / Tahun	825		
3.27.02.1.03.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	12	smd, ppu, luarProv	
3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	12	smd, ppu, luarProv	



KODE	KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	LOKASI	ALASAN
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Bulan	16,5		
3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				
	Penyediaan Fasilitas Biogas	Unit	20	kbr, psr, ppu, bru, kkr, dan bpn	Pengembangan komoditas unggas lokal akhir-akhir ini mulai digencarkan lagi, sehingga pengadaan alat mesin peternakan berbentuk mesin tetas sangat memungkinkan untuk membantu peningkatan produksi bibit unggas lokal yang baik dan berdaya saing.
	Reaktivasi Biogas	Unit	30		
	Penyediaan Fasilitas Mesin Tetas Unggas	Unit	10	ppu, psr, kkr, dan smd	Pengembangan komoditas unggas lokal akhir-akhir ini mulai digencarkan lagi, sehingga pengadaan alat mesin peternakan berbentuk mesin tetas sangat dimungkinkan untuk membantu peningkatan produksi bibit unggas lokal yang baik dan berdaya saing.
	Pendampingan Kelompok Penerapan GFP (Good Farming Practice)	Kegiatan	1		Produksi dan produktifitas ternak di Kalimantan Timur dalam belum menunjukkan performa yang signifikan, sebagai akibat dari masih kurangnya tingkat pemahaman peternak terhadap teknologi peternakan termasuk pemanfaatannya yang belum sesuai standar. Karena itu perlu dilakukan pendampingan budidaya ternak yang baik atau yang dikenal dengan Good Farming Practice (GFP)
3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	2		
	Perbaikan Container Depo Straw/Depo N2 CairSpesifikasi : Peralatan Ib/Alat Veteriner (Perbaikan Container), Perbaikan Container Depo Straw/Depo N2 Cair	Unit	5	Provinsi	Banyak Container Depo Straw dan Depo Nitrogen Cair yang Rusak/Bocor, sehingga perlu perbaikan
	Pengadaan Mineral Blok Untuk Sapi/Kambing	Buah	400	Kab. PPU 150 Buah, Kab. Kukar 100 Buah, Kab. Paser 100 Buah dan Kota Balikpapan 50 Buah	tindakan operasional yang dapat mengatasi kematian pedet pasca melahirkan salah satunya dengan cara memberikan mineral/feed suplement dan Vitamin serta obat-obatan. Mineral dan feed suplement tersebut mengandung unsur mikro dan makro yang dibutuhkan dalam perkembangan pedet dan mencegah kematian pedet karena kekurangan gizi
	Peralatan IB/Alat Veteriner (Plastik Glove), Kruuse, Krutex disposable examination gloves (pak/100 pcs)	Pak	100	Wilayah IB di 9 Kab/Kota	Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Reproduksi dalam rangka mendukung SIKOMANDAN, maka perlu adanya penyediaan sarana dan prasarana IB yakni Plastik Sheet dan plastik glove
	Peralatan IB/Alat Veteriner (Plastik Sheet), Minitube 50 pc	Pak	200	Wilayah IB di 9 Kab/Kota	
	Pengadaan Hormon Kegiatan IB Introduksi (Lutalyse/ capriglandin)	Botol	300	Wilayah IB di 9 Kab/Kota	Hormon PGF2α digunakan pelaksanaan kegiatan IB Introduksi sebagai sarana untuk membuat sapi berahi secara bersamaan/sinkronisasi IB.
	Pengadaan Obat-Obatan dan Vitamin mendukung kegiatan Optimalisasi Reproduksi dalam rangka SIKOMANDAN	Paket	1	Wilayah IB di 9 Kab/Kota	Pada saat pengumpulan secara berkala, akseptor yang berahi dilakukan IB dan akseptor lainnya mendapatkan penanganan medis dengan penyediaan Obat-obatan dan vitamin serta hormon reproduksi. Sehingga pengadaan obat-obatan diperlukan
	Pembuatan Fasilitas Kandang - Gangway	Unit	6	Kab. Paser, Kab. Kukar, Kab. Kutim	Memudahkan dalam pelaksanaan IB massal, pengobatan massal dan pemeriksaan kebuntingan secara massal
3.27.02.1.04.03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Orang	20		

KODE	KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	LOKASI	ALASAN
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	sampel	40		
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak  penyediaan pakan dengan penanaman HPT berkualitas.	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu	Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, karena rendahnya sebaran dan ketersediaan HPT sepanjang tahun menjadi salah satu penyebab sulit berkembangnya populasi dan produktivitas ternak sapi, karena peternak tidak dapat mempertahankan ternaknya untuk dipelihara (terutama musim kemarau) akibat kurangnya sumber pakan utama tersebut
3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Ton	100.000		
	Penyediaan pemberian pakan penguat (konsentrat) untuk pakan indukan dan untuk konsentrat pakan penggemukan				1. Meningkatkan kesejahteraan petani/peternak kaltim melalui penyediaan pakan berkualitas.
	Pengujian sampel Hijuan Pakan Ternak				2. Meningkatnya produktivitas ternak yang dapat dilihat dari kinerja produksi dan kinerja reproduksinya 3. Memanfaatkan secara optimal potensi bahan pakan lokal yang telah diketahui kandungan nutriennya 4. Menjamin kualitas pakan yang beredar
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Sampel	13		
3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan  Pengambilan sampel obat hewan  Pengiriman sampel obat hewan  Pemeriksaan sampel obat hewan  Pembinaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan pada usaha obat hewan  Pelayanan kesehatan hewan  Pengadaan obat-obatan untuk Puskesmas  Aplikasi pengelolaan gudang farmasi obat hewan	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	Untuk menjamin mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang akan/telah beredar serta memberikan perlindungan kepada masyarakat/peternak dan pelaku usaha obat hewan di Kalimantan Timur. Tidak semua kabupaten kota yang dilakukan pengawasan obat hewan dapat optimal dilakukan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan sampel obat hewan.  Pengambilan sampel obat hewan untuk dilakukan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan pada usaha peredaran obat hewan di kabupaten kota tidak optimal dapat dilakukan.  Pengiriman sampel obat hewan seperti vaksin harus bisa terjaga cold chain selama perjalanan sampai ke tujuan sehingga terjaga mutu dan khasiatnya.  Tidak semua obat hewan yang beredar di usaha obat hewan memenuhi persyaratan teknis (organoleptik dan fisik) untuk dapat diuji di BBPMSOH.  Hasil uji terhadap sampel obat hewan akan menjadi bahan kebijakan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha obat hewan.  Pelayanan Kesehatan Hewan dilakukan untuk peningkatan produksi dan produktifitas ternak sehingga terjaga status kesehatan hewan yang kondusif di Kalimantan Timur. Tidak semua kelompok ternak binaan dapat optimal diberikan pendampingan pelayanan kesehatan hewan.  Untuk menjamin ketersediaan obat hewan yang menjamin mutu dan kualitasnya untuk kegiatan pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas. Kebutuhan obat-obatan untuk Puskesmas tidak dapat optimal difasilitasi.  Aplikasi Pengelolaan Gudang Farmasi Obat Hewan bisa memudahkan dalam mengidentifikasi kebutuhan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pencatatan dan pelaporan persediaan obat hewan sehingga dapat terlaksana administrasi pengelolaan persediaan obat-obatan secara baik.



KODE	KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	LOKASI	ALASAN
3.27.02.1.06.02	<p>Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan</p> <p>Pertemuan sinkronisasi pengawasan obat hewan</p> <p>Melakukan pembinaan terhadap usaha obat hewan dalam rangka penyediaan dan peredaran obat hewan yang baik</p> <p>Melakukan koordinasi dan konsultasi</p>	Kasus	165	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	<p>Untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dalam pembuatan, penyediaan, peredaran dan pemakaian obat hewan, baik penyimpangan yang bersifat administratif maupun teknis. Tidak semua usaha peredaran obat hewan dapat optimal dilakukan penindakan ataspenyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan.</p> <p>Untuk evaluasi dan sinkronisasi kegiatan pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan di Provinsi Kalimantan Timur serta untuk update perkembangan terbaru serta peraturan perundang-undangan terbaru.Tidak semua pemegang kebijakan terkait pengawasan obat hewan dapat optimal hadir.</p> <p>Pembinaan usaha obat hewan untuk mencegah terjadinya penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan. Tidak semua usaha peredaran obat hewan dapat optimal diberikan pembinaan.</p> <p>Untuk meningkatkan kualitas kinerja kegiatan pengawasan obat hewan di Kalimantan Timur dan menyamakan antara program kegiatan tahun berjalan dan tahun berikutnya dengan Subdit Pengawas Obat Hewan dan Subdit KSKH (Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan) Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI.</p>
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Kelompok	10		
3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	200		
	Pengadaan Obat-Obatan Pendukung Bantuan Ternak dari Pusat (Sapi dan Kambing)	Paket	1	Kab/Kota, menyesuaikan Pengadaan Ternak dari Pusat	Mendukung kegiatan pengadaan ternak yang dilakukan oleh Pusat dengan penyediaan sarana berupa obat-obatan ternak untuk kelompok penerima bantuan ternak tersebut
	Pengadaan Obat-obatan Ternak dalam rangka Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kab/Kota	Paket	1	Berau 3 Klpk, Kukar 3 Klpk, Kubar 2 Klpk, Kutim 2 Klpk, Mahulu 2 Klpk, Paser 2 Klpk	Mendukung kegiatan pengadaan ternak yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dengan penyediaan sarana berupa obat-obatan ternak untuk kelompok penerima bantuan ternak tersebut
	Pengadaan Ternak dalam rangka Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kab/Kota	Ekor	200	Berau 3 Klpk, Kukar 3 Klpk, Kubar 2 Klpk, Kutim 2 Klpk, Mahulu 2 Klpk, Paser 2 Klpk	Mendukung fasilitas sarana berupa bibit ternak sapi jantan dan betina dalam rangka kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kab/Kota
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Unit	30		
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Unit	30		
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1		
	Penyediaan Fasilitas Mini Ranch	Unit	30	ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu	<p>1. Meningkatkan kesejahteraan petani/peternak kaltim melalui pengembangan ternak sapi berbasis mini ranch</p> <p>2. Peningkatan populasi sapi potong</p> <p>3. Meningkatkan efisiensi dan kapasitas pemeliharaan peternak sapi potong dan Menumbuhkan bisnis sapi potong berdaya saing berbasis ekonomi masyarakat</p>
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	70		
		%	14		
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kab/Kota	10		
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu	



KODE	KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	LOKASI	ALASAN
	Pengadaan Vaksin Jembrana	6500	dosis		1. Masih kurang optimalnya cakupan vaksinasi Jembrana di wilayah Kab/Kota sehingga herd immunity belum bisa tercapai; 2. Rendahnya partisipasi peternak terhadap pencegahan penyakit Jembrana; 3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan hewan; 4. Pemantauan lalu lintas ternak di Kabupaten/Kota sulit dilakukan sehingga penyakit Jembrana dapat menyebar ke Kabupaten/Kota yang lain.
	Pengadaan Vaksin Rabies	7000	dosis		1. Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) RABAH yaitu salah satunya adalah Rabies masih terjadi Kabupaten/Kota 2. Pemantauan lalu lintas ternak di Kabupaten/Kota sulit dilakukan sehingga penyakit Rabies dapat menyebar ke Kabupaten/Kota yang lain. 3. Masih rendahnya cakupan vaksinasi sehingga herd immunity belum bisa tercapai
	Pengadaan bahan dan Peralatan Vaksinasi (berupa jarum spuit sebanyak 6500 pcs dan spuit disposable sebanyak 7000 pcs)				Pengadaan bahan dan peralatan vaksinasi sangat mendukung kegiatan vaksinasi baik rabies maupun Jembrana sehingga akan berdampak pada kegiatan vaksinasi dilapangan menjadi lebih optimal
	Pengadaan obat-obatan penunjang vaksinasi (berupa obat Diuretik, Analgesik, Antipiretik dan Antibloat sebanyak 20 botol)				Pengadaan obat-obatan penunjang vaksinasi mendukung kegiatan vaksinasi. Seringkali hewan mengalami trauma setelah dilakukan vaksinasi sehingga diperlukan obat-obatan penunjang vaksinasi.
	Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Pengendalian Risiko serta Vaksinasi	27	OP		Untuk pengendalian dan pemberantasan penyakit jembrana dan rabies di wilayah Kaltim. Tidak optimalnya kegiatan koordinasi, pengawasan dan pengendalian risiko penyakit hewan di lapangan
3.27.04.1.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	
	Pembuatan Peta Penyakit	5	Eksemplar		1. Dalam rangka memberi informasi penyakit hewan di wilayah Kalimantan Timur kepada masyarakat 2. Memberikan informasi mengenai penyakit hewan serta distribusinya, sehingga dapat digunakan sebagai masukan bagi pemangku kebijakan untuk menyusun kegiatan dan kebijakan.
	Pembuatan Leaflet Penyakit Hewan Menular Strategis	120	Lembar		1. Memberikan informasi yang bersifat informatif kepada masyarakat terkait penyakit hewan menular strategis 2. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penanganan penyakit hewan menular strategis 3. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pencegahan penyakit hewan menular strategis 4. Menyampaikan informasi dalam selebaran kertas yang beris informasi dan gambar-gambar dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sesuai dengan kebutuhan dan penyajian yang menarik
	Penyelenggaraan Rakor Kesehatan Hewan	1	Kegiatan		Untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular
	Pengiriman Sampel Pasca Vaksinasi	25	Kg		Biaya pengiriman sampel serum darah hewan pasca vaksinasi untuk diujikan di Balai Veteriner Banjarbaru.
	Pengujian Sampel Pasca Vaksinasi	30	sampel		Untuk penghitungan antibodi kuantitatif pasca vaksinasi. Diharapkan bisa menilai respons imun terhadap vaksin, mengukur durasi dan kadar antibodi yang mampu bertahan dalam tubuh, serta mempertimbangkan kadar antibodi yang akan membutuhkan booster vaksinasi di kemudian hari serta untuk mengetahui keberhasilan vaksinasi. Tidak semua kabupaten kota target wilayah vaksinasi dapat optimal dilakukan pengujian pasca



KODE	KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	LOKASI	ALASAN
	Pengawasan, pembinaan kompartemen, pertemuan, koordinasi dan pelaksanaan pembebasan rabies di P. Derawan	12	OP		1. untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kompartemen bebas kasus Jembrana 2. Untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan kompartemen bebas kasus Jembrana 3. untuk membina dan mengedukasi peternak tentang kompartemen bebas kasus jembrana 4. untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pembebasan rabies di P. Derawan
	Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat terkait Pembebasan Rabies di Kepulauan Derawan	2	OP		Untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke Pusat terkait pelaksanaan pembebasan rabies di Kep. Derawan sehingga target pembebasan rabies di P. Derawan dapat tercapai.
3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular tidak dapat dilaksanakan sehingga berdampak pada luasan wilayah yang terdampak wabah penyakit hewan menular.
	Belanja Peralatan dan Sarana Kesehatan Hewan				Belanja peralatan dan sarana kesehatan sangat mendukung kegiatan vaksinasi baik rabies maupun Jembrana menjadi lebih optimal.
	Pelaksanaan Edukasi Penyakit Hewan Menular di Kabupaten/Kota	10	Lokasi		1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan penyakit hewan menular 2. Memberikan informasi dan pembelajaran kepada masyarakat dengan menggunakan metode KIE (Komunikasi, Infoermasi dan Edukasi).
	Penyediaan Obat-Obatan dan Peralatan Penunjang Vaksinasi				1. Pengadaan bahan dan peralatan vaksinasi sangat mendukung kegiatan vaksinasi baik rabies maupun Jembrana menjadi lebih optimal 2. Rendahnya partisipasi peternak terhadap pencegahan penyakit hewan menular.
	Pembinaan, dan Pengawasan, Penanganan Penyakit Hewan Menular	16	OP		1. untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanganan penyakit hewan menular 2. Untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan penanganan penyakit hewan menular 3. untuk membina dan mengedukasi peternak tentang penanganan penyakit hewan menular.
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Checkpoint	3		
3.27.04.1.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	Untuk terlaksananya penilaian risiko dan penyusunan rekomendasi manajemen risiko terhadap wabah penyakit hewan dari luar Kaltim. Pemantauan Penyakit Hewan Eksotik tidak dapat optimal dilakukan .
	Pemantauan Penyakit Hewan Eksotik				
3.27.04.1.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	
	Pengembangan Aplikasi SIKOMPPAK				Aplikasi SIKOMPPAK merupakan perangkat lunak berbasis teknologi informasi terintegrasi yang mampu mendukung proses administrasi rekomendasi pemasukan/ pengeluaran hewan agar informasi yang diperlukan oleh pengguna dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Penggunaan aplikasi SIKOMPPAK dipengaruhi implementasi PP Nomor 5 Tahun 2020
	Kegiatan Pemanfaatan iSIKHNAS				Untuk penyediaan data kesehatan hewan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan petugas tidak optimal.
3.27.04.1.02.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	

KODE	KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	LOKASI	ALASAN
3.27.04.1.03.	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	%	15		
3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Unit	4	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	
	Peyediaan Bahan Kimia Lab. Keswan	Sertifikat	262		
	Penyediaan Bahan Kimia Lab. Keswan	jenis	50	samarinda	- Bahan uji lab. keswan
	Penyediaan Bahan dan Sarana Penunjang Lab. Keswan	jenis	40	samarinda	- Bahan dan sarana habis pakai lab. keswan
	Penyediaan Peralatan Lab. Keswan	alat	5	samarinda	- Peralatan uji lab. keswan
	Terlaksananya akreditasi Lab Keswan	ruang lingkup	7	samarinda	- status akreditasi dipertahankan
	Terlaksananya Monitoring dan Surveilans Penyakit Hewan	kab/kota	10	Propinsi kaltim	- penyidikan penyakit hewan
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	105	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	
	Peyediaan Bahan Kimia Lab. Kesmavet	jenis	60	samarinda	- Bahan uji lab. kesmavet
	Penyediaan Bahan dan Sarana Penunjang Lab. Kesmavet	jenis	30	samarinda	- Bahan dan sarana habis pakai lab. kesmavet
	Penyediaan Peralatan Lab. Kesmavet	alat	5	samarinda	- Peralatan uji lab. kesmavet
	Terlaksananya akreditasi Lab Kesmavet	ruang lingkup	8	samarinda	- status akreditasi dipertahankan
	Terlaksananya Monitoring dan Surveilans	kab/kota	10	Propinsi kaltim	- penyidikan produk asal hewan
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Unit usaha	2		
3.27.04.1.04.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Sertifikat	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	
	Pembinaan Unit Usaha Produk Hewan				Masih banyaknya unit usaha produk hewan yang belum mengajukan permohonan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
	Penilaian/Audit Sertifikasi NKV				Hasil perbaikan audit NKV membutuhkan waktu yang cukup lama karena berkaitan dengan kemampuan dana pelaku usaha
	Pengawasan Unit Usaha NKV				Tidak semua unit usaha NKV dilakukan pengawasan karena Unit usaha yang telah ber NKV ada 67 unit usaha.
	Surveilans Unit Usaha NKV				Belum semua unit usaha NKV yang masa berlakunya lebih dari 5 tahun mengajukan permohonan NKV
	Edukasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)				Masih banyaknya pelaku usaha produk yg belum mengetahui tentang NKV
	Sosialisasi NIB Halal				Masih banyaknya pelaku usaha produk yg belum mengetahui NIB halal
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Unit usaha	11		
3.27.04.1.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Kasus	10	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan	
	Pembinaan Kesrawan				Masih banyak unit usaha produk hewan yang belum dilakukan pembinaan kesrawan
	Pengawasan pengendalian pemotongan betina produktif				Masih ditemukan pemotongan ternak sapi/kerbau betina produktif di RPH
	Pengawasan pemotongan ternak kurban				Masih ditemukan pemotongan ternak kurban yang tidak memenuhi persyaratan higienis sanitasi dan syariat islam
	Supervisi dan Pembinaan RPH				Masih terdapat beberapa permasalahan di RPH kabupaten/kota terkait fasilitasi RPH.



KODE	KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	LOKASI	ALASAN
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	%	75		
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit usaha	35		
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian  Kegiatan Fasilitas Asuransi Ternak, Pembiayaan dan Investasi Peternakan	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	(1) Memberikan ketentraman dan ketenangan sehingga peternak dapat memusatkan perhatian pada pengelolaan usaha dengan lebih baik (2) Pengalihan risiko dengan membayar premi yang relatif kecil peternak dapat memindahkan ketidakpastian risiko kerugian yang nilainya besar, (3) Memberikan jaminan perlindungan dari risiko kematian dan kehilangan sapi, (4) Meningkatkan kredibilitas peserta asuransi terhadap akses ke pembiayaan (perbankan)
3.27.06.1.03	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Rekomendasi	2		
3.27.06.1.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan  Edukasi izin usaha pengecer obat hewan  Penyediaan sarana dan prasarana Klinik Hewan	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	Untuk terwujudnya komitmen dari pelaku usaha pengecer obat hewan melakukan penerbitan izin usaha pengecer obat hewan sehingga menjamin legalitasnya dalam melakukan usaha obat hewan. Masih kurang optimalnya pengawasan obat hewan dan izin usaha obat hewan serta masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap hukum/aturan yang berlaku terkait izin usaha obat hewan.  Memberikan KIE terkait izin usaha pengecer obat hewan serta dalam melakukan kegiatan pembuatan, penyediaan, peredaran dan penggunaan obat hewan yang baik. Tidak semua usaha pengecer obat hewan dapat optimal mengikuti kegiatan edukasi.  Untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi pelayanan kesehatan hewan yang diperuntukkan bagi hewan kesayangan seperti kucing, anjing dan hewan peliharaan lainnya serta mendukung peningkatan PAD.
3.27.06.1.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer obat hewan  Pembinaan izin usaha obat hewan  Pertemuan Petugas Dokter Hewan dan Paramedis Veteriner THL (Tenaga Harian Lepas) Kementan RI se-Kalimantan Timur.  Penyediaan Sarana Kegiatan berupa bahan informasi	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	Untuk pengendalian kegiatan pelaku usaha obat hewan dan peredaran obat hewan yang dapat mengancam kesehatan manusia, memberikan kepastian usaha hukum di bidang usaha obat hewan dan mencegah masuk dan menyebarkan penyakit hewan menular. Tidak semua kabupaten kota dapat optimal dilakukan pengawasan pelaksanaan izin usaha.  Untuk mendorong pelaku usaha melakukan pengurusan perizinan usaha obat hewan untuk legalitas pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Tidak semua usaha obat hewan di kabupaten kota dapat optimal dilakukan pembinaan pelaksanaan izin usaha obat hewan  Sebagai forum tempat bertemunya petugas kesehatan hewan ( Dokter Hewan dan Paramedis Veteriner THL ) se-Kalimantan Timur, untuk berkoordinasi dan meningkatkan sumber daya manusia dalam melakukan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan di wilayah masing-masing .  Memberikan bahan informasi kepada peternak/pelaku usaha terkait penyediaan, penggunaan dan penyimpanan obat hewan yang baik.

KODE	KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	LOKASI	ALASAN
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	%	45		
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Kali	12		
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian  Pertemuan Verifikasi dan Validasi Data Peternakan	Dokumen	4	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	Tujuan diadakannya kegiatan adalah untuk mendapatkan angka tetap untuk komoditas peternakan sebagai cerminan kinerja dinas dalam pembangunan peternakan
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Kelompok	25		
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Unit	1	PPU	<p>pola petani ternak yang masih bersifat konvensional/individu lahan dan usahanya masih bersifat budidaya sehingga harus dibentuk menjadi korporasi petani dan yang telah terbentuk diperkuat kelembagaannya. Sehingga diharapkan ada perubahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan usaha peternakan yang yang konvensional/Individu dapat bertransformasi menjadi suatu ekosistem bisnis</li> <li>- Petani Peternak budidaya menjadi pebisnis dan berjiwa kewirausahaan</li> <li>- Lahan penunjang budiya menjadi lahan bisnis yang menguntungkan</li> </ul> <p>Kelompok/Gapoknak menjadi korporasi berskala luas menerapkan teknologi dan manajemen modern. Pertanian yang maju dan mandiri</p>

Balikpapan, 10 Maret 2022

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Kalimantan Timur

Kepala



H. Munawwar, S.T., Ir.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19671129 199803 1 003



**Saran/Masukan Peserta Forum Perangkat Daerah  
Tahun 2022**

No	Nama	Instansi	Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok
1	Edi Suherman	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser	Perlu dilakukan perhitungan atau sinkronisasi terhadap rencana pengadaan sumber bibit Kalimantan Timur yang berasal dari Provinsi Kalsel, Bali, dan NTB agar memenuhi kuota yang ada
2	Siti Fatimah	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser	Perlu rekomendasi dari DPKH Prov. Kaltim terkait daerah sumber bibit untuk Kambing
3	Sulis Setyawati	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau	Perlu dukungan straw kambing untuk pelaksanaan IB kambing
4	Suhardi	Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian UNMUL	Perlu dukungan untuk penilaian BCS di Desa Korporasi Sapi dan Uji Kualitas HPT Jumlah pegawai yang mengikuti DIKLAT perlu ditingkatkan Plasma Nutfah Hasil Kaltim perlu dilakukan observasi untuk pengembangan genetiknya (Seleksi, Culling dan Produksi)
5	Ibrahim	Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian UNMUL	Perlu dukungan kegiatan Pemetaan sapi sawit kerjasama UNMUL dengan Australia lokasi di kab Paser dan Kutim
6	Kumbawan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	Ayam Nunukan yang ada di Kichen Farm perlu didukung baik Dinas Provinsi maupun Kota Samarinda agar dapat dijadikan Breeding untuk produksi DOC dan dapat dibuat komersial.
7	Maskuri	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	Perlu dukungan untuk masterplan pembangunan pasar hewan sebagai pengembangan RPH multiguna
8	Sapriansyah	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser	Perlu dukungan HPT terkait rencana pengadaan ternak sebanyak 400 ekor yang bersumber dari dana aspirasi
9	Akbar	PT JASINDO Balikpapan	Fasilitasi Pemerintah Pusat terkait kegiatan asuransi sapi tahun 2022 untuk nasional sebanyak 150.000 ekor
10.	Drh. H. Sumarsongko	LPPOM MUI Kaltim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkait penyakit MCF (Malignant Cattaral Fever) diharapkan ada rapid test (test kit) sehingga pemeriksaan bisa dilakukan dengan cepat, sehingga Kaltim tidak tertutup dari pemasukan domba untuk dikembangkan.</li> <li>2. Perlu dilakukan tindakan proaktif "menjemput bola" terhadap pemotongan ternak ruminansia kecil yang tidak dipotong di RPH.</li> <li>3. Perlu adanya pelatihan Juleha sebagai syarat pengurusan sertifikat halal di RPU dan RPH agar daging yang dihasilkan ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal).</li> <li>4. Perlunya sharing dana pelatihan juleha antara Dinas provinsi dan kabupaten/kota karena ketersediaan produksi makanan dan minuman dari produk peternakan yang ASUH sangat tergantung dari ketersediaan tenaga Juleha.</li> <li>5. Terkait MD (Merchandiser Display) perlu ada kerjasama yang baik dan intensif dengan BPOM di Samarinda. Selain itu, diperlukan fasilitasi untuk pelaku usaha kecil misalnya dalam pembuatan dapur/ ruang produksi yang membutuhkan biaya besar dan tidak mudah karena tidak semua pelaku usaha mampu membuat ruang produksi.</li> <li>6. Perlu ada peralatan ataupun metodologi pengujian di laboratorium untuk mengidentifikasi daging ayam tiren, sehingga bisa dibedakan antara daging ayam tiren dan yang tidak.</li> <li>7. Perlu dilakukan pembinaan terhadap proses pemotongan produk unggas yang ASUH, sehingga jika dilakukan pemeriksaan mikrobiologi terhadap dagingnya tidak melewati ambang batas mikroba.</li> <li>8. Perlu fasilitasi dalam pengurusan sertifikasi halal karena biaya operasional LPH yang besar dan waktu yang singkat sangat memberatkan pelaku usaha.</li> <li>9. Perlu peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan LP POM MUI terkait sertifikasi halal.</li> </ol>
11.	Drh. Andhika	Ketua ASOHI Kaltim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukan pengawasan obat hewan yang bersinergi dengan program pemerintah</li> <li>2. Perlu dilakukan penertiban peredaran obat hewan ilegal agar obat hewan yang beredar sudah terdaftar (teregister)</li> </ol>



No	Nama	Instansi	Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok
12.	Drh. Bisri (Ketua PDHI Kaltim II)	Ketua PDHI Kaltim II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu penegasan kepada drh terkait penggunaan obat hewan yang tidak teregistrasi dan diberi waktu selama masa pembinaan agar mengurus izin obat hewan</li> <li>2. Perlu diberikan tengat waktu kepada pet shop yang tidak berizin untuk melakukan pengurusan izinnya.</li> <li>3. Memberikan saran kepada pelaku usaha untuk dapat mendekati dokter hewan sebagai penanggungjawab teknis usaha obat hewannya.</li> <li>4. Perlu masukan/saran ke Pusat terkait penjualan daging beku di pasar tradisional</li> </ol>
13.	Drh. Jumiyaniti	Dinas Pertanian Kota Samarinda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dijadwalkan pengawasan obat hewan setiap triwulan.</li> <li>2. Perlu adanya insentif atau penjangkaran untuk pemotongan sapi betina produktif dan alokasi dari Provinsi untuk kerjasama dengan Kepolisian agar dapat menekan pemotongan sapi betina produktif.</li> <li>3. Diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Provinsi dalam pengawasan penjualan daging beku yang dijual segar.</li> </ol>
14.	Drh. Dyah Anggraini, M.Si	Kepala Bidang Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Kaltim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu peningkatan pengawasan lalu lintas hewan</li> <li>2. Perlu penambahan cakupan vaksinasi</li> <li>3. Perlu peningkatan kegiatan Kesmavet untuk sertifikat NKV, halal dan pemotongan sapi betina produktif.</li> <li>4. Perlu peningkatan surveilans oleh UPTD Laboratorium keswan dan kesmavet sebagai salah satu tupoksinya yaitu menunjang kegiatan keswan dan kesmavet.</li> <li>5. Perlunya peningkatan kegiatan edukasi dan sertifikasi karena masih banyaknya unit usaha yang belum bersertifikat NKV, MD dan bersertifikat halal.</li> <li>6 Diperlukan upaya peningkatan promosi dan pemasaran produk hasil peternakan</li> <li>7 Perlu peningkatan cakupan vaksinasi.</li> <li>8 Perlu peningkatan izin usaha obat hewan.</li> <li>9 Perlu peningkatan <i>public awareness</i> karena tanpa peran aktif peternak maka kegiatan pemberantasan tidak bisa optimal.</li> <li>10 Pembebasan penyakit berdasarkan kompartemen dan wilayah pada tahun 2022 yaitu pembebasan penyakit Rabies pada P. Derawan, P. Kakaban dan P. Maratua sudah pada tahap profiling, namun tertunda karena kondisi Covid dan cuaca belum bisa terlaksana langkah selanjutnya.</li> </ol>
15.	Drh. Siti Saniatun Saadah, M.Si	Kepala Bidang Pasca Panen dan Kesmavet DPKH Provinsi Kaltim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan SKSR menjadi tanggungjawab dinas.</li> <li>2. Petugas satgas akan menginformasikan ke kabupaten kota terkait MoU dan Kerjasama yang sudah ada.</li> <li>3. Diperlukan pendataan kondisi RPH dan pemotongan di kabupaten/kota</li> <li>4. Diperlukan dana besar untuk penjangkaran betina produktif</li> <li>5. Perlunya kerjasama dan koordinasi dengan kabupaten/kota serta diberikan saran ke pusat terkait regulasi penjualan daging beku.</li> </ol>
16.	Dr. Rosmelati Situmeang, drh. M.Kes	Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet DPKH Provinsi Kaltim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan UPTD Laboratorium Keswan &amp; Kesmavet sebagai LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) merupakan bentuk implementasi PP Nomor 39 Tahun 2021 agar semua produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal dengan pentahapan dan jika tidak dilaksanakan akan terkena sanksi. Adapun manfaat dibentuknya LPH : 1) untuk memberikan kemudahan pelaku usaha mengurus sertifikat halal sehingga tidak perlu lagi mengirim keluar Kaltim dan 2) keringanan biaya pengurusan sertifikat halal karena beberapa pengujian halal lebih murah serta 3) peningkatan PAD dari biaya pengujian.</li> <li>2. Perlunya peningkatan pengawasan terhadap produk SBW (sarang burung walet) yang dilalulintaskan melalui pengujian laboratorium sebagai persyaratan terbitnya Sertifikat Veteriner.</li> </ol>



No	Nama	Instansi	Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok
17.	Drh. Kartika Atmisari	Kepala RPH (Rumah Potong Hewan) Dinas Pertanian Kota Samarinda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukan evaluasi terhadap bhabinkamtibmas dalam rangka pengawasan pemotongan ternak sapi betina produktif</li> <li>2. Perlu dibuat peraturan terkait penjualan daging beku yang dijual</li> <li>3. Perlu adanya kesepakatan antara provinsi dan kabupaten kota bisa terkait pemberantasan penjualan daging beku menjadi daging segar.</li> </ol>
18.	Hendry Witra, S.Pt	UPTD Pembibitan Petangis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukan pengawasan lalu lintas unggas terutama pada pencegahan penyakit AI karena pengawasan lalu lintas pada malam hari cukup sulit dan keterbatasan petugas.</li> <li>2. Diperlukan Dokter Hewan sebagai petugas pemeriksaan SKSR dengan alokasi penempatan tenaga THL Dokter Hewan di Paser.</li> </ol>
19.	Drh. Totok	Kepala RPH Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya informasi NIB sebagai persyaratan sertifikat halal agar legalitas RPH Balikpapan terjamin karena RPH Balikpapan hanya memiliki surat keterangan dari LPPOM MUI Kaltim.</li> <li>2. Perlunya kerjasama yang aktif dari Polres dan Polda dalam pemantauan pemotongan sapi Betina Produktif karena sapi yang memiliki SKSR nilai jualnya tinggi.</li> </ol>
20.	Drh. Endang (Karantina)	Karantina Balikpapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apresiasi terhadap akreditasi tes elisa rabies untuk HPR yang akan dilalulintaskan khususnya yang berasal dari Kota Samarinda.</li> <li>2. Perlunya pengujian SBW yang dilakukan pada tempat-tempat yang bersih karena rata-rata produk SBW yang dilalulintaskan dari Kalimantan Timur masih dalam bentuk row material/kotor</li> </ol>
21.	Widodo	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperlukan informasi terkait perkembangan Check Poin antara Kaltim dan Kaltara</li> <li>2. Terkait perizinan di Berau sudah melalui OSS, sebelumnya dari Dinas hanya akan mengeluarkan rekomendasi dan izin akan dikeluarkan oleh DPMPSTSP Kab. Berau.</li> <li>3. Perlunya informasi terkait daerah sumber bibit agar pengadaan ternak tidak terkendala akibat tidak adanya ternak yang dikeluarkan dari daerah sumber bibit.</li> <li>4. Perlu pemberian insentif kepada petugas keamanan kepolisian agar pemotongan sapi betina produktif menurun secara signifikan</li> <li>5. Sangat diharapkan UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet dapat mengujikan pakan ternak buatan/ alternatif dengan formulasi pakan dari peternak sendiri.</li> </ol>
22.	drh. Pradipta Hendra	Karantina Samarinda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya pelaporan kejadian penyakit dalam bentuk rekapan tiap bulan bagi dokter hewan praktek</li> <li>2. Perlu dilakukan monitoring bersama atau kegiatan pengambilan darah bersama terkait penyakit Brucellosis</li> </ol>

Samarinda, 10 Maret 2022

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Kalimantan Timur

Kepala



H. Munawwar, S.T, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP 19671129 199803 1 003